

UNDUH MAJALAH **ARSIP** DALAM FORMAT DIGITAL



Cara unduh majalah ARSIP dalam format digital:

1. Masuk ke *website* www.anri.go.id
2. Klik menu "Publikasi"
3. Kemudian pilih "Majalah ARSIP"
4. Unduh *file* "Majalah ARSIP"
5. Majalah ARSIP tersedia dalam *Portable Document Format (PDF)* dan dapat dibaca menggunakan *software Adobe Acrobat*

EDISI 73/SEPTEMBER-DESEMBER/2017



ARSIP

Media Kearsipan Nasional

KEINDONESIAAN

ANRI MAJALAH ARSIP

KEINDONESIAAN

EDISI 73/SEPTEMBER-DESEMBER 2017





anri

**PUSAT
JASA
KEARSIPAN**

Arsip Nasional Republik Indonesia

*Mitra Terpercaya
dalam Pengelolaan Arsip*



Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selain sebagai pembina kearsipan nasional juga ditugaskan untuk memberikan bantuan teknis secara langsung kepada pencipta arsip dalam melaksanakan kewajiban mengelola arsipnya. Bantuan teknis tersebut tidak bersifat hibah melainkan melalui pembiayaan dengan mekanisme penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Untuk itu dibentuklah Pusat Jasa Kearsipan yang memiliki tugas memberikan pelayanan jasa di bidang kearsipan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Arsip Nasional Republik Indonesia, jenis pelayanan jasa kearsipan meliputi:

- Pembuatan pedoman kearsipan untuk organisasi atau lembaga;
- Pembuatan program aplikasi sistem kearsipan;
- Pembenahan arsip;
- Pemeliharaan dan perawatan arsip;
- Penyimpanan arsip.

Informasi Lebih Lanjut
Hubungi Pusat Jasa Kearsipan ANRI:
Jl. Ampera Raya No. 7 Jakarta
12560 - Indonesia
Telp : +62 21 780 5851 / +62 21 781 5157 Ext. 403/506
Fax : +62 21 7810280 / +62 21 7805812
Email : pusat.jasa@gmail.com
www.jasakearsipan.anri.go.id



KUNJUNGI...
**GEDUNG ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DI JALAN GAJAH MADA NO. 111, JAKARTA BARAT**

- PAMERAN KELEMBAGAAN ARSIP NASIONAL RI
- PAMERAN ARSIP
- PEMUTARAN ARSIP FILM SEJARAH PERJUANGAN INDONESIA
- PAMERAN BENDA-BENDA BERSEJARAH

Jadwal Berkunjung:
Pameran Arsip, Kelembagaan, & Pemutaran Arsip Film
Dibuka Senin-Jum'at, 9.00-15.00 WIB



DAFTAR ISI



5 KEINDONESIAAN MERUPAKAN PERJALANAN BANGSA YANG DINAMIS

Di tengah konstelasi bangsa akibat perkembangan globalisasi saat ini, perlu kiranya mengangkat nilai-nilai kearifan lokal. Dengan menjaga kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah di Indonesia, maka identitas kebangsaan dapat terus dipelihara.

DARI REDAKSI ————— **4**

KHAZANAH ————— **16**

MENGGALI KAIN TENUN INDONESIA MELALUI ARSIP

KHAZANAH ————— **21**

PEMBEBASAN IRIAN BARAT: UPAYA PEWUJUDAN KEDAULATAN POLITIK DAN EKONOMI

WAWANCARA EKSKLUSIF ————— **24**

MEMAKNAI NILAI-NILAI KEINDONESIAAN

PROFIL ————— **28**

EDHI SUNARSO SOSOK SENIMAN PEJUANG

DAERAH ————— **31**

EVALUASI PENGAWASAN KEARSIPAN, MENPAN DAN RB TEGASKAN AKAN ADA SANKSI BAGI LEMBAGA KEARSIPAN



8 PENTINGNYA ARSIP PERBATASAN DALAM PENENTUAN KEDAULATAN BANGSA

Tulisan ini akan membahas tentang perbatasan Indonesia dengan dua Negara, satu yang dibatasi dengan laut dan satu lagi berbatasan dengan daratan. Tulisan ini difokuskan pada perbatasan darat, yakni antara Indonesia dan Malaysia di pulau Kalimantan, dan perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura. Sementara itu, sumber data yang digunakan adalah sumber arsip hingga terbitan sezaman.

MANCA NEGARA ————— **36**

WHO DO WE THINK WE ARE? QUI SOMMES-NOUS?

HUKUM ————— **38**

SEWINDU UNDANG-UNDANG KEARSIPAN (CATATAN SINGKAT DELAPAN TAHUN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN NASIONAL)

VARIA ————— **41**

PERAN BAHASA PADA ERA KOLONIAL

VARIA ————— **44**

WAJAH INDONESIA DI KAMPUNG KUBU GADANG KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

CERITA KITA ————— **46**

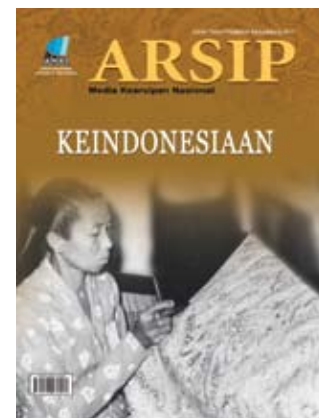
PENCARIAN

LIPUTAN ————— **48**



14 ARSIP VERSUS HOAKS

Kemunculan hoaks menciptakan antitesis dengan menghadirkan bukti palsu yang melemahkan negara. Pada hakikatnya pemerintah telah memiliki manifestasi bukti kebenaran informasi dalam arsip yang menanti dimanfaatkan. Hal ini berdasar pada bahwa hakikatnya setiap entitas penyelenggara pemerintahan merupakan pencipta arsip yang berkewajiban mengelola arsip atas pelaksanaan fungsi dan tugasnya.



Cover Designer : Isanto

KETERANGAN COVER

Seorang Ibu sedang Membuatik
Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah 1249

Pembina:

Kepala ANRI,
Sekretaris Utama,
Deputi Bidang Konservasi Arsip,
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan,
Deputi Bidang Informasi dan
Pengembangan Sistem Kearsipan

Penanggung Jawab:

Syaifuddin

Pemimpin Redaksi:

Gurandhyka

Wakil Pemimpin Redaksi:

Rosnarjo

Dewan Redaksi:

Azmi, Hilman Rosmana,
M. Ihwan,
Bambang Parjono Widodo,
Langgeng Sulisty B

Redaktur Pelaksana:

Bambang Barlian,
Susanti,

Editor:

Dhani Sugiharto,
Aria Maulana,
Rayi Darmagara,
R. Suryagung Sudibyo P,
Muhammad Rustam
Intan Lidwina
Annawaty Betawinda

Fotografer:

Muhamad Dullah
Lukman Nul Hakim

Desain Grafis:

Beny Oktavianto
Isanto

Sekretariat:

Khoerun Nisa Fadillah,
Yuanita Utami,
Krestiana Evelyn

Majalah ARSIP menerima artikel dan berita tentang kegiatan kearsipan dan cerita-cerita menarik yang merupakan pengalaman pribadi atau orang lain. Jumlah halaman paling banyak tiga halaman atau tidak lebih dari 500 kata. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut, tanpa mengurangi maksud isinya. Artikel sebaiknya dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* ke alamat Redaksi: Bagian Humas dan TU Pimpinan, Arsip Nasional Republik Indonesia, Jalan Ampera Raya No. 7 Cilandak, Jakarta 12560, Telp.: 021-780 5851 Ext. 404, 261, 111, Fax.: 021-781 0280, website: www.anri.go.id, email: humas@anri.go.id



Tim Redaksi

Indonesia sebagai negara besar, terdiri atas berbagai suku, bangsa, bahasa, dan agama, merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya, menjadi tugas kita semua untuk menjamin kehidupan yang pluralistik: multicultural, multietnik dan multiagama agar tetap rukun, damai, dan tidak terjadi konflik dengan berazaskan Undang-Undang dasar 1945 dan Pancasila.

Keanekaragaman bangsa yang menyebar pada etnis dan suku bangsa memiliki peranan sangat penting untuk memperkuat rasa keindonesiaan dan menekan potensi konflik di masyarakat. Pengembangan keanekaragaman budaya bukan hanya untuk kepentingan lokalitas semata, namun untuk memperkuat landasan nasionalisme bangsa Indonesia. Di tengah konstelasi kehidupan bangsa akibat perkembangan globalisasi saat ini, perlu kiranya mengangkat nilai-nilai kearifan lokal. Dengan menjaga keanekaragaman yang dimiliki setiap daerah di Indonesia, maka identitas kebangsaan dapat terus terpelihara.

Keanekaragaman itu sendiri dapat kita temui dalam tulisan, gambar, dan suara pada manuskrip, puisi, nyanyian-nyanyian, pepatah dan petuah atau pun arsip. Selain itu, ada juga kearifan lokal yang berbentuk lisan yang hingga kini diwariskan secara terus menerus dan turun temurun. Kearifan lokal tersebut, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan dapat dijadikan sebagai acuan perilaku sehari-hari. Apalagi di dalam khazanah budaya etnik nusantara yang tersebar, banyak sekali nilai-nilai keunggulan budaya lokal yang dapat dijadikan sebagai karakter bangsa.

Pada tema kali ini, Majalah ARSIP mengangkat tema "Keindonesiaan". Adapun bahasan yang ada di dalam majalah ARSIP kali ini mencakup kedaulatan bangsa, kearifan lokal, memori bangsa dan memori dunia, tantangan keindonesiaan, serta Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Tak lupa pula, kami sajikan Rubrik Khazanah, Rubrik Profil, Rubrik Daerah, Rubrik Mancanegara, Rubrik Hukum, Rubrik Varia, Rubrik Cerita Kita dan Rubrik Liputan berita-berita kearsipan menjadi pelengkap pada edisi kali ini.

Akhirnya, semoga sajian informasi edisi kali ini, dapat memberikan manfaat bagi Sahabat Arsip. Sekiranya terdapat berbagai kekurangan, kami sangat berharap memperoleh saran dan kritik untuk perbaikan edisi selanjutnya.

Salam Redaksi



KEINDONESIAAN MERUPAKAN PERJALANAN BANGSA YANG SANGAT DINAMIS

Setiap negara, termasuk bangsa Indonesia pada umumnya memiliki wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan Indonesia lahir jauh sebelum menjadi Negara Indonesia. Wawasan kebangsaan Indonesia muncul dari kesadaran segenap masyarakat untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan, kesejahteraan, dan kedamaian bangsa Indonesia. Paska kemerdekaan Indonesia, wawasan kebangsaan menjadi wawasan nasional Indonesia, yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dalam hubungan antarnegara yang merupakan hasil perenungan filsafat tentang diri dan lingkungannya dengan memperhatikan sejarah dan kondisi sosial budaya serta memanfaatkan konstelasi geografis

guna menciptakan dorongan dan rangsangan untuk mencapai tujuan nasional.

Kehadiran bangsa Indonesia itu tidak terlepas dari adanya kolonialisme yang telah memberi andil untuk mempersatukan bangsa Indonesia dari rasa ingin merdeka, ingin bebas, ingin adil dan makmur dan seterusnya. Itu semua merupakan 'nasionalisme'-ekspresi politik dari kebangsaan yang kemudian pada paskakemerdekaan Indonesia diikuti dengan kenyataan hukum, yaitu hadirnya Undang-Undang Dasar tahun 1945 maupun perangkat lainnya yang dibutuhkan oleh suatu negara. Selanjutnya proses perjalanan suatu bangsa selama 72 tahun Indonesia merdeka itulah yang dimaksud kenyataan kultural. Pemikiran inilah yang dikemukakan oleh Hilmar Farid-Dirjen Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam suatu wawancara eksklusif dengan reporter Majalah Arsip. "Ke-Indonesiaan itu adalah suatu perjalanan bangsa yang sangat dinamis melalui tahap-tahap awal proses suatu bangsa dari kenyataan politik menjadi kenyataan hukum dan pada akhirnya ketika suatu bangsa bergulat untuk meneguhkan Negara Indonesia, inilah sebagai suatu kenyataan kultural", tutur Hilmar Farid.

Dalam konteks kultural, perjalanan bangsa Indonesia senantiasa terkait dengan beberapa isu aktual yang melekat dengan wawasan kebangsaan 'Ke-Indonesiaan'. Perjuangan sebagai bangsa untuk mewujudkan kemerdekaan mencapai puncaknya ketika Republik Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus

LAPORAN UTAMA

1945. Semangat yang besar pada masa penjajahan tampaknya kurang berlanjut setelah masa-masa kemerdekaan. Setelah sekian lama meredup semangat kebangsaan itu kembali berkobar pada 1998. Era reformasi ini merupakan imbas dari krisis ekonomi dan moneter yang berkembang di Indonesia serta menjadi krisis multidimensi dan moral. Gerakan reformasi telah membawa perubahan yang cukup berarti seperti amendemen UUD 1945, otonomi daerah, dan kebebasan pers. Namun dibalik itu, kehidupan bangsa Indonesia masih banyak yang harus diperbaiki, terlebih perkembangan demokrasi yang terjadi di Indonesia yang akhir-akhir ini masih ada sebagian masyarakat kita mengkritisi keberagaman Ke-Indonesiaan.

Penyebab ketidakmampuan bangsa dan negara Indonesia bersumber dari masih lemahnya

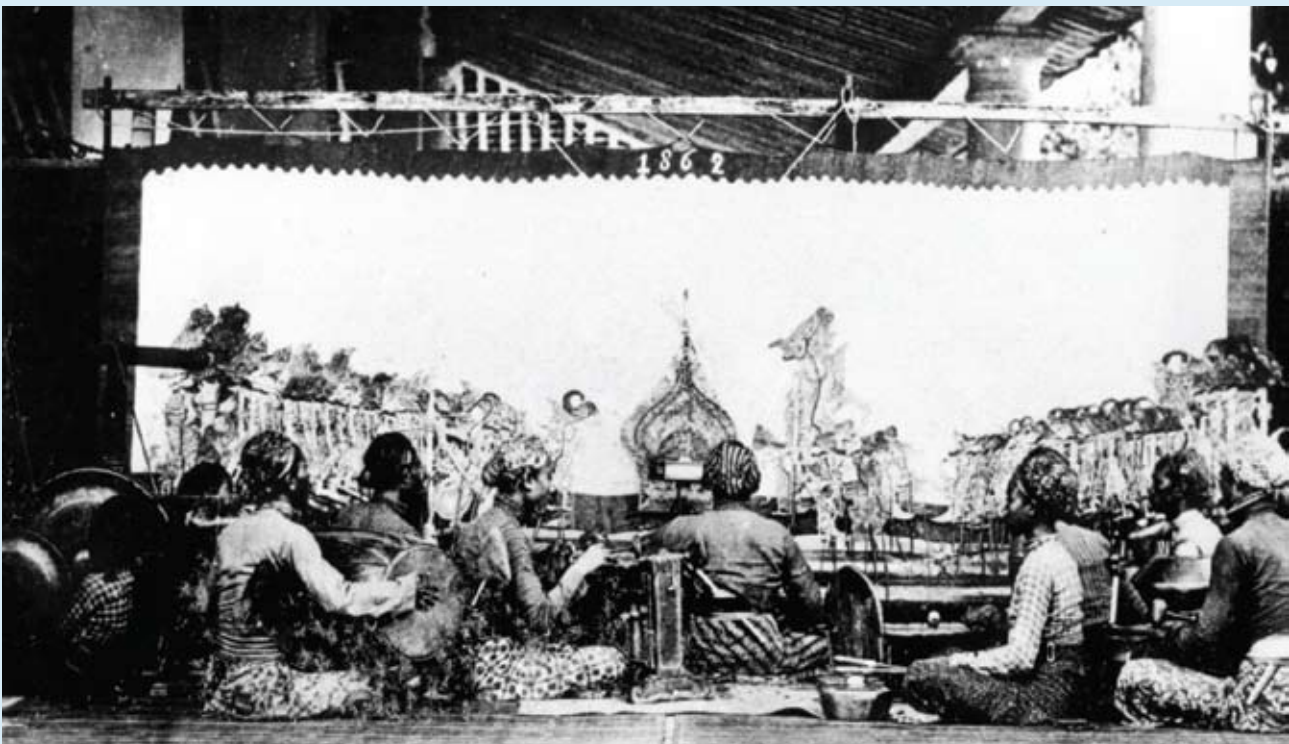


Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid

kesadaran kebangsaan yang dimiliki warganya. Dengan kata lain, wawasan, kesadaran, dan kebanggaan sebagai bangsa dan negara Indonesia masih perlu disosialisasikan. Dalam hal ini Mustari Irawan -Kepala

Arsip Nasional Republik Indonesia berpendapat, sebagai suatu bangsa kita jangan sampai melupakan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, program sosialisasi empat pilar kebangsaan harus terus dilaksanakan ke semua kalangan di seluruh pelosok tanah air. Menurutnya, sosialisasi empat pilar (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI) harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Tugas kita semua untuk menjamin kehidupan bangsa Indonesia yang pluralistik: multikultural, multietnik dan multiagama ini agar tetap rukun, damai, hidup berdampingan dan saling toleransi dengan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Mustari Irawan, di tengah konstelasi bangsa akibat perkembangan globalisasi saat ini,



Pertunjukan Wayang Kliithik di Blora dengan para pemain Gamelan. Wayang merupakan salah satu karakteristik bangsa Indonesia yang harus selalu dilestarikan agar dapat terus dinikmati oleh masyarakat. Di dalam pertunjukan wayang sendiri terdapat pesan-pesan yang disampaikan mengenai nilai-nilai luhur, agung serta nilai-nilai kearifan lokal

Sumber : ANRI, KIT Jawa Tengah, 919-49



Tokoh Masyarakat,
KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah)



Kepala ANRI, Mustari Irawan

“ Tugas kita semua untuk menjamin kehidupan bangsa Indonesia yang pluralistik, multikultural, multietnik dan multiagama ini agar tetap rukun, damai, hidup berdampingan dan saling toleransi dengan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ”

perlu kiranya mengangkat nilai-nilai kearifan lokal. Dengan menjaga kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah di Indonesia, maka identitas kebangsaan dapat terus dipelihara. Pendapat senada juga disampaikan oleh Hilmar Farid –seorang birokrat yang juga berprofesi sejarawan, yang mencoba mencontohkan kearifan lokal yang dikemukakan oleh Bung Karno, “Saya (Bung Karno) ini tidak pernah menemukan, saya hanya menggali, menggali dari pengalaman konkrit orang Indonesia ketika berusaha memperjuangkan dirinya menjadi merdeka, dan saya kira itulah yang memperlihatkan bahwa bangunan Indonesia modern sekarang ini sebetulnya kumpulan tiang-tiang

pendukungnya itu tetaplah kearifan-kearifan lokal”. Itu artinya, bangsa dan masyarakat Indonesia harus menjadi negeri yang modern dengan caranya sendiri, caranya sendiri inilah suatu tradisi yang terbaik yang berpijak pada apa yang pernah dimiliki, paparnya.

Dalam penjelasannya Hilmar Farid menambahkan, memahami kearifan lokal berarti harus berpijak pada apa yang kita punya, yaitu bersandar kepada tradisi dan sejarah, namun pada saat yang bersamaan kita juga harus kritis terhadap sejarah dan tradisi yang dimilikinya. Itu artinya, kita harus menginterogasi masa lalu dengan mengkaji dari perspektif kekinian sehingga menghasilkan

landasan etis atau norma, nilai yang menjadi pegangan hidup suatu bangsa. Pendapat senada juga disampaikan oleh Mustari Irawan –birokrat yang menggemari puisi ini, menurutnya kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah merupakan identitas kebangsaan yang harus dipelihara dari adanya arus globalisasi. Oleh karena, itu strategi kebudayaan yang harus dilakukan adalah memelihara nilai-nilai kearifan lokal sehingga dapat menyerap dan memfilter globalisasi sesuai etnisitas dan tradisi. Salah satunya dapat dilihat dari kearifan lokal tertulis yang ditemui dalam lembaran-lembaran manuskrip, puisi, pepatah, dan petuah ataupun -arsip masa lalu yang dijadikan sebagai acuan perilaku sehari-hari. “ANRI melalui Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa merupakan salah satu cara mengenalkan nilai-nilai Ke-Indonesiaan”, terang Kepala ANRI, Mustari Irawan.

Terkait dengan adanya arus globalisasi ini menurut KH. Salahuddin Wahid yang akrab disapa dengan Gus Sholah ini, perjalanan bangsa Indonesia selama 72 tahun adalah bukti kita sebagai bangsa yang dinamis, bangsa yang sejak awal sudah terbentuk kebhinekaan sebagai modal untuk merdeka. Menurutnya, untuk memelihara Ke-Indonesiaan bisa dilakukan dengan cara menjabarkan tindakan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, membebaskan rakyat dari kemiskinan. “Dari sinilah nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, tidak hanya dibaca, dipahami saja tetapi yang terlebih penting adalah tindakan nyata, karenanya nilai-nilai kebangsaan Indonesia menjadi modal bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman”, ungkapnya. Dengan kata lain, perjalanan bangsa Indonesia yang dinamis menjadi bukti ke-Indonesiaan kita (BPW).

Djoko Marhandono

PENTINGNYA ARSIP PERBATASAN DALAM PENENTUAN KEDAULATAN WILAYAH

Permasalahan perbatasan kapan pun itu, tetap akan selalu aktual dan menarik untuk dibicarakan. Permasalahan itu muncul berbeda dari tahun ke tahun. Pada awal 2000, masalah pulau Sipadan dan Ligitan. Permasalahan tersebut selesai, disusul dengan masalah Ambalat, masalah pencurian hasil laut oleh nelayan negara asing, penyelundupan di tengah laut, dan permasalahan lainnya. Namun dari semua permasalahan itu semuanya didasari oleh permasalahan perbatasan.

Patut kita syukuri bahwa secara geografis, letak Negara kita diapit oleh dua benua (Asia dan Australia), antara dua samudera (Samudera Hindia dan Pasifik). Sejak di bangku SMA kita sudah diajari oleh guru-guru kita bahwa dengan posisi tersebut Indonesia berada pada posisi silang, yang menjadi tempat persilangan lalu lintas dunia, baik itu lalu lintas darat, laut, maupun udara.

Posisi yang amat strategis ini ditambah lagi dengan potensi pulau-pulau yang ada di dalamnya, memicu bangsa asing, khususnya bangsa Eropa, sejak abad 16 telah mencari pulau yang menjadi sumber produk rempah. Pencarian hasil komoditi dagang ini terbentang dari pulau Sumatera, yang kaya akan lada, dilanjutkan ke pulau Jawa, yang kaya akan produk padi, hingga di Maluku dan sekitarnya yang kaya akan produk rempah-rempah. Dengan demikian, menguasai pulau-pulau di wilayah Nusantara ini menjadi penting bagi bangsa Eropa untuk mencari

keuntungan dari produk komoditi dagang yang dijual ke pasaran Eropa.

Saat ini kita telah mengetahui bahwa secara geografis Negara kita berbatasan dengan beberapa wilayah Negara lain, baik dengan daratan maupun dengan lautan. Di sebelah utara, berbatasan dengan Negara Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam dan Samudera Pasifik. Batas barat, negara kita berbatasan dengan Samudera Hindia dan Negara India. Sebelah Selatan, Indonesia dengan Samudera Hindia dan Timur Leste, dan di bagian timur bertetangga dengan Papua Nugini. Dengan melihat peta geografisnya, Indonesia berbatasan dengan 10 negara yang dihubungkan dengan laut dan 3 negara yang dihubungkan dengan daratan.

Tulisan ini akan membahas tentang perbatasan Indonesia dengan dua Negara, satu yang dibatasi dengan laut dan satu lagi berbatasan dengan daratan. Tulisan ini difokuskan pada perbatasan darat, yakni antara

Indonesia dan Malaysia di pulau Kalimantan, dan perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura. Sementara itu, sumber data yang digunakan adalah sumber arsip hingga terbitan sezaman.

Sumber Arsip Perbatasan: Borneo dan Selat Malaka

Sumber arsip tentang perbatasan antara Malaysia dan Singapura memiliki dua bidang yang berbeda. Perbedaan itu tidak hanya menyangkut perjanjian antara pemerintah Belanda dan Inggris saja. Apabila dilihat dari sejarahnya, perjanjian antara Inggris dan pemerintah Belanda tentang Borneo, statusnya berbeda dengan perjanjian antara pemerintah Belanda dan Inggris di pulau Tumasek (Sekarang Singapura). Perjanjian antara Belanda dan Inggris tentang pulau Tumasek merupakan hasil kesepakatan Traktat London II antara pemerintah Inggris dan Belanda di London. Perjanjian ini adalah perjanjian yang bersifat internasional, karena tidak hanya melibatkan antara Inggris dan Belanda saja namun juga dalam hubungannya dengan negara-negara lain di dunia yang memanfaatkan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional.

Dengan ditandatanganinya Traktat London II ini, batas antara wilayah Hindia Belanda dan wilayah Inggris ditetapkan untuk pertama kalinya yang didasarkan pada hukum internasional.

Sumber Arsip Perbatasan Indonesia-Malaysia di Borneo

Untuk mengkaji Arsip perbatasan antara Kalimantan Barat yang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Kalimantan Bagian Utara yang menjadi bagian dari wilayah Malaysia, diperlukan arsip koleksi bundel Borneo. Dalam bundel Borneo ini tersimpan kumpulan *Politiek Verslag van Residentie West Borneo* atau Laporan Politik Residensi Borneo Barat. Selain itu, kita juga akan menemukan dalam bundel itu *Algemeen Verslag van Residentie West Borneo* atau Laporan Umum Residensi Borneo, dan *Administratief Verslag van Residentie West Borneo* atau Laporan Administrasi Residensi Borneo.

Selain koleksi *bundel West Borneo*, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) juga telah mengelompokkan bundel *Afdeeling Oost en Zuid Borneo Residentie* atau Residensi Borneo Timur dan Selatan. Arsip yang berasal dari Residensi Borneo Timur dan Selatan ini bila dibandingkan dengan arsip West Borneo, arsip Timur dan Selatan Borneo, saat ini masuk dalam Provinsi Kalimantan Timur. Kedua bundel arsip ini diperlukan karena keduanya berbatasan dengan wilayah Hindia Belanda dan *Crown Colony* milik Inggris di Borneo Utara.

Kedua koleksi Arsip Nasional tersebut merupakan laporan kolonial periode abad XIX, yang mulai dilaporkan sejak mulainya birokrasi di wilayah itu berdiri sampai akhir. Namun, ada hal yang perlu dicatat bahwa pada rentang waktu tersebut terjadi reorganisasi pemerintahan sebagai akibat dari diberlakukannya *Decentralisatie Wet* atau Undang-Undang Desentralisasi pada 1903.

Dengan adanya peraturan ini, seluruh struktur birokrasi di wilayah koloni berubah, termasuk di dalamnya sistem korespondensi juga mengalami perubahan. Perubahan yang paling mencolok adalah para kepala daerah (*Resident*) tidak lagi diwajibkan untuk memberikan laporan rutin tentang hasil kinerja mereka setiap tahun. Sebagai gantinya, para kepala daerah itu hanya diminta untuk membuat laporan pada akhir masa jabatan mereka. Laporan inilah yang hingga saat ini kita kenal sebagai MVO (*Memorie van Overgave*) atau apabila kita bandingkan dengan kondisi saat ini adalah Laporan Serah Terima Jabatan. Dalam laporan ini, dilaporkan semua peristiwa yang terjadi dalam lingkup pekerjaan para kepala daerah itu, yang dikirimkan kepada pemerintah pusat sebagai pertanggungjawaban mereka selama menjabat. Pemerintah pusat di Batavia kemudian menyerahkannya kepada penggantinya sebagai dasar dari strategi pejabat yang baru. Dilihat dari kontennya, sumber arsip ini memiliki nilai informasi yang tinggi terutama laporan tahunan sebelumnya karena langsung merujuk pada peristiwa yang terjadi di daerah tersebut yang dibuat langsung oleh pejabat yang berwenang.

Selain kedua bundel tersebut, perlu dipertimbangkan untuk membuka bundel *Algemeen Secretarie*. Bundel ini terdiri atas dua periode yakni periode 1816 sampai dengan 1891 dan periode 1891 sampai dengan 1942. Pembagian secara temporal ini dilakukan karena adanya alasan administratif yaitu terjadinya perubahan kewenangan terutama perubahan yang terjadi pada institusi *Algemeen Secretarie* (Sekretariat Negara) sebagai suatu lembaga yang khusus mengurus dan menyimpan arsip-arsip Negara. Dalam khazanah kearsipan di ANRI, periode 1816-1891 disebut sebagai koleksi *Algemeen Secretarie Gajah Mada*, sementara periode 1891-1942 lazim disebut sebagai *Algemeen Secretarie Bogor*.

Perbedaan penyebutan istilah ini didasarkan pada penyimpanan koleksi arsip tersebut pada masa lampau.

Dalam kedua koleksi ini (Gajah Mada dan Bogor) ditemukan berkas-berkas penting yang mengacu pada perjanjian perbatasan ini. Bundel ini berisi tentang *Besluit van Gouverneur Generaal*, *Agenda*, *Missive van Gouvernement Secretarie*, *Brief van Gouvernement Secretaris*, *Renvoi*, dan Komisorial. Berdasarkan sifat arsipnya, arsip ini bersifat sangat rahasia dan merupakan laporan yang berisi penuh informasi yang menentukan kebijakan atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Dari arsip ini diketahui kepastian dokumen itu antara lain, kapan dokumen itu dibuat, di mana dokumen itu dibuat, oleh siapa dokumen itu dibuat, dari materi/bahan apa dokumen itu dibuat, dalam bentuk apa dokumen itu dibuat, serta Seberapa kekuatan dari konten dokumen itu.

Semua berkas tersebut berasal dari sekretariat pusat pemerintahan, yang berisi surat-surat, laporan, korespondensi, pertimbangan akan sesuatu hal, usulan akan sesuatu hal, tanggapan baik yang berasal dari pemerintahan di pusat maupun di daerah.

Selain itu, arsip kolonial yang masih sering digunakan adalah *Politiek Verslag van Buitengewesten*. Koleksi ini berlangsung dari 1927-1942. Dari koleksi ini yang diperlukan adalah laporan politik yang dibuat oleh intelijen dari masing-masing residen di luar Jawa, termasuk Borneo Barat dan Borneo Timur-Tenggara. Laporan politik ini biasanya dibuat enam bulan sekali. Informasi yang terkandung dalam *Politiek Verslag van Buitengewesten* ini tentu saja berkaitan dengan peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di daerah-daerah di luar Jawa, seperti kegiatan politik dan keagamaan, tindakan orang asing, tokoh lokal, serta yang menyangkut tokoh dari elite lokal setempat.

Setelah ditemukan arsip-arsip yang berkaitan dengan perbatasan, melangkah kepada tahap yang kedua, yakni mencari terbitan sezaman. Yang dimaksudkan sebagai terbitan sezaman tidak hanya sekadar tulisan masa lain saat terjadinya suatu peristiwa atau saat munculnya tokoh tertentu, namun juga tulisan-tulisan pada tahun atau abad berikutnya tentang peristiwa ataupun tokoh yang diteliti. Selain surat kabar, juga harus dicari tulisan-tulisan yang dimuat pada majalah lama. Tentu saja informasi yang terkandung di dalam surat kabar atau di dalam majalah sebagai sumber sekunder, mengandung kelemahan, karena banyak dari tulisan tersebut tidak dibahas dengan analisis yang mendalam, khususnya dalam koran. Dengan demikian lebih banyak unsur subjektivitasnya, khususnya tulisan di koran yang ditulis oleh para wartawan. Dalam koran, yang dipentingkan adalah unsur kedekatannya dengan suatu peristiwa atau suatu tokoh, dengan kadar subjektivitas yang cukup tinggi. Berbeda dengan sifat arsip, semakin jauh dengan suatu peristiwa, maka isinya akan semakin subjektif. Sementara itu dalam berita koran, semakin dekat dengan peristiwa yang terjadi, beritanya akan semakin subjektif.

Mengingat bahwa pemasalahan yang dibahas adalah masalah perbatasan di Borneo, tentu saja, perlu dicari berita yang dimuat di koran-koran terbitan Borneo, seperti Banjarmasin, Pontianak, dan juga koran terbitan yang dekat dengan pulau itu, yakni koran dari Riau. Ketiga koran ini patut diduga akan banyak memuat tentang wilayah perbatasan yang berhubungan dengan perbatasan Borneo Belanda dan Borneo Inggris yang menjadi area jangkauan dari ketiga koran tersebut.

Sumber sezaman lainnya adalah majalah lama, yaitu majalah yang diterbitkan pada masa lampau, tatkala suatu peristiwa terjadi. Berbeda dengan berita, artikel dalam

yang dimuat di dalam majalah lama bersifat ilmiah. Walaupun artikel ini juga masih mengandung unsur subjektivitas yang tinggi, namun sebagai karya ilmiah, konten dari tulisan dalam majalah tersebut perlu dipertimbangkan sebagai rujukan, karena akan memperjelas terjadinya suatu peristiwa atau munculnya tokoh tertentu. Biasanya artikel dalam majalah ini disertai dengan data primer seperti statistik, neraca, atau hasil penelitian sebelumnya yang sudah melewati tahap verifikasi sebelumnya. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai pelengkap, atau bahkan pembanding dari isi sumber yang diperoleh dari arsip. Majalah-majalah lama yang sering digunakan antara lain: *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie*, *Indische Gids*, *de Gids*, *Tijdschrift voor Binnenlandsch Bestuur*, dan majalah lainnya.

Sumber Arsip Perbatasan Indonesia Singapura

Titik awal dari perbatasan antara wilayah Inggris di Malaya dan wilayah Belanda di kepulauan Riau menjadi pembahasan yang cukup penting, karena di antara kedua wilayah itu terdapat selat yang dibutuhkan oleh semua negara di dunia sebagai jalur pelayaran internasional.

Titik awal dari kajian perbatasan antara Indonesia dan Singapura ini tatkala ditandatangani Traktat London II, yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang sudah disepakati pada Traktat London I pada 1815. Dengan melihat perkembangan yang terjadi di masa lampau, khususnya untuk mengetahui perjanjian ini, harus didasarkan pada arsip tertulis yang menjadi rujukan dari perjanjian ini. Koleksi *Binnenlandsch Bestuur*. Daribundel ini yang diperlukan adalah periode 1849 sampai dengan 1942, yaitu periode ketika departemen pemerintahan menjadi institusi resmi di wilayah koloni ini. Bundel wilayah Riau dan pulau-pulau di sekitarnya yang berbatasan dengan Singapura

merupakan bundel yang diperlukan untuk membahas tentang wilayah perbatasan ini.

Bundel kedua yang digunakan seperti halnya dalam menelaah tentang perbatasan di Borneo adalah bundel *Algemeen Secretarie* periode 1816 sampai dengan 1891. Seperti telah kita ketahui, arsip ini berisi tentang laporan atau berita rahasia yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara. Isi arsip ini perlu dipelajari guna memperoleh informasi tentang kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah, baik pemerintah di Batavia maupun di daerah yang berkaitan dengan wilayah ini.

Bundel ketiga yang diperlukan adalah bundel *Residentie*, khususnya *Residentie Oostkust Sumatra* (Residensi Pantai Timur Sumatera), dan *Residentie van Riouw en Onderhoorigheden* (Residensi Riau dan sekitarnya). Mengingat bahwa hingga kemerdekaan Indonesia Singapura masih menjadi wilayah koloni Inggris, bundel Kementerian Luar Negeri menjadi penting walaupun belum semuanya tertata secara rapi. Bundel Kementerian Luar negeri yang diperlukan adalah antara 1945 sampai dengan 1965 yang sangat penting dalam memahami hubungan antara pemerintah RI dan negara tetangga termasuk Singapura yang memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Selain itu membuka arsip periode ini sangat erat kaitannya dengan pembentukan provinsi-provinsi di Riau pada 1957.

Sumber-sumber lain yang sudah diterbitkan tidak kalah pentingnya harus dibuka, antara lain Koloniaal verslag (Laporan Kolonial), sebagai laporan pertanggungjawaban Menteri Koloni dalam sidang tahunan parlemen Belanda (*iStaten Generaal*). Dalam pidato itu dimuat kebijakan pemerintah kolonial per tahun. Selain sumber *Koloniaal Verslag*, juga diperlukan untuk membuka *Staatsblad van Nederlandsch Indië*, *Bijblad van het Staatblad dan Regeeringsalmanak*.

Selama masa penjajahan Jepang, kondisi perbatasan itu masih tetap dipertahankan seperti pada kondisi pada saat pemerintah Kolonial Belanda meninggalkan wilayah Hindia Belanda sebagai akibat dari masuknya Balatentara Jepang yang menggantikan pemerintahan Belanda di Hindia Belanda. Memasuki masa Republik, khususnya setelah periode 1950-an, perlu dibuka peraturan-peraturan yang berkaitan dengan wilayah perbatasan ini.

Beberapa majalah dan koran diperlukan untuk mengetahui informasi pada masa kolonial, seperti *Indische Gids*, *De Gids*, *Tijdschrift voor Nederlandsc Indie*. Eruditas penelitian sejarah akan lebih lengkap bila disertai juga menggunakan koran sezaman seperti Kompas, Suara Karya, Batam Post, atau beberapa koran lainnya. Perlu diingat bahwa berita di koran memiliki subjektivitas yang sangat tinggi. Oleh karena itu diperlukan proses kritik sumber yang ketat untuk meminimalisir unsur subjektivitas yang ada di dalam sumber tersebut.

Dari Batas Wilayah Menuju ke Batas Negara

Berakhirnya kekuasaan Barat di Asia Tenggara menandai berakhirnya sistem pembagian wilayah yang telah berlangsung selama berabad-abad lamanya. Sistem pembagian wilayah yang telah disepakati oleh penguasa Barat otomatis runtuh tatkala kekuasaan mereka hilang digantikan oleh munculnya kekuasaan negara-negara yang baru merdeka. Status negara baru ini diakui secara internasional, yang berdampak pada penentuan tapal batas kedaulatan masing-masing. Dalam makalah ini setidaknya perbatasan antar ke tiga negara baru, yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Perang Dunia Kedua mengubah semua tatanan dunia, khususnya di Asia Tenggara. Ketika benteng pertahanan Singapura jatuh ke tangan

Jepang, kemungkinan jatuhnya wilayah Hindia Belanda ke tangan Jepang sangat terbuka. Berdasarkan laporan strategis sekutu yang sebenarnya tidak siap untuk melawan serbuan Balatentara Jepang, Sekutu mengatur pertahanan untuk menarik Jepang agar peperangan terjadi tidak di Laut Cina Selatan, melainkan di Laut Jawa. Laporan tentang kekuatan pertahanan bangsa Eropa di Jawa cukup baik, dan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mereka bisa bertahan hingga ke Australia. Dengan jatuhnya Malaya, Singapura, Filipina dan beberapa wilayah di Jawa oleh Jepang, praktis kekuatan Belanda di Hindia Belanda telah lumpuh, hanya tinggal di pertahanan di laut Jawa dan perairan sekitarnya yang masih dapat diandalkan. Namun Borneo mulai diserang oleh Balatentara Jepang pada 11 Januari 1942, Balikpapan jatuh pada 24 Januari 1942, Palembang pada 7 Februari 1942, Makassar dan Bali pada 20 Februari 1942, praktis kekuatan Sekutu hanya tinggal di Jawa dan sekitarnya. Dengan dikuasainya wilayah Timur Hindia Belanda, maka Balatentara Jepang berhasil memutuskan hubungan antara Jawa dan Australia. Pertempuran laut di laut Jawa yang mulai pada 25 Februari 1942 antara Sekutu dan Armada II Jepang di bawah komando Takeo Kurita telah mengepung sekutu dari beberapa sisi, yakni jalur barat melalui Singapura kemudian menuju ke laut Jawa. Selain itu dari Makassar dan laut Aru, Jepang menyerang dari jalur timur. Pertahanan Sekutu yang berpusat di Surabaya hanya mampu bertahan selama 2 hari. Pertempuran pada 25-27 Februari 1942 menghancurkan semua kekuatan laut Sekutu. Lumpuhnya kekuatan laut Sekutu membawa dampak pada jatuhnya pulau Jawa karena Jepang secara tidak terduga telah mendarat di beberapa tempat. Pada 5 Maret 1942 ibukota Batavia dinyatakan sebagai kota terbuka dan pada 8 Maret 1942 pasukan Belanda di bawah Letnan Jenderal Hein ter Porten menyerah

kepada Jepang.

Ketika Sekutu melakukan serangan balik pada 1944, wilayah laut menjadi sasaran utama peperangan, karena Sekutu menyerang kekuatan Jepang di darat melalui laut. Laut hanya digunakan sebagai sarana untuk mencegah kejatuhan pertahanan darat. Pada 1945, situasi perang tidak berpihak pada tentara Jepang. Janji memerdekakan Indonesia dan Malaya tidak ditepati oleh Jepang. Sama-sama sebagai negara yang akan lahir, ketiga negara (Malaya, Singapura dan Indonesia) harus menentukan batas-batas wilayahnya, baik batas teritorialnya baik di laut maupun di darat. Hal ini pasti akan mengubah konstelasi geografis dan status politiknya yang harus ditegakkan oleh masing-masing negara.

Kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamkan pada 17 Agustus 1945, sejak awal telah mengalami tekanan yang sangat berat. Dengan munculnya armada Inggris di Singapura pada awal September 1945, tentara Sekutu bersama dengan tentara Belanda tidak siap untuk mendaratkan pasukannya di bekas wilayah Hindia Belanda. Setidaknya diperlukan waktu yang cukup lama. Pemerintah Belanda setidaknya memerlukan waktu satu tahun untuk mereorganisir pasukannya. Oleh karena itu pendaratan pasukan yang dilakukan pada 29 September, hanya dilakukan oleh pasukan Inggris dan India. Tujuan mereka adalah untuk melucuti senjata pasukan Jepang, dan membebaskan tawanan Belanda yang ditahan oleh Jepang.

Setelah disepakatinya hasil Konferensi Meja Bundar, pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Konferensi yang dimulai sejak Agustus 1949 ini akhirnya harus mengakui kemerdekaan Indonesia setelah memperoleh tekanan internasional. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah Indonesia belum memiliki waktu

untuk menentukan batas wilayahnya, terutama yang berhubungan dengan perbatasan antara Indonesia dan Malaya. Penyebabnya pertama adalah perhatian pemerintah RIS masih terfokus pada masalah dalam negeri; kedua pemerintah masih menuntaskan masalah Irian barat yang masih dikuasai oleh Belanda; dan ketiga kondisi pemerintah Malaya yang masih menghadapi masalah dalam negeri yang cukup pelik.

Setelah para pemimpin Indonesia memahami bahwa negara federal sangat sulit dipertahankan di Indonesia seperti dikonsepsikan oleh Van Mook, maka pada 17 Agustus 1950, secara resmi RIS dibubarkan dan kembali ke NKRI. Namun konstitusi yang digunakan masih menggunakan UUD Sementara yang dijadikan sebagai landasan haluan negara. Kondisi ini berubah tatkala hasil Pemilihan Umum tahun 1955, Majelis Konstituante yang dipilih oleh rakyat memiliki otoritas dan legalitas yang tinggi dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk di dalamnya hubungan luar negeri. Kabinet Ali Sastroamijoyo II menghendaki diubahnya *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordinnantie* tahun 1939, yang masih merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda. Batas laut 3 mil laut masih dianggap terlalu sempit karena wilayah Indonesia berupa kepulauan yang memungkinkan dengan batas itu, kapal asing menyusup ke kepulauan Indonesia. Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo mengambil dua langkah penting, yakni: Pembentukan Propinsi Sumatera Tengah yang terdiri atas propinsi Riau dan Jambi. Wilayah provinsi ini langsung berhadapan dengan perbatasan Malaya, sehingga dengan pembentukan pemerintahan daerah akan memudahkan koordinasi di tingkat lokal. Langkah kedua adalah menyusun RUU Laut Territorial dan Lingkungan Maritim pada 17 Oktober 1956. Namun karena situasi dalam negeri sedang kacau, RUU ini tidak terwujud.

Kabinet Ali Sastroamijoyo digantikan oleh Kabinet Juanda pada 9 April 1957 oleh Presiden Soekarno. Karena banyaknya pelayaran asing yang melintas wilayah Indonesia, Djuanda mendesak segera RUU yang semula digagas, segera diundangkan. Pada 13 Desember 1957 RUU tersebut diundangkan dan lebih dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Dalam deklarasi itu disampaikan bahwa wilayah laut tidak lagi berjarak 3 mil laut, melainkan 12 mil dari garis pantai. Hal ini berarti mengurangi banyak celah laut yang berada di wilayah kepulauan RI. Tindakan Djuanda tentunya mendapatkan reaksi keras dari negara-negara yang berkepentingan dengan pelayaran di wilayah perairan Indonesia dengan menuduh bahwa Indonesia telah melanggar hukum laut Internasional. Hal ini terjadi ketika delegasi Indonesia hadir dalam Konferensi Hukum Laut Internasional I di Jenewa pada awal Februari 1958. Deklarasi Djuanda yang semula ditunda dalam konferensi serupa yang ke II yang berlangsung pada 1960. Namun, berhubung banyaknya permasalahan yang dibicarakan dalam konferensi yang ke-II ini, Deklarasi Djuanda tidak dibicarakan.

Protes keras terutama datang dari Amerika Serikat. Namun pemerintah Indonesia menaruh curiga pada keterlibatan AS dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Kecurigaan itu terbukti dengan ditembakjatuhnya pesawat Amerika di Medan pada 15 Februari 1958, yang melakukan pemboman di sekitar kota Medan. Politik Soekarno dengan berpaling ke negara-negara Timur yang membuat kekhawatiran AS terhadap sikap Indonesia. Akibatnya, Presiden Eisenhower mau tidak mau dan terpaksa mengabdikan tuntutan Soekarno. Hal ini membuat heboh dunia internasional dalam peristiwa perang dingin dengan Amerika Serikat.

Sementara Soekarno sedang memperkuat langkah-langkah diplomatiknya dengan negara lain di dunia, Inggris mulai memberikan angin bagi kemerdekaan Malaya. Setelah Inggris berhasil menumpas pemberontakan komunis di Malaya sejak 1945, rezim Inggris membuka jalan bagi elite Malaya karena parlemen Inggris pada 31 Juli 1957 mengesahkan keputusan tentang pengalihan koloninya di Penang dan Malaka serta statusnya sebagai pelindung para sultan Melayu kepada pemerintah Malaya. Ratu Elisabeth II mengesahkannya pada 31 Agustus 1957. Namun pada Agustus 1957, *People Action Party* di Singapura menuntut pemisahan dari Malaya. Dengan berbagai pertimbangan dalam sidang parlemen Inggris di bulan Mei 1958 disepakati bahwa Singapura akan mendapatkan konstitusi yang baru.

Kemunculan Singapura dan Malaya sebagai kekuatan yang baru, permasalahan perbatasan menjadi semakin kompleks. Ditambah lagi dengan bergabungnya kembali Irian Barat ke panguan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi Djuanda walaupun tidak dibicarakan dalam Konferensi Internasional di Jenewa pada 1960, namun Soekarno meminta agar Deklarasi Djuanda disempurnakan dan dijadikan Undang-Undang Nomor 4/PRP. Undang-undang ini berisi tentang wilayah perairan Indonesia dan memberikan wawasan lebih lanjut dalam konsep Wawasan Nusantara.

Dengan kembalinya Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi, melalui keputusan presiden nomor 103 tahun 1963, untuk pertama kalinya ditetapkan Lingkaran maritim di seluruh kawasan Indonesia yang diberlakukan dengan hukum Indonesia. Dengan demikian tidak ada lagi celah-celah laut yang merupakan perairan bebas bagi perkapalan internasional.

Pada Maret 1966 terjadi perubahan pucuk pimpinan pemerintahan di Indonesia. Kekuasaan pemerintahan berpindah dari Soekarno kepada Soeharto. Melalui pembicaraan khusus Adam Malik dan Menteri Luar negeri Abdul Rahman pada 28 Mei 1966 diadakanlah konferensi di Bangkok yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sengketa. Hasil konferensi ini adalah kesepakatan bersama untuk mengakhiri konflik dalam perjanjian tingkat Menteri Luar Negeri pada 11 Agustus 1966.

Sejalan dengan pembentukan kerjasama negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), maka permasalahan perbatasan ini menjadi semakin efektif dibicarakan. Soeharto memerintahkan kepada Adam Malik untuk berunding dengan pihak Malaysia. Pembicaraan dengan Malaysia ditekankan pada Batas Landas Kontinen di Selat Malaka dan di Laut Cina Selatan. Dalam kesepakatan itu ditetapkan dengan mencapai titik tengah antara garis batas terluar pada saat air laut surut di masing-masing pantai. Kesepakatan itu ditandatangani pada 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur. Kemudian dilanjutkan lagi dengan penetapan Batas Landas Kontinen di sepanjang Selat Malaka. Penetapan ini dilaksanakan di Jakarta pada 17 Maret 1970. Mengingat bahwa garis Batas Landas Kontinen ini juga mencakup wilayah Thailand, maka pada November 1971 di Bangkok ketiga pihak menyepakati kesepakatan bersama.

Berbeda dengan pendekatan Soekarno, pendekatan Soeharto dilakukan dengan pendekatan ekonomi. Bertolak dari konsep ini, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden no. 41 tahun 1973 yang membentuk Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Lembaga ini juga dikenal sebagai Badan Otorita Batam. Pembangunan wilayah Batam ini bertujuan untuk

mengembangkan investasi di bidang industri.

Sebagai tindak lanjut dalam penyadaran akan Wawasan Nusantara, Soeharto mengeluarkan UU nomor 1 tahun 1973 yang berisi tentang Landas Kontinen Indonesia. Landas Kontinen ini mendasarkan pengukuran dari garis pantai sampai jarak tertentu di tengah perairan terluar dari wilayah Kepulauan Indonesia.

Setelah hampir 10 tahun melakukan pembicaraan dalam konferensi Hukum Laut PBB di Montego Bay pada 1982, Wawasan Nusantara diterima sebagai bagian integral dari Konvensi Hukum Laut PBB. Pada 30 April 1982, Sidang Umum PBB menggelar voting tentang Konvensi Hukum Laut. Berdasarkan hasil voting tersebut mayoritas negara di dunia menyetujui masuknya Wawasan Nusantara sebagai bagian dari Konvensi Hukum Laut yang kemudian disebut sebagai United Nations of the Law of the Sea (UNCLOS). Hal ini menjadi titik tolak pembentukan Badan Otorita Dasar Laut Internasional di Jamaika yang meneliti tentang keberatan-keberatan yang masih ada di antara negara anggota termasuk keberatan pihak AS.

Permasalahan lain yang muncul setelah munculnya UNCLOS adalah pulau-pulau kecil yang berada di garis luar batas wilayah lautan. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan munculnya permasalahan Sipadan dan Ligitan yang akhirnya dibawa ke ranah Mahkamah Internasional, yang dimenangkan oleh pihak Malaysia.

Penutup

Terlepas dari permasalahan yang ada di dalam negeri, permasalahan batas wilayah negara tetap harus menjadi perhatian kita semua. Sejak kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, sebenarnya permasalahan batas wilayah sudah muncul. Dengan kemerdekaan Malaysia dan Singapura permasalahan

perbatasan menjadi bertambah rumit, karena melibatkan banyak negara.

Deklarasi Djuanda yang secara tegas menentukan batas terluar Indonesia mempersempit celah atau kantong-kantong yang dapat dimanfaatkan oleh kapal-kapal milik bangsa lain, yang dapat mengakibatkan ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika Orde Lama lebih mengutamakan pendekatan politik dan militer untuk menyelesaikan masalah perbatasan, bahkan cenderung melakukan agresi dan intervensi dengan politik konfrontasinya, Orde baru menggunakan cara yang berbeda, yaitu lebih bersikap diplomatis. Strategi yang ditempuh oleh Orde Baru melakukan pendekatan defensif aktif yaitu tidak menunjukkan sikap agresif akan tetapi aktif dalam mencari jalan keluar. Persamaan di antara keduanya adalah melibatkan dunia internasional untuk menegaskan apa yang telah menjadi keputusannya.

Untuk saat ini, hal yang perlu dilakukan adalah mencatat dengan baik secara benar pulau-pulau terluar, memberi nama pulau-pulau itu, walaupun kemungkinan tidak ada penghuninya. Kemudian mencoba memagarinya dengan batas-batas penginderaan jarak jauh, sehingga tidak ada lagi pihak asing yang berpura-pura tidak tahu kalau sudah melanggar wilayah perbatasan negara kita. Penjagaan terhadap pulau-pulau terluar yang ada saat ini dengan menempatkan pos-pos TNI di pulau terluar akan memberikan reaksi yang cepat bila terjadi pelanggaran wilayah negara kita baik di darat, laut, maupun di udara. Penjagaan wilayah NKRI bukan hanya tanggung jawab militer, namun tanggung jawab kita semua melalui bidang keilmuan kita masing-masing.

Martino

ARSIP VERSUS HOAKS

Hoaks telah menjelma sebagai gelombang ancaman bagi kesatuan. Produksi kebohongan, isu dan fitnah dijadikan komoditas untuk mempertentangkan perbedaan, serta memantik konflik di masyarakat. Memanfaatkan celah ingatan bangsa serta kemerosotan budaya literasi, serangan hoaks membuat kegaduhan yang menguras energi. Pemerintah pun sempat kepayahan melakukan pembuktian atas tuduhan serta klarifikasi informasi yang menyesatkan dimasyarakat.

Ditengah hujan informasi dalam kecepatan teknologi, kecenderungan masyarakat menjadi karakter yang mudah mengamini informasi yang salah. Hal ini terbentur oleh kemalasan melakukan uji periksa kebenaran informasi serta semakin pendeknya ingatan masyarakat terhadap sejarah bangsa. Kini masyarakat seperti tumbuh tanpa identitas. Pemahaman tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara cenderung subjektif berdasar keyakinan pribadi yang menyampingkan bukti otentik. Padahal sebagai entitas Indonesia, kita memiliki ingatan kolektif sebagai sumber pengetahuan perjalanan bangsa yang terangkum dalam arsip.

Jebakan Hoaks

Menyitir ungkapan novelis asal Ceko, Milan Kundera, kunci kehancuran sebuah bangsa dan peradaban adalah dengan menghancurkan sumber pengetahuannya termasuk buku dan khazanah arsip. Praktik penghancuran arsip pernah dicontohkan dengan fasih oleh rezim fasis Hitler. Melalui peristiwa 'Bibliocaust' 1933, Nazi menghancurkan koleksi buku, arsip, manuskrip dan koleksi museum

secara masif di Jerman serta beberapa negara jajahannya, Belanda, Belgia, Austria, dan Ceko. Hal ini dilakukan untuk menghapus memori kolektif masyarakat demi melanggengkan hegemoni kekuasaan.

Jika Bibliocaust menggunakan pendekatan penghancuran objek kebendaan sumber pengetahuan oleh penguasa sebagai kendali atas masyarakat, fenomena sebaliknya terjadi di Indonesia. Tanpa paksaan, perilaku masyarakat saat ini justru secara sadar menjauh dan meninggalkan sumber memori kolektif berupa arsip dan catatan sejarah. Budaya dan pola pikir masyarakat telah termodifikasi oleh penggunaan teknologi dan media sosial. Hasilnya lahir era 'post truth', dimana masyarakat mengalami amnesia sejarah dan pembentukan pengetahuan hanya didasarkan pada keyakinan pribadi dan emosi dibanding mempelajari fakta otentik yang ada.

Amnesia terhadap memori kolektif dimanfaatkan kelompok penyebar hoaks menciptakan rekayasa informasi dan pesan kebencian untuk menggiring opini publik. Hal ini dijadikan komoditas penyesatan pemahaman sehingga

masyarakat mudah dipengaruhi dan diperalat untuk kepentingan tertentu. Inilah yang dilakukan oleh kelompok seperti Saracen beberapa waktu lalu. Bahkan kesesatan informasi tersebut digunakan bukan hanya untuk menciptakan keresahan, tetapi juga mengadu domba, menciptakan konflik serta menyerang negara dan pemerintah.

Salah satu wujud ekstrimnya, hasutan rekayasa informasi diarahkan untuk memperdebatkan kembali relevansi semboyan kebhinekaan serta kebenaran Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hal ini terbaca sebagai upaya kelompok tertentu mendorong perubahan dasar dan bentuk negara melalui penyesatan opini publik. Padahal jika pemahaman masyarakat utuh terhadap sejarah proses perumusan Pancasila, mulai pembentukan BPUPKI, rangkaian sidang hingga lahirnya Pancasila dan UUD 1945. Niscaya tidak ada perdebatan terhadap dasar negara yang telah final mengakomodir berbagai pandangan dan kepentingan seluruh golongan masyarakat Indonesia.

Ditengah perdebatan ideologi bangsa, dihembuskan pula isu kebangkitan komunisme yang identik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tuduhan ini diarahkan pada pemerintah yang dinilai melakukan pembiaran. Padahal sikap negara tegas berpegang pada Tap MPRS No. 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran

PKI dan larangan penyebaran paham komunis/marxisme-leninisme. Artinya tidak ada tempat di negeri ini bagi tumbuhnya benih komunisme dalam segala bentuknya. Tapi penebar hoaks berusaha menciptakan kegaduhan dengan tuduhan tak masuk akal. Isu PKI dengan mudah digunakan sebagai penghasut aksi represif untuk membubarkan kegiatan-kegiatan literasi seperti diskusi buku Tan Malaka di Universitas Airlangga dan seminar sejarah 1965 di YLBHI Jakarta.

Kontra Strategi

Kemunculan hoaks menciptakan antitesis dengan menghadirkan bukti palsu yang melemahkan negara. Pada hakikatnya pemerintah telah memiliki manifestasi bukti kebenaran informasi dalam arsip yang menanti dimanfaatkan. Hal ini berdasar pada bahwa hakikatnya setiap entitas penyelenggara pemerintahan merupakan pencipta arsip yang berkewajiban mengelola arsip dari aktivitasnya.

Maka melalui pengelolaan secara benar, arsip berpeluang menjadi khasanah pembandingan sekaligus kontra strategi penangkal hoaks untuk membuktikan kebenaran informasi. Atas setiap rekayasa informasi yang menyerang pemerintah dapat dilakukan konfrontasi informasi. Untuk itu arsip dapat difungsikan pada upaya penanggulangan maupun pencegahan sebelum hoaks menyerang.

Atas peluang itu, anggapan arsip sebagai residu administrasi yang berserak tanpa nilai guna, harus segera ditanggalkan. Pemanfaatan arsip tidak bisa mengandalkan cara konservatif, tersimpan dan pasif. Tetapi harus lebih aktif diolah dan dikelola menjadi bahan informasi publik sebagai khasanah pengetahuan. Di era informasi, ruang kreatif perlu dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran kebenaran berbasis arsip.

Menghadapi serangan hoaks, rasionalitas kita harus dibangun berdasarkan fakta empiris, bukti kebenaran dan memori kolektif yang tak boleh dikesampingkan. Atas setiap informasi yang diterima patut dilakukan uji keaslian, kebenaran

dan keterpercayaan. Tiga kriteria itu dimiliki oleh arsip. Maka untuk mampu mewujudkan arsip sebagai memori sekaligus sumber literasi terpercaya, mutlak membutuhkan pembangunan tata kelola arsip berkelanjutan.

Membayangkan pengelolaan arsip pada tataran ideal, melawan hoaks dan rekayasa informasi akan selangkah lebih mudah. Informasi arsip akan menjelaskan hitam putih dinamika penyelenggaraan negara dalam mencapai cita-cita nasional. Kehadiran informasi otentik tersebut tidak hanya menjadi senjata menggugurkan hoaks. Tetapi juga memulihkan kepercayaan publik serta mempertegas transparansi dan akuntabilitas negara.

Rekonstruksi Ingatan

Kerentanan masyarakat terhadap informasi mengindikasikan pudarnya memori kolektif bangsa. Kita melupakan ingatan, pengalaman, mentalitas sebagai sebuah bangsa yang telah melalui berbagai peristiwa perjalanan berbangsa sehingga terlampaui mudah terhasut. Padahal ingatan itu berfungsi merefleksikan masa lalu, untuk menjadi dasar masa kini dan pijakan harapan masa depan yang lebih baik. Misalnya, ingatan kolektif tentang konflik di masa lalu akan menjadi sumber daya untuk melawan pola yang sama untuk kembali berulang. Oleh sebab itu ingatan kolektif selain mempengaruhi karakter dan perilaku masyarakat, juga menentukan masa depan bangsa.

Kegagalan menjaga dan mewariskan arsip sebagai ingatan kolektif disertai perubahan ekstrem yang terjadi dalam perilaku literasi masyarakat menjadi penyebab krisis ingatan yang terjadi hari ini. Harus diakui arsip saat ini cenderung dilupakan. Sebagai sumber informasi, arsip belum mendapat tempat sebagaimana yang dipersepsikan oleh Foucault dan Derrida, yakni sebagai konstruksi utama dalam membangun pengetahuan, ingatan, keadilan dan ketahanan di masyarakat. Celah ini berpotensi terus dimanfaatkan hoaks untuk menciptakan diskursus dengan menghadirkan bukti-bukti palsu untuk bersifat melemahkan negara.

Seperti halnya sejarah, memori berakar dalam arsip. Tanpa arsip, ingatan bangsa terputus, pengetahuan tentang prestasi memudar, kebanggaan pada masyarakat ikut menghilang. Ingatan selalu dibangun berdasarkan narasi informasi. Ada beragam informasi pada arsip yang merekam berbagai perjalanan bangsa. Namun semua itu baru memiliki arti jika ada narasi yang merangkainya menjadi penjelasan yang mudah diterima masyarakat. Proses merangkai narasi dengan berpijak pada data objektif untuk kemudian disebarluaskan itulah yang dimaknai sebagai rekonstruksi. Maka untuk melakukan rekonstruksi ingatan dibutuhkan literasi berbasis arsip untuk membuktikan dan menjelaskan apa yang telah terjadi secara benar dan masuk akal.

Sangat berbahaya jika ingatan kolektif yang dominan di masyarakat dipenuhi oleh informasi bersifat subjektif bahkan bertentangan dengan kebenaran. Oleh sebab itu arsip sebagai dasar pemahaman sejarah, berfungsi sebagai ingatan memvalidasi pengalaman, persepsi dan narasi kita tentang kondisi bangsa. Narasi arsip sebagai sumber memori kolektif harus mampu menjadi khazanah pembandingan sekaligus kontra strategi penangkal hoaks. Narasi tersebut akan bertarung melawan rekayasa informasi untuk mengklarifikasi opini publik dan menjadi ingatan yang mampu menjelaskan sejarah dengan benar.

Belum terlambat untuk memulihkan opini publik sekaligus membangun pengetahuan dan ketahanan intelektual masyarakat dengan sumber yang benar. Upaya menarasikan informasi arsip sebagai sumber ingatan kolektif diharap mampu menyudahi krisis ingatan. Hal itu akan menjadi sumberdaya rekonsiliasi sosial untuk menyembuhkan pertentangan dalam masyarakat yang dipicu oleh hoaks. Dalam jangka panjang, hal ini dibutuhkan sebagai manifestasi warisan ingatan bagi generasi mendatang agar tidak kembali terjerumus dalam jebakan yang sama.

Dharwis W.U. Yacob

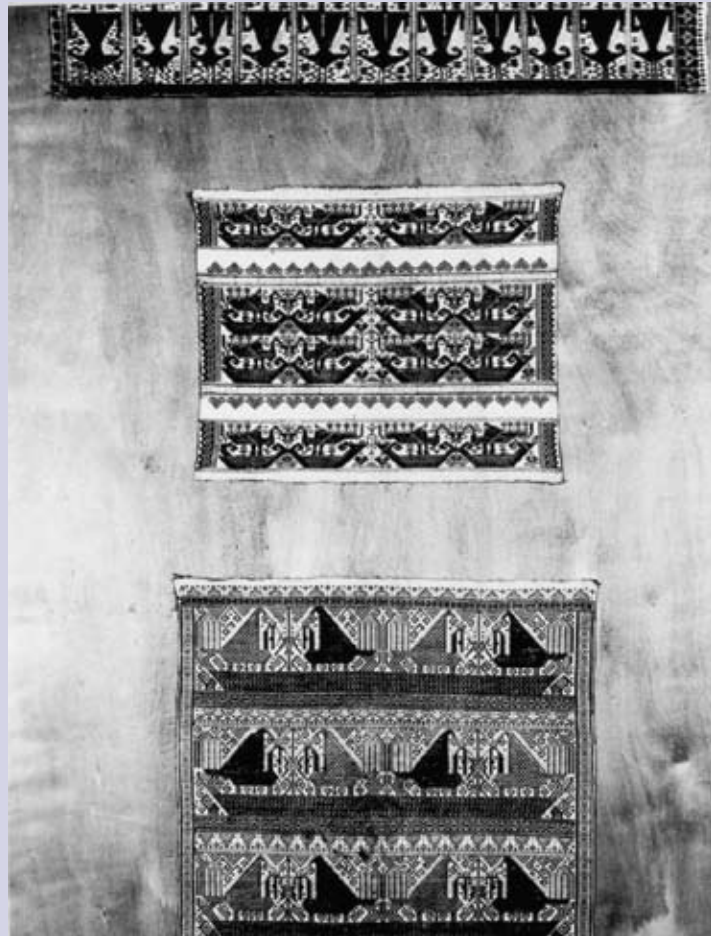
MENGENAL KAIN TENUN INDONESIA MELALUI ARSIP

Selain memiliki budaya yang beragam, Indonesia juga kaya akan nilai-nilai tradisi yang tertuang dalam berbagai hasil kerajinan dan tersebar diseluruh Nusantara. Salah satu diantaranya yaitu berupa kain tenun tradisional yang dapat ditemukan diseluruh pelosok Indonesia. Secara garis besar kain tenun yang diciptakan dalam berbagai macam warna, corak dan ragam hias memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sistem pengetahuan, budaya, kepercayaan, lingkungan, alam, dan sistem organisasi sosial masyarakat. Tidak salah kalau kain tenun yang terdapat pada masing-masing daerah di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dan menjadi bagian penting yang merepresentasikan budaya dan nilai sosial yang berkembang di lingkungan tersebut. Salah satu contoh kain tenun ciri khas Indonesia adalah kain tenun tapis Lampung yang merupakan kain tenun yang terbuat dari benang kapas yang memiliki motif benang perak atau benang emas dengan sistem sulam seperti dalam arsip foto ANRI dalam khazanah arsip KIT (*Koninklijk Instituut voor de Tropen*) Wilayah Sumsel, Riau, Jambi Nomor 0729/11 dengan motif tapis laut linau yang merupakan kain tenun untuk kerabat istri yang jauh pada saat pernikahan atau para gadis pengiring pengantin dan juga motif yang dipakai untuk menari tarian Cangget yang merupakan tarian penyambutan tamu.

Keberadaan kain tenun tradisional Indonesia diperkirakan telah berkembang sejak masa Neolitikum. Hal ini diperkuat dengan temuan benda-benda prasejarah yang berusia lebih dari 3.000 tahun. Bekas-bekas

peninggalan berupa cap tenunan, alat untuk memintal, dan bahan tenunan kain dari kapas tersebut ditemukan pada situs Gilimanuk, Melolo, Sumba Timur, Gunung Wingko, dan Yogyakarta. Pada masa Neolitikum, bahan untuk membuat pakaian masih sangat sederhana, seperti serat, daun-daunan, kulit kayu, kulit binatang, serta akar tumbuh-tumbuhan. Pembuatan pakaian dari kulit kayu harus memilih

jenis pohon keras dan mempunyai serat kayu yang panjang, selanjutnya pohon tersebut dikuliti, kemudian serat kayu direndam air agar lunak. Kemudian digunakan alat pemukul berupa batu untuk membentuk kulit kayu menjadi kain. Sisa tradisi pembuatan kain semacam ini masih ditemukan di daerah Sulawesi Tengah yang disebut Fuya dan di Papua disebut Capo.



Kain Tenun Tapis dari Krui, Lampung, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Wilayah Sumsel, Riau, Jambi Nomor 0729/11.

Pembuatan kain tenun menggunakan prinsip yang sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Kain tenun biasanya terbuat dari serat kayu, kapas, sutra, dan lainnya. Pembuatan kain tenun ini umum dilakukan di Indonesia, terutama di daerah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Biasanya produksi kain tenun dibuat dalam skala rumah tangga. Beberapa daerah yang terkenal dengan produksi kain tenunnya adalah Sumatera Barat, Palembang, dan Jawa Barat.

Kain tenun berkaitan erat dengan sistem pengetahuan, budaya, kepercayaan, lingkungan alam, dan sistem organisasi sosial dalam masyarakat. Karena kultur sosial dalam masyarakat beragam, maka kain tenun pada masing-masing daerah memiliki perbedaan. Oleh sebab itu, kain tenun dalam masyarakat selalu bersifat partikular atau memiliki ciri khas, dan merupakan bagian dari representasi budaya masyarakat tersebut. Kualitas tenunan biasanya dilihat dari mutu bahan, keindahan tata warna, motif, dan hiasannya.

Definisi kain tenun adalah kain yang dibuat dengan cara menenun. Proses menenun dapat dilihat di dalam arsip foto ANRI dalam khazanah arsip KIT Sulawesi Nomor 723/19. Pengertian tenun sendiri adalah kegiatan menenun kain dari helai benang pakan dan benang lungsi yang sebelumnya diikat dan di celup ke dalam zat pewarna alami. Kain tenun Indonesia banyak dipengaruhi kain tenun dari Eropa, Cina, Persia, dan India. Kain tenun yang digunakan sebagai pakaian sehari-hari di hiasi corak yang lebih sederhana di bandingkan dengan kain-kain khusus untuk upacara sekitar lingkaran kehidupan. Upacara-upacara ini misalnya upacara kelahiran, potong rambut, pemberian nama anak yang baru lahir, inisiasi anak meningkat remaja seperti potong gigi dan khitanan, perkawinan, penobatan kepala adat, serta kematian. Contoh kain tenun Aceh yang dipakai pada upacara perkawinan seperti dalam



Seorang ibu sedang menenun kain di Mandar, Sulawesi Barat, [1930]
Sumber: ANRI, KIT Sulawesi Nomor 723/19

arsip foto ANRI dalam khazanah arsip KIT Wilayah Aceh Nomor 728/58.

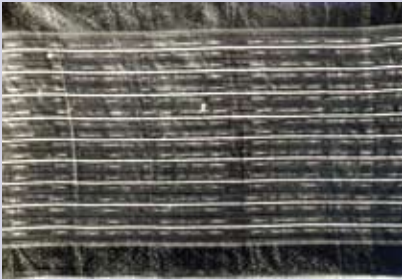
Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kain tenun di peroleh dari alam. Di beberapa daerah di utara Indonesia, antara lain di kepulauan Sangir dan Talaud, menggunakan serat untuk menghasilkan benang. Penduduk Pulau Tanimbar, Pulau Rote, dan daerah Toraja, menggunakan serat dari daun lontar sebagai benang tenun. Tradisi masyarakat Tanimbar, pakaian yang di tenun dari serat lontar digunakan sebagai pakaian sehari-hari, sedangkan pakaian yang di tenun dari serat kapas digunakan sebagai pakaian upacara adat. Contoh kain tenun Tanimbar seperti dalam arsip foto ANRI dalam khazanah arsip KIT Wilayah NTB NTT Nomor 0738/046 dan Nomor 0728/034.

Kain tenun sangat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Saat ini, kain tenun sangat di sukai oleh para wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Kain tenun sekarang banyak menggunakan motif-motif modern. Banyak kaum kelas atas yang menggunakan kain tenun untuk acara-acara resmi.

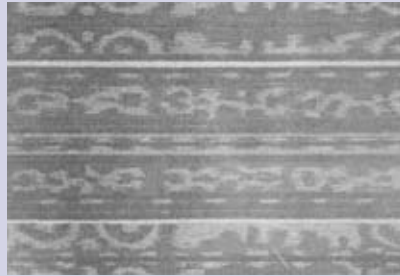
Teknik pembuatan tenun dapat

dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu teknik dalam membuat kain dan teknik membuat hiasan. Selain itu, ada dua hal lagi yang sangat penting dalam pembuatan tenun, yaitu mempersiapkan pembuatan benang dan pembuatan zat warna. Pembuatan benang secara tradisional dengan menggunakan pemberat yang diputar dengan jari tangan, pemberat tersebut berbentuk seperti gasing terbuat dari kayu atau terakota. Di Indonesia bagian barat (Sumatera, Jawa, Bali, Lombok) ada cara lain membuat benang dengan menggunakan antih, alat ini terdiri dari sebuah roda lebar yang bisa diputar berikuk pengaitnya untuk memutar roda tersebut. Bahan membuat benang selain kapas, kulit kayu, serat pisang, serat nanas, daun palem, dsb seperti dalam arsip foto ANRI dalam khazanah arsip KIT Wilayah Maluku Nomor 0302/026. Pembuatan zat warna pada masa lalu terdiri dari dua warna biru dan merah. Warna biru didapatkan dari indigo atau Mirinda citrifonela atau mengkudu. Selain itu ada pewarna dari tumbuhan lain seperti kesumba.

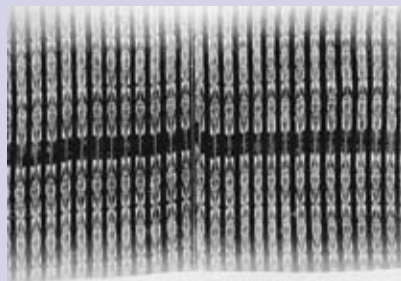
Dengan perkembangannya zaman, untuk efektifitas waktu dan efisiensi tenaga, maka menenun dapat pula



Kain tenun Aceh, [1930]
 Sumber: ANRI, KIT Wilayah Aceh Nomor
 728/58



Tenun ikat terbuat dari anyaman daun
 lontar, Pulau Tanimbar, Maluku, [1930].
 Sumber: ANRI, KIT Wilayah NTB NTT
 Nomor 0738/046



Motif sarung tenun ikat dari Tordate, Pulau
 Tanimbar, Maluku [1930].
 Sumber: ANRI, KIT NTB NTT Nomor
 0728/034.

dibuat dengan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Dengan ATBM, seseorang bisa menghasilkan kain tenun lebih cepat dengan ukuran yang jauh lebih lebar, sesuai dengan jangkauan lebar atau besarnya ukuran ATBM itu sendiri (hingga 2 meter tanpa ada jahitan sambung dengan tenunan lain). ATBM ini berbentuk seperti meja dengan bilah-bilah kayu yang terbentang baik secara melintang maupun membujur. Berbeda dengan gedog yang dilakukan dengan posisi duduk selanjor, maka penenun ATBM bekerja sambil duduk di atas kursi. Karena besarnya alat ini, sehingga biasanya satu atau beberapa ATBM diletakkan di satu ruangan khusus karena tidak memungkinkan untuk dapat dengan mudah dibawa kemana-mana. ATBM ini dapat dengan mudah dijumpai di dataran Jawa, utamanya daerah penghasil tenunan seperti Desa Troso di Jepara, Jawa Tengah, ataupun di Cirebon, Jawa Barat.

Secara umum, sejauh pengamatan dan informasi yang kami dapatkan

selama ini, pengkategorian kain tenun di Indonesia dapat terbagi ke dalam 4 jenis berikut ini:

Pertama, Tenun Datar (Regular Handwoven) dengan menggunakan teknik tenun dasar (polos), tanpa ada penambahan teknik atau material lain. Contoh penerapannya pada kain Indonesia adalah

a. Lurik: Motif garis-garis lurus atau kotak-kotak kecil (jika dilihat dari dekat) dari Jawa Tengah dan Yogyakarta.

b. Poleng: motif kotak-kotak seperti papan catur yang berasal dari Bali. Contohnya dapat dilihat dalam arsip foto ANRI dalam khazanah arsip KIT Bali Nomor 364/38.

c. Sarung Lippa: motif kotak-kotak atau garis-garis khas Bugis.

d. Tenun Katun Silungkang: motif garis-garis dengan ciri khas kombinasi antara benang katun dengan benang berwarna mengkilap. Termasuk tenun pengembangan

modern dari Silungkang, salah satu daerah penghasil songket di Sumatera Barat.

Kedua, Tenun Ikat (Ikat Handwoven). Teknik tenunan dengan melewati tahapan ikat-celup (untuk mewarnai benang) sebelum benang-benang tersebut mulai ditunen. Motifnya terbentuk sesuai dengan peletakan ikatannya sebelum dicelupkan pada cairan warna.

a. Tenun Ikat Lungsin: Jika letak benang yang diikat-celup merupakan benang yang membentang secara vertikal. Contoh: Ulos Sibolang dari Sumatra Utara.

b. Tenun Ikat Pakan: Jika letak benang yang diikat-celup merupakan benang yang terlintang secara horisontal. Contoh: Porisitutu dari Toraja, Sulawesi Selatan.

c. Tenun Ikat Ganda: Jika letak benang yang diikat-celup merupakan kedua sisi benang, Baik yang terbentang secara vertikal maupun horisontal. Contoh: Geringsing khas Tenganan, Bali. Contohnya dapat dilihat dalam arsip foto ANRI dalam khazanah arsip KIT Bali Nomor 712/31.

Ketiga, Tenun Sungkit (*Supplementary Wrap Handwoven*). Teknik dengan memakai benang atau serat tertentu yang "disungkit" (ditambahkan) pada rentangan benang dasar yang telah ada.

a. Songket: Biasanya penamaan ini hanya digunakan untuk yang merujuk pada penambahan benang emas atau perak. Biasanya ditemukan pada daerah dengan pengaruh Islam yang sudah kental, oleh karenanya tidak menggunakan motif hewan atau figur leluhur (seperti tenun ikat). Ia menggunakan motif geometris, atau bentuk stilasi dari tumbuh-tumbuhan. Beberapa contoh yang populer: Songket Minang (Pandai Sikek atau Silungkang), Songket Palembang, Songket Lombok (yang populer: Songket Subahna), Bima, dan lain sebagainya. Namun ada pula

daerah non Islam yang juga membuat kain dengan penambahan benang emas, misalnya Bali. Contohnya dapat dilihat dalam arsip foto ANRI dalam khazanah arsip Kempen (Kementerian Penerangan) Sumatera Barat Tahun 1955-1965 Nomor 515373.

b. Tenun Baduy: Kain tenun yang dibuat oleh masyarakat Baduy Luar, dengan motif kotak-kotak warna-warni dengan penambahan benang katun sehingga menghasilkan tenunan dengan tesktur kotak-kotak tipis-tebal yang khas.

c. Tenun Renda: Seperti songket, namun menggunakan benang katun khas Bima, NTB. Biasanya berwarna latar hitam atau merah dengan motif khas berwarna-warni merah, kuning dan hijau. Contohnya dapat dilihat dalam arsip foto ANRI dalam khazanah arsip Kempen Wilayah NTT Tahun 1950-1963 Nomor 541026 NN 2.

d. Pahikung: Seperti songket, namun biasanya menggunakan kapas dan serat dari akar-akaran yang diolah secara tradisional, khas masyarakat Sumba Timur. Kain yang biasanya dibuat satu set sarung wanita dan selendangnya. Menggunakan motif figur stilasi dari hewan, misalnya kuda, singa, serangga, hingga ikan-ikan.

e. Sotis: Seperti songket, namun biasanya full menggunakan serat kapas yang dipintal manual ataupun yang sudah berupa benang katun. Memiliki ciri khas penampakan visual positif-negatif yang begitu kental antara sisi atas dengan sisi bawah kainnya. Maksudnya: Pada sisi atas kain X, terlihat bahwa latarnya merah, motifnya kuning. Namun pada sisi bawah kain X, akan tampak bahwa latarnya menjadi kuning, sedangkan motifnya berwarna merah). Teknik ini mudah dijumpai di Timor, NTT, dengan penamaan yang beraneka ragam, sesuai dengan nama daerah asalnya. Contoh: Sotis Soe, Sotis Kefa, Sotis Boti dan lain sebagainya.

f. Buna: Teknik menenun dengan penambahan benang yang



Penggulungan benang untuk persiapan menenun kain, Maluku, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Wilayah Maluku Nomor 0302/026.



Pengrajin tenun dan hasil tenunannya di Klungkung, Bali, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Bali Nomor. 364/38.

disulam bolak-balik (atas-bawah) di atas tenunannya. Jika dilihat, kita akan mudah terkecoh karena ia tampak seperti bordir mesin, melihat dari hasil pekerjaannya yang begitu rapi dan rapat. Buna merupakan teknik membuat kain tenun kebanggaan khas orang Timor (NTT). Disana, setiap daerah memiliki motif khas, yang dinamakan sesuai dengan nama daerah asalnya. Seperti Buna Soe, Buna Molo, Buna Nungkolo, Buna Ayotupas, Buna Bokon, Buna Krawang, hingga Buna Arae yang sudah terancam kepunahannya.

Keempat, Tenun Khusus (*Special Handwoven*). Teknik yang tidak dikategorikan ke dalam Tenun Datar, Tenun Ikat maupun Tenun Sungkit. Biasanya ia memiliki teknik tersendiri yang khas, sehingga jenis tenunan ini begitu melekat pada satu daerah.

a. Rang-Rang yaitu teknik menenun berpola "loncat-loncat" pada beberapa bagian, sehingga menghasilkan kain yang terlihat jarang-jarang. Jika diperhatikan, maka akan terlihat ada beberapa lubang-lubang kecil yang pada akhirnya menghasilkan motifnya tersendiri. Maka dari itu, ia dinamakan sebagai "Rang-Rang", alias "jarang-jarang". Tenunan yang biasanya bermotif zig-zag ini merupakan khas Nusa Penida, Bali. Namun kini juga diproduksi di Lombok, serta sudah mudah ditemui replikanya berupa Tenun Ikat dari Jepara, Jawa Tengah. Bahkan kini, motif khas zigzag-nya tersebut sudah mudah ditemui dalam bentuk batik yang diproduksi di Cirebon, Jawa Barat.

b. Ulap Doyo merupakan tekstil tradisional khas orang Dayak. Biasanya, teknik yang digunakan merupakan kombinasi antara tenun datar (pada motif garis-garis pinggirnya) dan tenun ikat (yang dilakukan pada motif di tengah-tengah

KHAZANAH

kain yang menggunakan serat daun "doyo", yang konon hanya tumbuh di dataran Kalimantan).

c. Tapis merupakan tekstil tradisional kebanggaan masyarakat Lampung. Biasanya dibuat satu set antara sarung dan selendangnya. Kain tenun ini dibuat dengan cara menenun serat kapas secara manual-tradisional (menggunakan alat tenun gedog), lalu disulam tangan dengan benang emas bermotifkan flora dan fauna. Namun pengembangannya kini, sudah banyak yang ditununya dengan benang katun, menggunakan ATBM (alat tenun bukan mesin), kemudian dibordir dengan mesin bordir. Contohnya dapat dilihat dalam arsip foto ANRI dalam khazanah arsip KIT Wilayah Sumsel Riau Jambi Nomor 1094/013.

d. Ulos Sadum merupakan tenun tradisional kebanggaan masyarakat Batak yang mudah diidentifikasi dari warna latarnya yang umumnya hitam, dengan motif warna-warni di atasnya bertaburan manik-manik (yang umumnya) berwarna putih. Setelah ditilik lebih dalam, maka akan tampaklah betapa tingginya ilmu menenun mereka yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman dahulu kala. Cara pembuatannya merupakan kombinasi dari beberapa teknik, misalnya sungkit (seperti sotis Timor), sulam manik (namun ada pula yang manik-maniknya dimasukkan ke dalam benang pakannya bersamaan saat menenun, bukan pada saat tenunan sudah selesai dibuat sebagaimana sulaman pada umumnya), hingga tapestri di beberapa bagian.

e. Batik Gedog Tuban: merupakan tekstil tradisional masyarakat Tuban. Batik jenis ini berbeda dari batik jenis lain, karena pada saat batik biasanya dilakukan di atas kain pabrikan, maka batik gedog ini selalu diaplikasikan pada kain tenun yang diproses secara tradisional, menggunakan Alat Tenun Gedog.

Meski corak yang ditampilkan

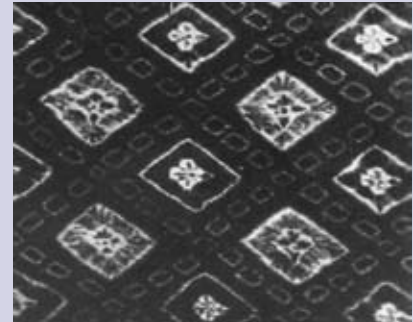


Kain Tenun Songket, Padang 10 Juli 1951.
Sumber ANRI, Kempen Sumatera Barat 1955-1965 Nomor 515373.



Kain tenun renda,
Sumbawa, 26 Oktober 1954.
Sumber: ANRI, Kempen Wilayah NTT Tahun 1950-1963 Nomor 541026 NN 2

dan teknik pembuatan kain tenun pada tiap-tiap daerah berbeda-beda namun secara keseluruhan kain tenun dapat difungsikan sebagai alat transaksi (barter), mahar dalam perkawinan, serta bahan pakaian sehari-hari maupun busana dalam pertunjukan tari dan upacara adat. Hal ini membuktikan keanekaragaman budaya Indonesia yang begitu banyak terutama mengenai kain tenun yang telah digunakan berabad-abad yang lalu. Kain tenun Indonesia menjadi sebuah ciri khas Indonesia yang memiliki falsafah Bhinneka Tunggal Ika yaitu meskipun berbeda-beda tapi tetan satu, Negara Kesatuan Rerpublik Indonesia. Beranekaragamnya kain tenun di Indonesia menunjukkan betapa tingginya budaya Indonesia. Tentunya hal tersebut harus dipertahankan terus menerus dari generasi dan generasi.



Kerajinan tenun ikat pelangi Bali dengan dua warna, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Bali Nomor 712/31.



Pemakaian kain Tapis Lampung, [1930].
Sumber: ANRI, KIT Wilayah Sumsel Riau Jambi Nomor 1094/013.

Arsip juga memiliki peran dalam menunjukkan keberagaman kain tenun Indonesia dengan menyimpan bentuk-bentuk atau motif ataupun corak kain tenun yang bisa diteruskan ke generasi berikutnya sehingga generasi berikutnya masih mengingat betapa besarnya budaya kain tenun Indonesia. Dengan mempertahankan kain tenun Indonesia semakin kita mampu mengetahui identitas Indonesia di dunia internasional. Indonesia akan selalu dikenal dengan negara yang memiliki ragam kain tenun yang begitu banyak sehingga Indonesia menjadi sebuah negara dengan begitu banyak kebudayaan sehingga Indonesia menjadi negara yang disegani di dunia internasional.

Widhi Setyo Putro

PEMBEBASAN IRIAN BARAT: UPAYA PEWUJUDAN KEDAULATAN POLITIK DAN EKONOMI

“...Kami di Indonesia masih mempunyai suatu masalah kolonial, karena seperlima dari wilayah republik kamu masih diduduki dan dikuasai oleh kolonis-kolonis Belanda... Irian Barat merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Republik Indonesia dan kami menuntut agar kekuasaan republik ditegakkan di daerah tu dengan segera”.

Kutipan pidato Presiden Sukarno di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-Negara Non Blok I di Beograd tanggal 1 September 1961 tersebut mempertegas keinginan Pemerintah Indonesia untuk berdaulat secara penuh di Irian Barat. Masalah Irian Barat muncul sejak tahun 1949 ketika Konferensi Meja Bundar (KMB). Hasil konferensi tersebut tidak menyertakan Irian Barat dalam kesepakatan wilayah kedaulatan yang diserahkan oleh Belanda. Presiden Sukarno mengibaratkan masalah Irian Barat sebagai duri yang menusuk dalam dan harus segera dicabut. Namun, usaha untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda tidaklah mudah. Pemerintah Indonesia harus menggunakan beberapa cara antara lain diplomasi politik, konfrontasi politik, ekonomi dan militer sebelum akhirnya Irian Barat berhasil direbut.



Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta sedang memberikan kata sambutan pada acara pembukaan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, 23 Agustus 1949
Sumber: Inventaris Arsip Foto IPPHOS 1945 – 1950 (No. 1357)

Diplomasi Politik

KMB yang berlangsung pada 23 Agustus - 2 November 1949 menyisakan satu persoalan terkait status Irian Barat. Persoalan tersebut muncul ketika delegasi Belanda menginginkan Irian Barat mendapatkan status khusus, karena dianggap tidak mempunyai hubungan dengan wilayah Indonesia lainnya. Sementara delegasi Indonesia berpendapat bahwa Irian Barat adalah bagian dari Indonesia Timur yang termasuk dalam wilayah

Republik Indonesia Serikat (RIS) dan selama ini telah terjalin hubungan etnologis, ekonomi, dan agama (Bone, 1952:57). Untuk menghindari kegagalan KMB, disepakati bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan dengan perundingan oleh Kerajaan Belanda dan RIS dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949.

Pasca penyerahan kedaulatan, dilakukan langkah awal untuk menyelesaikan masalah Irian Barat

yaitu melalui jalur diplomasi politik. Salahsatu bentuknya yaitu perundingan bilateral dengan Belanda dalam bentuk Konferensi Menteri-Menteri Uni Indonesia-Belanda. Konferensi ini berlangsung pada Maret 1950 di Jakarta dan 4 Desember 1950 di Den Haag. Hasilnya adalah kesepakatan untuk membentuk Komisi Gabungan yang bertugas untuk mengumpulkan fakta tentang Irian Barat. Akan tetapi, hasil komisi tersebut selalu mempunyai tafsiran berbeda tentang hak atas Irian Barat sehingga perundingan menemui jalan buntu. (Djamhari, 1995: 8)

Kegagalan perundingan dengan Belanda membuat Indonesia menggunakan upaya lain dalam bidang diplomasi politik. Diantaranya dengan mencari dukungan dalam forum internasional seperti Konferensi Asia-Afrika (KAA), Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (KTT GNB). Melalui KAA, Indonesia berhasil memperoleh dukungan dengan memasukan masalah Irian Barat ke dalam komunikasi akhir KAA. Sementara perjuangan melalui PBB dilakukan pada Sidang Umum PBB ke IX tahun 1954 hingga Sidang Umum PBB ke XII tahun 1957. Akan tetapi setiap resolusi yang diusulkan oleh Indonesia selalu mengalami kegagalan.

Konfrontasi Politik dan Ekonomi

Setelah perjuangan diplomasi politik tidak berhasil, Pemerintah Indonesia kemudian memutuskan untuk menempuh jalan konfrontasi politik dan ekonomi. Bentuk dari konfrontasi politik yaitu pemutusan hubungan Uni Indonesia-Belanda pada 15 Februari 1956, pembatalan persetujuan KMB pada 2 Maret 1956



Rapat Trikora, Rapat Trikora dengan isi: Gagalcan pembentukan negara boneka di Papua buatan Belanda, Kibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat, Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan tanah air dan bangsa, Desember 1961.

Sumber: Kempen Wilayah Jawa Tengah 1950-1965, Nomor 637

(lihat UU Nomor 13 Tahun 1956) dan membentuk Provinsi Otonomi Irian Barat pada 16 Agustus 1956 (lihat UU Nomor 15 Tahun 1956).

Sementara itu, bentuk dari konfrontasi ekonomi antara lain melakukan pemogokan dan menasionalisasi perusahaan milik Belanda seperti maskapai penerbangan, maskapai pelayaran, bank, pabrik gula, dan perusahaan gas (lihat UU Nomor 86 Tahun 1958). Konfrontasi politik dan ekonomi mencapai puncaknya pada 17 Agustus 1960 ketika Pemerintah Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Kerajaan Belanda (Cholil, 1971: 15-23).

Konfrontasi Militer

"Kami telah berusaha untuk menyelesaikan Irian Barat dengan penuh kesabaran dan penuh toleransi.. kami telah berusaha menggunakan alat-alat PBB...harapan lenyap,

kesabaran hilang dan toleransi pun mencapai batasnya. Semuanya itu kini telah habis dan Belanda tidak memberikan alternative lainnya, kecuali memperkeras sikap kami". Hal ini sebagaimana tertuang dalam arsip Pidato Presiden Sukarno di Sidang Umum PBB ke-15 di New York pada 30 September 1960, yang dapat dilihat di ANRI pada Inventaris Arsip KOTI, No. 80)

Perjuangan melalui konfrontasi politik dan ekonomi ternyata tetap tidak mengubah sikap Belanda atas Irian Barat. Belanda bahkan semakin berani dengan mengirim kapal induk Karel Doorman ke Irian Barat, membentuk Komite Nasional Papua dan Negara Papua. Oleh karena itu, seperti kutipan pidato di atas, pemerintah Indonesia mulai bersikap keras yaitu menggunakan upaya konfrontasi militer. Upaya ini diawali dengan misi militer oleh Menteri Luar Negeri Subandrio ke Uni Soviet untuk menjalin kerja sama pembelian senjata pada Januari 1961.



Pidato pejabat pemerintah saat penyerahan pemerintah UNTEA kepada RI. Tampak bendera PBB dan merah putih berkibar di Kotabaru.
Sumber: Kempen Wilayah Irian Barat 1957-1964 (No. 63-5134)

Upaya konfrontasi militer semakin meningkat ketika dibentuk Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat (KOTI Pemirbar) pada 14 Desember 1961 dengan Presiden Sukarno sebagai panglima besarnya. KOTI Pemirbar selanjutnya merumuskan Tri Komando Rakyat (Trikorra) yang diumumkan pada 19 Desember 1961 oleh Presiden Sukarno. Isi lengkap Trikorra yaitu: 1) Gagalakan pembentukan Negara Boneka papua buatan Belanda kolonialis; 2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia; dan 3) Bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa (Lihat ANRI, Daftar Arsip Pidato Presiden RI 1958-1967, Nomor 926).

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Trikorra dibentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada 2 Januari 1962 dengan Brigadir Jenderal Suharto sebagai Panglima Mandala. Selanjutnya Panglima Mandala menyelenggarakan operasi militer

dengan tujuan mengembalikan wilayah Irian Barat. Operasi militer tersebut rencananya dilakukan dalam 3 fase yaitu infiltrasi (penyusupan pasukan), eksploitasi (serangan terbuka), dan konsolidasi (menegakkan kekuasaan secara penuh di seluruh Irian Barat).

Penyelesaian Damai

Sebelum ketiga fase operasi militer diselesaikan, terjadi insiden di Laut Aru yang menewaskan Komodor Yos Sudarso beserta awak kapalnya pada 15 Januari 1962. Hal ini menyebabkan ketegangan Indonesia dan Belanda semakin memuncak. Menanggapi situasi tersebut, Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy menunjuk Jaksa Agung Robert F. Kennedy untuk mengadakan perundingan. Kemudian atas prakarsa seorang diplomat Amerika Serikat, Ellsworth Bunker diusulkan sebuah penyelesaian damai yang disebut Rencana Bunker. Tindak lanjut dari Rencana Bunker adalah pelaksanaan Persetujuan New York pada 15 Agustus 1962. Persetujuan

ini memerintahkan Belanda untuk menyerahkan pemerintahan di Irian Barat kepada *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) pada 1 Oktober 1962, dan selanjutnya UNTEA harus menyerahkan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963 dengan ketentuan Indonesia harus mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) sebelum akhir 1969 (Abdullah, 2012: 425-427).

Kedaulatan Bidang Politik dan Ekonomi

Dengan ditandatangani Per-setujuan New York, maka berakhirilah kekuasaan Belanda di Irian Barat dan sejak 1 Mei 1963 kekuasaan atas Irian Barat sepenuhnya diserahkan kepada Republik Indonesia. Keberhasilan merebut Irian Barat merupakan salah satu pengejawantahan konsep Trisakti dari Presiden Sukarno. Trisakti yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara sosial budaya. Dalam konteks kemandirian politik, Pemerintah Indonesia telah berhasil mempertahankan persatuan dengan berdaulat secara penuh di Irian Barat.

Sementara dalam konteks kemandirian ekonomi, langkah konfrontasi ekonomi dengan cara nasionalisasi membuat dominasi ekonomi bangsa Barat berkurang. Karena sebelumnya sektor-sektor ekonomi utama di Indonesia masih dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan asing khususnya Belanda. Dengan beralihnya perusahaan-perusahaan asing menjadi milik negara maka kedaulatan ekonomi dapat terwujud.

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, HILMAR FARID

MEMAKNAI NILAI-NILAI KEINDONESIAAN

Kelndonesiaan merupakan suatu perjalanan yang sangat dinamis dan sudah melalui berbagai tahapan, yang awalnya menjadikannya kenyataan politik, menjadikannya kenyataan hukum, dan sekarang sedang bergulat untuk meneguhkan Indonesia ini sebagai kenyataan kultural. Tim Majalah ARSIP berkesempatan mewawancarai Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid untuk menggali sejauh mana makna dan nilai kelndonesiaan di tengah-tengah derasnya arus globalisasi di negeri ini.

Menurut Bapak, seperti apa makna dari Kelndonesiaan itu?

Indonesia bertolak dari sebuah gagasan dari perjuangan melawan ketidakadilan kolonialisme itu, sehingga diperoleh sebuah rumusan. Jadi Kelndonesiaan itu muncul di dalam kancah perdebatan itu. Awalnya tentu berupa gagasan, sampai kemudian gagasan ini menguat kemudian menjadi kenyataan politik dengan adanya gerakan kemerdekaan nasional, terus kemudian menjadi kenyataan hukum, ketika Indonesia merdeka menjadi republik dengan segala perangkatnya. Dan sekarang kita berjuang agar Indonesia juga menjadi kenyataan kultural. Jadi ada kenyataan politik, kenyataan hukum, dan kenyataan kultural. Kenyataan kultural ini

adanya di dalam diri masing-masing orang dan juga kolektif sehingga lebih berat untuk mencapainya. Jadi buat saya, Kelndonesiaan itu adalah satu perjalanan yang sangat dinamis dan kita sudah melalui tahap-tahap awalnya menjadikannya kenyataan politik, menjadikannya kenyataan hukum, dan sekarang sedang bergulat untuk meneguhkan, Indonesia ini sebagai kenyataan kultural.

Kenyataan kultural merupakan bagian dari aspek sosial-budaya, secara konkret seperti apa kenyataan kultural yang sedang diperjuangkan sebagai bagian dari melestarikan Kelndonesiaan?

Konkretnya adalah masyarakat Indonesia yang ada sekarang ini. Itu

terlihat dari komitmen masing-masing unsur di dalam masyarakat terhadap Kelndonesiaan. Dan ini tentu tidak statis, sangat dinamis, kadang orang sangat mengasosiasikan dirinya dengan Indonesia, simbol-simbol kebangsaan, dan tapi kadang-kadang surut juga. Itulah saya kira dinamika yang perlu terus kita ikuti, istilahnya orang bilang merawat kebangsaan. Karena kalau dibiarkan ada kemungkinan rasa kebangsaan melemah, menurun, kemudian tidak peduli lagi. Dan sudah menjadi tugas kita sebagai penyelenggara negara untuk memastikan bahwa ini tidak padam.

Di Era Millennial ini, bagaimana tantangan terbesar yang dihadapi oleh makna dan nilai Kelndonesiaan di tengah maraknya penggunaan media sosial dan ancaman toleransi keberagaman?

Saya tentu bicara dari sisi kebudayaan. Saya kira memang betul, teknologi digital sekarang ini mengubah cara orang berkomunikasi dan berelasi satu sama lain secara drastis. Teknologi

digital tidak serta merta memfasilitasi hubungan sesama manusia tetapi juga mengubah hubungan itu secara kualitatif. Sekarang ini, orang lebih suka berkomunikasi via telepon genggam daripada berbicara secara langsung kepada orang yang ada di sebelahnya. Dan juga soal kecepatan informasi, pergeseran informasi sekarang rasanya cepat sekali ya.

Dulu kita harus akan berita, sekarang kita kewalahan memfilter memikirkan mana yang penting, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk. Itu saya kira pengaruhnya sangat besar. Sementara nilai Kelndonesiaan itu dalam sejarahnya dibentuk dari komunikasi yang intens. Orang bertemu, berkongres, kongres pemuda misalnya, menerbitkan surat kabar, membaca, membuat risalah-rialah, banyak menulis, kalau kita lihat perjalanan Indonesia dari tahun 1920an-1960an. Disitulah nilai-nilai itu sangat solid. Karena komitmen orang, pemikiran juga, semua energi intelektualnya dikerahkan untuk memikirkan Indonesia lebih baik itu bagaimana.

Dengan media seperti sekarang, perhatian tentunya terpecah. Dan ada kecenderungan orang menjadi kosmopolitan, merasa menjadi warga dunia. Dan yang ada di hadapannya dia itulah yg disodorkan oleh media-media dari seluruh dunia itu. Sehingga pikiran tentang Kelndonesiaan itu jauh rasanya. Itu tantangan besar. Kenapa? karena simbol-simbol (Kelndonesiaan) yang dulu bisa memobilisasi perhatian dan sentimen orang, sekarang kehilangan pesona. Bendera, lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional, sudah sulit untuk mengharap orang akan termobilisasi hanya dari simbol-simbol itu. Itu tantangan paling besar.

Jadi sekarang kita berhadapan dengan suatu keadaan yang begitu cair. Kita berada di tengah-tengah kancah itu dan terus berusaha menegakkan. Jadi memang tantangan terbesarnya kenyataan yang berubah. Tapi dari sisi kita (pemerintah), berarti kita pun juga harus mengubah cara pikir kita. Tidak bisa pakai cara-cara lama mengharap hasil yang sama seperti dulu. Tantangan terbesarnya adalah pada diri kita sendiri (pemerintah), kemampuan untuk

“...kita secara aktif harus menginterogasi masa lalu itu, tradisi itu, dan melihatnya dari perspektif kekinian...”

mengubah cara kita mengembangkan nilai-nilai kebangsaan di dalam periode sekarang. Itu tantangan terbesarnya.

Bagaimana pandangan Bapak Dirjen mengenai kedudukan sejarah lokal dan kearifan lokal dalam konsep Kelndonesiaan?

Dalam perjalanannya, munculnya ide Kelndonesiaan itu sendiri, ketika Bung Karno merumuskan Pancasila. Beliau beberapa kali mengatakan saya ini tidak menemukan, tetapi saya ini menggali dari pengalaman konkret orang-orang Indonesia ketika berusaha memperjuangkan dirinya menjadi merdeka dan saya kira itu memperlihatkan bahwa bangunan Indonesia modern sekarang ini sebetulnya tiang-tiang pendukungnya itu tetapi kearifan-kearifan lokal itu. Walaupun tidak diekspresikan secara khusus, bahwa ada Sunda, ada Jawa, dan lain sebagainya. Bukan itu, tetapi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat kita. Tentunya, fakta sejarah itu sendiri kemudian membuat kita memang tidak mungkin mengabaikannya begitu saja. Dan itu khas sekali di dalam masyarakat bekas jajahan.

Kecenderungan untuk, khususnya kalangan intelektual (pada masa itu) untuk berbeda dengan generasi sebelumnya, cara berbicara, bahasa yang digunakan, pemikirannya juga berbeda dari generasi sebelumnya. Tapi yang sesuatu yang “baru” itu, juga belum berhasil dirumuskan, sehingga kemudian (mendorong) suatu situasi limbung pada tahun 1930an yang disebut polemik kebudayaan.

Menurut Ki Hadjar Dewantara, Purbacaraka, Sanusi Pane, dst, pijakan harus pada tradisi. Sutan Takdir Alisabana mengatakan bangsa Indonesia harus modern sehingga kita ini tidak ada hubungannya dengan Sriwijaya dan Majapahit. Berdebat mereka. Tetapi (esensinya) bukan perbedaan pendapatnya, tapi paling penting adalah kesadaran penuh, bahwa kita tidak mungkin meninggalkan sejarah. Karena itu semacam pemberi arah bagi kita. Tapi pada saat bersamaan kita juga tidak mungkin tertahan di dalam tradisi itu. Kita harus menjadi modern. Saya suka merumuskannya begini, generasi sebelumnya dalam kaitannya dengan kearifan lokal itu pada dasarnya mengatakan Indonesia harus menjadi negeri yang modern dengan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri inilah tradisi berperan.

Tentu mengambil yang terbaik dari tradisi, mengambil hal-hal yang baik dari tradisi sebagai pijakannya untuk berjalan. Masalahnya sejarah lokal kita memperlihatkan bahwa tradisi yang sering dibicarakan juga tidak sederhana. Ada banyak problem didalamnya, ada pertentangan, ada konflik. Kita tahu bahwa ada sebagian dari tradisi juga hidup di dalam masyarakat yang sangat timpang. Si penguasanya itu seolah mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Nah, tentu, dengan nilai yang muncul dari masyarakat seperti ini, sulit kita bayangkan untuk bisa berperan baik di masa sekarang. Karena akarnya yang juga tidak adil.

Jadi saya kira disamping kita punya keyakinan dan kesadaran bahwa haruslah berpijak apa yang kita punya, haruslah berpijak pada tradisi sejarah dan seterusnya. Pada saat bersamaan juga harus kritis terhadap sejarah dan tradisi yang dia miliki. Jadi bukan sesuatu yang bisa kita pinjam dari masa lalu untuk diterapkan di masa sekarang. Tapi kita secara aktif harus menginterogasi masa lalu itu, tradisi itu, dan melihatnya dari perspektif kekinian.

Sekarang kita perlu apa. Karena sebetulnya nilai-nilai dari masa lalu ini kan memberikan antara lain yang disebut landasan etis. Landasan etis ini sederhananya begini. Satu norma,

nilai, atau perangkat nilai yang tidak lagi didiskusikan. Ya tidak ada diskusi mengapa, logis atau tidak, sosiologis atau tidak ada urusan, ya sudah diterima sebagai norma yang baik untuk dipegang. Jadi seperti itulah yang saya kira bisa kita petik dari sejarah. Jadi sekali lagi, soal sejarah dan segala macam, kita harus berani.

Justru sebaliknya bukan menghindari perdebatan tentang itu, tetapi justru harus berani, masuk melihat dan kemudian menarik nilainya. Terkait Arung Palaka dengan VOC, jangan lupa bahwa Bone, berada di bawah kekuasaan Makassar waktu itu. Dan hubungan itu juga tidak berjalan dengan baik. Ini yang saya kira, peristiwa sejarah seperti ini yang perlu kita pelajari dan maknai secara lebih kritis dan kemudian mencari rumusan-rumusan yang memang tepat untuk hari ini.

Bagaimana dengan kondisi saat ini, dimana kita harus mempertahankan kearifan lokal itu sendiri di tengah globalisasi?

Ruang untuk kembali membangkitkan tradisi dan segala macam itu sekarang gemanya justru didunia global itu menguat.

Sekarang orang melihat secara jelas keterbatasan dari rezim global yang modern seperti finansial dan ekonomi yang krisis, permasalahan sosial, permasalahan politik, dan perang di beberapa wilayah yang berpengaruh secara global. Ini waktunya kita untuk mulai berpikir ulang. Dan semboyan kita untuk kembali ke tradisi, yang dulu mungkin orang berlomba-lomba untuk menjadi modern, sekarang justru dengan adanya jelas keterbatasan dari prinsip global yang modern ini menjadi bermakna kembali dan resonansi gemanya itu di dunia itu besar.

Indonesia dapat menawarkan solusi. Masyarakat kita penuh dengan modal sosial dan modal kultural. Nah, tentu (mempertahankan dan mengembangkan) ini tidak mudah karena tantangan di dalam juga begitu banyak. Khususnya yang terkait terhadap keragaman dan ancaman terhadap toleransi.

Bagaimana dengan keikutsertaan Indonesia dalam

Program UNESCO untuk melestarikan warisan budaya dunia dan memori kolektif dunia?

Penting sekali. Itu merupakan kontribusi Indonesia terhadap dunia. Konferensi Asia Afrika misalnya, di tengah perkembangan internasional di masa itu yang sangat didominasi oleh Barat, Bung Karno dan negara-negara dari Asia dan Afrika bersepakat untuk merumuskan konsep modern dengan caranya sendiri. Arsip Konferensi Asia Afrika adalah kontribusi yang luar biasa penting di tingkat internasional dan saya kira gemanya itu sampai sekarang masih terasa.

Dikaitkan dengan kondisi kebangsaan dan kenegaraan Indonesia saat ini, apakah konsep 4 (empat) pilar kebangsaan sudah merepresentasikan makna Kelndonesiaan?

Permasalahannya menurut saya bukan pada penetapan pilarnya, setelah ditetapkan, apa yang harus dilakukan? Buat saya, pertanyaan yang lebih penting misalnya soal NKRI, secara kritis mungkin kita dapat bertanya, sebenarnya kita dipersatukan oleh apa. Kebijakan Bapak Presiden Jokowi sekarang ini, langkahnya memperlihatkan bahwa persatuan secara pemikiran harus difasilitasi oleh persatuan yang lebih material secara fisik.

Oleh karena itu dikembangkan infrastruktur "Tol Laut", infrastruktur bandara, dan penerbangan ke pulau-pulau kecil. Jadi NKRI itu bukan lagi sekedar pilar yang menjadi wacana, tetapi betul-betul diwujudkan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, apabila (makna) konstitusi kita pegang betul-betul di dalam setiap perumusan hukum undang-undang, mungkin tidak akan terjadi silang-sengkarut seperti sekarang. Anak-anak harusnya mendalami arti Bhineka Tunggal Ika, harus diajarkan Bhineka Tunggal Ika dalam praktek, tanpa harus menghafal macam-macam, sehingga anak-anak bisa merasakan bahwa persatuan di dalam kebhinekaan ternyata sangat luar biasa kuat.

Bagaimana kedudukan makna Kelndonesia pada Era Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini dimana

masalah kebudayaan adalah salah satu bagian Program Pembangunan Nasional yang sedang dijalankan?

Persoalan NKRI bagi Bapak Presiden Jokowi itu tidak sekedar konsep, tetapi harus betul-betul konkrit, sehingga nantinya keempat pilar itu memang jadi terasa secara fisik. Konsep Pak Jokowi kenegaraan hadir dalam bentuk layanan-layanan yang sudah diperkuat, untuk di bidang pendidikan, ada Kartu Indonesia Pintar, kemudian juga ada Kartu Indonesia Sehat (di bidang kesehatan). Itu merupakan wujud untuk menegakan NKRI. Di bidang pendidikan, kita punya program penguatan pendidikan karakter. Pak Menteri mengatakan bahwa secara akademis, kepandaian matematika, fisika, dan lainnya, kita bisa berkompetisi, yang sulit dikejar itu adalah penguatan karakter, karena Indonesia seringkali tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Menumbuhkan itu di dalam dunia pendidikan juga tidak mudah, tantangannya banyak. Upaya Pak Jokowi, salah satunya melalui Revolusi Mental di berbagai bidang yang sedang berjalan.

Bagaimana peran dari Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Menengah, khususnya Direktorat Kebudayaan dalam membangun karakter bangsa yang menanamkan nilai kelndonesiaan?

Di bidang kebudayaan ada dua hal penting yang sedang diupayakan, pertama, mendokumentasikan semua ekspresi lokal yang ada sekarang secara sistematis. Kedua, menyediakan sistem akses informasi yang mudah untuk masyarakat terhadap kebudayaan yang sudah didokumentasikan tersebut. Selain itu kita juga mencoba peningkatan kualitas sarana prasarana yang sudah ada, seperti museum dan taman budaya. Untuk para pelaku budaya, kita juga sekarang membawa seniman-seniman baru, kontemporer, anak-anak muda kreatif ke arah cagar budaya. Pak Menteri sudah mengarahkan optimalisasi cagar budaya, museum, taman budaya untuk menjadi sumber informasi dan pembelajaran serta mendukung program penguatan pendidikan karakter.

Apakah ada strategi khusus

untuk menghadapi generasi milenial?

Untuk generasi milenial, memang harus menggunakan cara yang berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Generasi milenial perlu diberikan ruang untuk berinteraksi dengan berbagai macam hal yang dapat dilakukan di sekolah, seperti mengajak anak-anak membuat dokumentasi video (mengenai topik pelajaran) dan dari sana kita diskusi sekaligus belajar memahami generasi milenial. Konsep belajar bersama ternyata yang menarik buat mereka bahwa untuk menemukan sisi yang tidak kita lihat (sebagai) pengajar, misalnya dari kisah kepahlawanan. General knowledge seperti yang dulu ditanamkan kepada anak-anak generasi terdahulu, pada dasarnya sudah tidak perlu ditekankan secara kaku lagi karena akses informasi dalam berbagai media sudah terbuka lebar. Generasi milenial perlu dikembangkan sesuai dengan minatnya terhadap suatu hal.

Bagaimana dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya 3 Stanza yang sedang digalang oleh Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Menengah, apakah itu dapat memaknai kembali nilai KelIndonesiaan?

Ini memang inisiatif dari Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Menengah. Pak Menteri sudah buat surat edaran bahwa sekolah-sekolah pada setiap upacara bendera menggunakan Indonesia Raya 3 Stanza. Pertama, alasan historis, lagu itu memang sejatinya tiga stanza. Jadi ketika dinyanyikan satu stanza terdapat alasan yang bersifat praktis untuk kepentingan teknis upacara. Nah, tapi alasan-alasan praktis ini jangan sampai kemudian menjadi alasan untuk menghapus esensi sejarah. Kedua, alasan yang lebih untuk masa kini adalah lirik di stanza kedua dan ketiga itu luar biasa powerful. Kalau di stanza pertama, kita berseru Indonesia bersatu, pada stanza kedua kita berdoa untuk Indonesia bahagia, dan pada stanza ketiga kita berjanji Indonesia abadi, itu menjadi satu call to action. Itu merupakan soal komitmen yang komplisit dan lengkap. Jadi sebagai lagu itu memang mesti



Arsip mengenai Lagu Indonesia Raya ciptaan WR Supratman (Sumber: Arsip M. Bondan dan Sekkab PP 44 Lagu Indonesia Raya, diambil dari Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa, ANRI)

dilihat sebagai persatuan dan untuk Indonesia saat ini sangat sesuai. Kalau anak Indonesia menghafal saja tiga stanza ini, mengerti isinya dan mengerti sejarahnya lagu ini, sebagian pekerjaan kita selesai.

Bagaimana mengenai peran ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional dalam mendukung kebudayaan dan memaknai ke Indonesiaan?

Saya kira, sekarang ANRI semakin sentral perannya sesuai dengan slogannya Arsip sebagai Simpul Pemersatu Bangsa, artinya sekarang ini pekerjaan kita adalah menata Indonesia dan dalam upayanya menjadikan lebih baik hari selalu dalam perbandingan dari (masa ke masa), jadi kita melihat apa yang sudah dilakukan dan apa yang masih harus dilakukan. Nah, arsip ini kan deposit pengetahuan dan pengalaman bangsa kita baik untuk tujuan-tujuan yang besar maupun yang lebih praktis. ANRI dapat juga berperan untuk menerbitkan buku risalah tentang arsip-arsip pada saat konsepsi NKRI sedang dirumuskan secara lengkap, sehingga semua perdebatan sekarang yang terlihat dapat diselesaikan. Kalau misalnya kita nanti kerjasama dalam

skala besar, bisa juga diterapkan ke seluruh anggota MPR dan DPR. Semua anggota itu mesti pegang risalah tersebut, jadi semua pendapat tentang hal-hal yang sifatnya mendasar, tinggal berdasar pada risalah tersebut.

Jadi kita bernegara ini memang ada pijakannya, jangan semua orang datang menjadi pejabat, selalu membuat hal-hal yang dirasakan pembaharuan. Peran aktif lainnya adalah menginterfensi pemahaman sejarah melalui pameran, seminar, dsb. Arsip ini punya kelebihan menghadirkan fakta-fakta yang relevan bagi pembentukan wacana publik yang sedang aktual. Nah, kalau ini bisa diangkat, informasi, pengalaman-pengalaman masa lampau bisa disodorkan, perencanaan pembangunan juga lebih historis. Jadi bukan sekedar ide-ide segar, tetapi juga harus mempertimbangkan kebijakan historisnya apa. Nah, mungkin dari segi itu, harapan saya ANRI bisa lebih aktif melihat lagi peran yang mungkin dapat dimainkan seperti dalam pembentukan kebijakan publik yang mempertimbangkan aspek historis. (AM)

EDHI SUNARSO

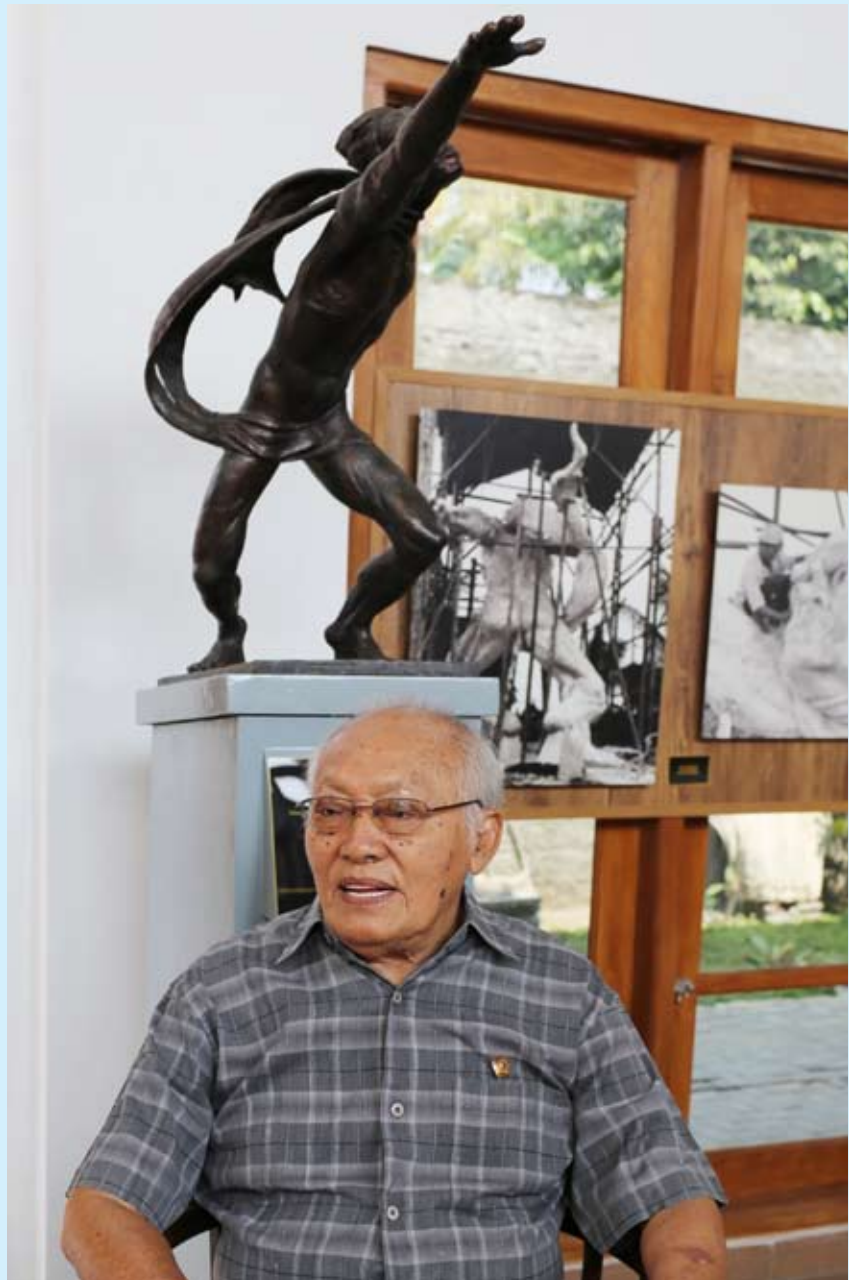
SOSOK SENIMAN PEJUANG

Sebagai masyarakat Jakarta kita tentunya tidak asing lagi dengan monumen berupa patung-patung yang megah dan menjadi *landmark* ibu kota, sebut saja Patung Selamat Datang di depan Hotel Indonesia, Patung Pembebasan Irian Barat di Lapangan Banteng, dan Patung Dirgantara di perempatan Pancoran. Namun sedikit dari kita yang tahu siapa tokoh yang membuat patung-patung tersebut.

Oleh karena itu, Tim Pewawancara Sejarah Lisan ANRI yang terdiri atas Toto Widyarsono, Langgeng Sulisty Budi, dan Y.N. Danang Saputra melakukan wawancara terhadap Bapak Edhi Sunarso sebagai tokoh seniman patung (pematung) yang karyanya telah disebut di atas. Kegiatan wawancara dilaksanakan di Griya Seni Hj. Kustiyah Edhi Sunarso di Jalan Cempaka No. 72 Sendanghadi, Sleman Yogyakarta pada tanggal 25 September 2015.

Masa Muda Masa Berjuang

Masa anak-anak Edhi Sunarso dilalui dengan penuh keprihatinan. Ia telah terpisah dari orang tua kandungnya sejak usia tujuh bulan dan dibawa oleh orang tua angkatnya ke Jakarta. Ia hanya mengetahui dari orang tua angkatnya kalau lahir di Salatiga pada hari Selasa Wage tahun 1932, tanpa diketahui tanggal dan bulannya. Ketika bersekolah di HIS Kemayoran tahun 1939 terjadi musibah kebakaran besar yang disebabkan oleh jatuhnya pesawat di daerah perkampungan. Saat itu ia sedang bersekolah dan sejak peristiwa itu ia tidak pernah lagi bertemu dengan orang tua angkatnya. Ia kemudian



Edhi Sunarso

dibawa oleh salah seorang gurunya dan disekolahkan di daerah Pegaden Baru, Subang.

Setelah dwi tunggal Soekarno-

Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia maka muncul kesadaran dari para pemuda untuk menjaga kemerdekaan Indonesia dari gangguan pihak asing. Sama seperti

anak-anak seusianya, Edhi Sunarso juga turut bergabung dengan para pemuda pejuang di sekitar Subang. Edhi Sunarso mulai berjuang pada usia 13 tahun dengan menjadi kurir surat dan peluru, kemudian meningkat menjadi komandan tim sabotase. Tim tersebut bertugas mengganggu konvoi pasukan Belanda yang melintas di daerah Subang, Kalijati, dan Pamanukan.

Sampai suatu saat ia tertangkap oleh pasukan Belanda di daerah Pegaden Baru. Saat itu ia baru berusia 14 tahun. Meski masih belia, Belanda menganggap Edhi Sunarso pejuang yang berbahaya oleh karena itu ia ditahan secara berpindah-pindah dari Subang, Cibinong, Pamanukan, Purwakarta, Bandung, dan sempat dibawa ke Nusakambangan. Namun karena usianya masih belia ia dikembalikan ke penjara Bandung. Selama berada di tahanan Edhi Sunarso belajar melukis dan bahasa Inggris.

Berkat jasa Persatuan Ibu-Ibu Rantai Emas Negara Pasundan, Edhi Sunarso mendapat pembebasan. Saat itu usianya menginjak 17 tahun, dengan uang saku 3 Gulden ia ingin pergi ke Yogyakarta menyusul induk pasukannya yang telah hijrah ke Yogyakarta. Perjalanan menuju Yogyakarta pun tidak mudah karena terhalang garis demarkasi yang dikenal dengan Garis Van Mook.

Dalam perjalanan menuju Yogyakarta itu ia harus memutar melalui Semarang terus ke Salatiga, di sanalah ia ditangkap oleh pasukan Republik di bawah pimpinan *Overste* Slamet Riyadi. Ia kemudian bergabung dengan pasukan Slamet Riyadi di daerah perbatasan Salatiga-Boyolali. Selama tinggal di daerah itu ia bertemu orang yang wajahnya mirip dengannya, setelah diselidiki ternyata itu kakak kandungnya yang bernama Wiryono dan adiknya yang bernama Wiryawan. Edhi Sunarso

sendiri memiliki nama lahir Wiryanto. Ia kemudian dipertemukan dengan orang tua kandungnya, namun karena kendala komunikasi (pengkisah tidak bisa berbahasa Jawa) dan ikatan batin yang kurang, Edhi Sunarso memilih meninggalkan keluarga dan melanjutkan perjalanannya ke Yogyakarta.

Masa Berkarya sebagai Seniman

Setelah tiba di Yogyakarta ia segera mencari informasi mengenai keberadaan pasukannya, ternyata mereka telah *longmarch* kembali ke Jawa Barat. Pada saat itu kondisi kota Yogyakarta seperti *wild west* penuh dengan pemuda-pemuda yang pegang senjata dan bergaya seperti *cowboy*. Selain itu di setiap sudut kota, tembok-tembok bangunan dipenuhi lukisan-lukisan bertema perjuangan. Karena terbawa suasana Edhi Sunarso juga ikut-ikutan melukis di sebuah tembok, namun tiba-tiba ada pemuda yang mengajaknya berkenalan.

Ia adalah Hendra Gunawan seorang pelukis yang kebetulan sama-sama berasal dari Jawa Barat. Oleh Hendra Gunawan, Edhi Sunarso kemudian ditawarkan menjadi siswa luar biasa di Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI). Selain belajar di ASRI, Edhi Sunarso juga bergabung dengan sanggar Pelukis Rakyat yang dipimpin oleh Hendra Gunawan. Pada perkembangan selanjutnya sanggar Pelukis Rakyat terkontaminasi oleh seniman-seniman Lekra. Hal itu membuat Edhi Sunarso tidak nyaman dan memutuskan keluar dari sanggar Pelukis Rakyat.

Pada tahun 1953 Edhi Sunarso mengikuti lomba patung dunia di London yang mengangkat tema *The Unknown Political Prisoner Prisoner*. Ia menjadi satu-satunya pematung dari Asia yang mengikuti perlombaan itu. Edhi Sunarso membuat patung sosok tahanan dari Boven Digoel. Setelah melalui penilaian oleh dewan juri karya Edhi Sunarso diumumkan menduduki peringkat ke-27. Namun beberapa hari kemudian ia membaca tulisan dari Prof. Sardjito dari UGM yang menyatakan wakil dari Indonesia menempati peringkat kedua. Ternyata hasil penilaian dewan juri sebelumnya memperoleh protes karena dianggap tidak objektif, sehingga diadakan



Patung Pembebasan Irian Barat yang lokasinya berada di tengah-tengah Lapangan Banteng, Jakarta Pusat



Patung Dirgantara atau lebih dikenal dengan nama Patung Pancoran adalah salah satu monumen patung yang terdapat di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan

penilaian ulang dengan merahasiakan nama pematung dan negara asal. Setelah dinilai ulang karya Edhi Sunarso menduduki peringkat kedua. Sejak saat itu ia mantap meniti karir sebagai seorang pematung profesional.

Perkenalan Edhi Sunarso dengan Presiden Soekarno terjadi saat peresmian Tugu Muda di Semarang pada tahun 1953. Saat itu ia terlibat pembangunan tugu tersebut bersama Hendra Gunawan. Lima tahun kemudian ia diserahi tugas oleh Presiden Soekarno untuk membuat Patung Selamat Datang dalam rangka persiapan *Asian Games*. Tugu itu harus memiliki tinggi sembilan meter dan terbuat dari perunggu. Celakanya Edhi Sunarso tidak memiliki pengalaman membuat patung dari bahan perunggu.

Namun karena didesak oleh Presiden Soekarno maka tidak ada pilihan bagi Edhi Sunarso selain menerima tantangan tersebut. Tugas tersebut akhirnya dapat diselesaikan dengan baik, meski tingginya diubah menjadi tujuh meter.

Setelah sukses menyelesaikan pembangunan Patung Selamat

Datang, Edhi Sunarso kembali diberi tugas untuk membuat patung dari perunggu setinggi sembilan meter yang diberi nama Patung Pembebasan Irian Barat. Patung tersebut dijadikan penyemangat bangsa Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda dan menurut rencana akan ditempatkan di Lapangan Banteng.

Bersamaan dengan itu Edhi Sunarso juga diserahi tugas untuk membuat diorama di Monumen Nasional (Monas). Pembuatan Patung Pembebasan Irian Barat tidaklah sulit karena telah memiliki pengalaman membuat Patung Selamat Datang, namun membuat diorama adalah sesuatu hal yang baru. Bahkan Edhi Sunarso belum pernah melihat yang namanya diorama. Berbekal tulisan yang disusun oleh 18 orang sejarawan senior, Edhi Sunarso kemudian membuat diorama sejarah perjalanan bangsa Indonesia secara kronologis diawali masa prasejarah dan sebagai penutupnya adalah diorama yang menggambarkan bergabungnya Irian Barat ke dalam NKRI.

Namun belum selesai pengerjaan segmen terakhir diorama Monas, terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang menyebabkan terjadinya

peralihan kekuasaan. Penguasa Orde Baru kemudian mengisi bagian akhir dari diorama tersebut dengan peristiwa yang menggambarkan seputar penyerahan Surat Perintah 11 Maret 1966.

Pada masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, Edhi Sunarso diberi tugas untuk membuat Patung Dirgantara. Patung tersebut merupakan wujud apresiasi Presiden Soekarno terhadap para pahlawan kedirgantaraan Indonesia. Menurut rencana patung tersebut ditempatkan di perempatan Pancoran dan berdekatan dengan Markas Besar AURI (sekarang menjadi Wisma Aldiron).

Proses pengerjaan Patung Dirgantara mengalami kendala yang berkaitan dengan masalah pendanaan. Hal itu disebabkan karena Bung Karno sebagai sponsor utama telah kehilangan kekuasaannya. Kendala itu sempat disampaikan Edhi Sunarso kepada Bung Karno saat bertemu di Istana Bogor pada tahun 1970.

Guna mengatasi masalah tersebut Bung Karno memerintahkan stafnya untuk menjual mobil pribadinya dan hasilnya digunakan untuk penyelesaian Patung Dirgantara. Bung Karno sempat dua kali menyaksikan pemasangan Patung Dirgantara di Pancoran. Sayangnya Bung Karno telah meninggal dunia sebelum Patung Dirgantara selesai.

Meski telah ditinggalkan oleh sosok yang diidolakannya, Edhi Sunarso tetap berkarya sebagai pematung. Karya-karyanya yang lain adalah diorama di Monumen Pancasila Sakti, diorama di Museum Satria Mandala, Patung Ibu Tien Soeharto di Museum Purna Bakti Pertiwi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Edhi Sunarso tutup usia pada tanggal 4 Januari 2016, meskipun demikian karyanya akan tetap abadi.

(Oleh: Mudanto Pamungkas)

EVALUASI PENGAWASAN KEARSIPAN, MENPAN DAN RB TEGASKAN AKAN ADA SANKSI BAGI LEMBAGA KEARSIPAN

Arsip Nasional Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2017. Acara Rakor dilaksanakan di Hotel Grand Inna Bali (09/11). Acara Rakor bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas penyelenggaraan kearsipan di masing-masing K/L, Pemerintah Daerah, PTN, BUMN/BUMD. Dalam laporannya, Kepala ANRI menyampaikan bahwa pada Tahun 2017 ini ANRI telah melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap 29 Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 6 Perguruan Tinggi Negeri dan 4 Badan Usaha Milik Negara bidang Perbankan.

Selain itu melalui anggaran dekonsentrasi ANRI telah melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap 508 dari 514 Kabupaten/Kota. 6(enam) Kabupaten/kota yang tidak dilakukan pengawasan adalah 5 (lima) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi DKI dan 1(satu) Kabupaten Puncak Jaya di Provinsi Papua karena masih ada beberapa kendala.

“Tentunya hal Ini merupakan bukti dan komitmen kami sebagai lembaga pembina kearsipan nasional untuk senantiasa memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan. Dengan harapan agar agar bangsa ini mendapatkan potret penyelenggaraan kearsipan, yang tentunya akan terus



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2017 di Hotel Grand Inna Bali (09/11).

kita tingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu”, ungkap Mustari Irawan.

Lebih lanjut Mustari menambahkan bahwa dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan ANRI dibantu oleh Provinsi diperoleh data bahwa 1 LPNK saja atau 3,45 %, yang memperoleh penilaian “Sangat Baik”, dengan range nilai antara 91 s.d 100. Kemudian 2 LPNK atau 6,9 %, yang memperoleh penilaian “Baik”, dengan range nilai antara 76 s.d 90. Sementara 10 LPNK atau 34,48% memperoleh penilaian “Cukup” dengan range nilai dari 61 s.d 75, 4 LPNK atau 13,79% memperoleh penilaian “Kurang” dengan range nilai dari 51 s.d 60, 12 LPNK atau 41,38%

memperoleh penilaian “buruk” dengan range nilai 0 s.d 50.

Sementara itu untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota hasilnya yakni, 0% (nol persen) yang memperoleh predikat “Sangat Baik”. Sedangkan 1 % yang memperoleh predikat “baik”, 2% (dua persen) memperoleh predikat “Cukup”. Kemudian 4% (empat persen) memperoleh predikat “Kurang”. Sedangkan sebagian besar sebanyak 93% (sembilan puluh tiga persen) masih dalam kondisi “buruk”.

“Kondisi tersebut menegaskan bahwa bidang kearsipan masih menghadapi berbagai tantangan

DAERAH

dan kendala, sehingga hal ini harus menjadi perhatian kita bersama agar penyelenggaraan kearsipan dapat terus meningkat dari waktu ke waktu”, terangnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dalam sambutannya menyampaikan agar ANRI terus berupaya untuk bekerja lebih ekstra lagi untuk mewujudkan tertib arsip.

“Apa yang dilaksanakan ANRI pada hari ini adalah hal yang baik dan memang kita perlukan. ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional agar mengerahkan segala upaya dalam melakukan pengawasan kearsipan kepada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah”, ungkapnya.

Asman Abnur menambahkan bahwa ANRI harus memastikan bahwa kebijakan kearsipan selalu mutakhir, mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Selain itu, ANRI juga harus memastikan bahwa setiap instansi pemerintah dapat secara mandiri melakukan pengelolaan arsipnya. Setiap instansi pemerintah harus memiliki unit kearsipan yang didukung oleh arsiparis yang kompeten serta sarana dan prasarana kearsipan yang baik, terutama sarana penyimpanan arsip.

“Sekali lagi saya tekankan, penanganan arsip secara komprehensif dan terpadu akan mendukung kinerja organisasi secara optimal. Untuk mendukung optimalisasi pengelolaan kearsipan tersebut diperlukan baik perubahan *mindset* dan *culture-set* birokrasi, masyarakat, dan pengguna arsip di bidang kearsipan bahwa peran arsip memiliki porsi penting, karena sistem penyelenggaraan kearsipan yang baik akan mampu merespons tuntutan dinamika gerak maju masyarakat, bangsa, dan negara ke depan”, tuturnya.



Kepala ANRI Mustari Irawan

Asman Abnur menegaskan, kedepan akan ada sanksi bagi lembaga kearsipan ataupun instansi pemerintah yang memiliki kinerja buruk di bidang kearsipan akan berdampak pada tunjangan kinerja dan pengadaan formasi pegawai. “Bagi yang hasil evaluasi kearsipannya tidak baik, saya akan memberi sanksi tidak akan menambah formasi Pegawai Negerinya dulu, habis itu saya runding lagi sama Bu Menteri Keuangan, kalau perlu daerah atau lembaga atau kementerian, Provinsi, baik itu kabupaten/kota khususnya daerah, kalau pengelolaan arsipnya tidak benar, jangan ditambah tunjangan daerahnya”, tegas Asman Abnur.

Pengawasan kearsipan adalah proses dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pelaksanaan pengawasan kearsipan yang dilakukan ANRI melalui tahapan-tahapan kegiatan: perencanaan program pengawasan kearsipan, audit kearsipan, penilaian hasil pengawasan kearsipan dan monitoring hasil pengawasan kearsipan. Adapun aspek-aspek pengawasan kearsipan

di pemerintahan daerah meliputi aspek kebijakan, program kearsipan, pengelolaan arsip, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan sarana-prasarana kearsipan.

Kepala Pusat Akreditasi ANRI Rudi Anton menyampaikan pentingnya strategi pengawasan kearsipan sebelum terjun langsung ke lapangan untuk melakukan proses pengawasan kearsipan. “pengawasan kearsipan harus ada strateginya, jadi kalau kita bicara strategi pengawasan, harus dimulai dengan audit supaya kita punya peta kondisi penyelenggaraan kearsipan negara kita ini seperti apa”, ujar Rudi Anton. Rudi menambahkan, dengan adanya audit, dapat memberi ruang bagi objek pengawasan untuk melakukan perubahan berdasarkan rekomendasi audit.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 16 Ayat (2) dalam menjalankan tanggung jawab pengawasan kearsipan, ANRI dibantu oleh lembaga dan/atau unit kearsipan



Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan Rudi Anton

bekerja sama dengan lembaga atau unit yang menyelenggarakan fungsi pengawasan sesuai dengan wilayah kewenangannya. Kemudian Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 menyatakan bahwa pengawasan di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan secara terkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini beriringan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 373 yang mengamanatkan bahwa :1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi, 2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, 3) Pembinaan dan pengawasan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. Koordinasi ANRI dengan Lembaga Kearsipan Daerah dalam hal pengawasan kearsipan merupakan strategi yang efektif dan efisien, mengingat banyaknya objek

pengawasan di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Kepala Pusat Akreditasi Rudi Anton dalam acara sarasehan wartawan yang mengangkat tema Pengawasan Kearsipan (22/11) menyampaikan bahwa Tim Pengawas Kearsipan ANRI di lapangan memperoleh banyak temuan dan permasalahan-permasalahan terkait dengan belum tertibnya budaya pengarsipan. "banyak lembaga yang belum menyusun empat pilar pengelolaan arsip dinamis (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip)", terang Kepala Pusat Akreditasi Rudi Anton. Permasalahan lain yang muncul antara lain seringnya mutasi di lembaga kearsipan daerah yang akan diandalkan sebagai pembina maupun pengawas sangat tinggi, sehingga SDM yang baru menggeluti dunia kearsipan berjalan kurang optimal. Gambaran permasalahan yang umumnya terdapat di tingkat pemerintahan daerah antara lain aspek kebijakan, program kearsipan, pengelolaan arsip, kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan sarana-prasarana kearsipan.

Dari sisi kebijakan, masih banyak pencipta arsip baik pusat maupun daerah yang belum mengacu pada Peraturan Kepala ANRI dalam menetapkan kebijakan kearsipan antara lain Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dan Program Arsip Vital. Beberapa hal yang menyebabkan kondisi tersebut adalah kebijakan pada pencipta arsip ditetapkan sebelum UU, PP dan Perka lahir. Alasan lain yang sering disampaikan adalah tidak ada arsiparis pada pencipta arsip tersebut sehingga tidak dapat menyusun kebijakan, atau yang lebih miris adalah belum tahu kalau ada pengaturan mengenai hal tersebut. Untuk alasan yang terakhir sering dijumpai ketika tim pengawas menanyakan mengenai Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Selain itu hal mendasar yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa terdapat dualisme pengaturan naskah dinas antara ANRI dan Kementerian Dalam Negeri untuk pencipta arsip tingkat pemerintahan daerah. Pengaturan tentang pedoman penyusunan tata naskah dinas tingkat pemerintahan daerah diatur dalam 2 (dua) produk hukum yaitu:

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah

2) Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas.

Seharusnya dengan lahirnya Peraturan Kepala ANRI Nomor 2 Tahun 2014 sebagai amanah langsung dari Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa tata



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur didampingi oleh Kepala ANRI Mustari Irawan berfoto bersama dengan para perwakilan penerima Laporan Audit Kearsipan di tingkat pemerintahan daerah kabupaten/kota

naskah dinas, klasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala ANRI, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah menjadi batal demi hukum. Namun dalam kenyataannya masih banyak pencipta arsip di tingkat daerah yang masih mengacu pada produk hukum tersebut. Untuk itu dengan pengawasan kearsipan, ANRI mendorong agar pencipta arsip dapat mengacu pada produk hukum yang ditetapkan oleh ANRI dalam kebijakan kearsipan.

Dalam konteks program kearsipan, masih banyak dijumpai pencipta arsip yang kurang bijak dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kearsipan. Ada beberapa lembaga kearsipan daerah yang

proporsi alokasi anggaran kearsipan sangat kecil dibanding dengan alokasi untuk anggaran perpustakaan. Dengan demikian program-program kearsipan tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Aspek yang menjadi permasalahan tata kelola arsip administrasi pemerintahan di tingkat pemerintahan daerah yakni aspek pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip di pada level pemerintahan daerah, belum semuanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahan arsip yang tidak mengalir dari unit pengolah ke unit kearsipan secara berkesinambungan, penumpukan arsip di tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pemusnahan arsip yang masih belum sesuai dengan ketentuan, kesadaran untuk menyerahkan arsip ke lembaga kearsipan daerah adalah beberapa contoh buruk kondisi pengelolaan arsip.

Permasalahan berikutnya di bidang kelembagaan. Pengorganisasian kearsipan pada pencipta arsip khususnya unit kearsipan, masih banyak yang belum diatur secara khusus dalam kebijakan. Baru beberapa pemerintahan daerah yang sudah mengatur pengorganisasi kearsipan secara jelas dalam kebijakan pengelolaan arsip yang menyebutkan secara eksplisit fungsi, tugas dan tanggungjawab unit kearsipan dan unit pengolah. Pemerintahan Daerah yang tidak secara jelas mengatur pengorganisasian kearsipan banyak yang tidak dapat berbuat banyak untuk melaksanakan pembinaan kearsipan ke unit pengolah maupun ke unit kearsipan jenjang berikutnya, karena tidak ada payung hukumnya. Termasuk juga eselonering yang menangani urusan kearsipan, kebanyakan masih berada pada level rendah, bahkan masih terdapat hanya merupakan fungsi yang melekat pada sub bagian tata usaha.

Persolaannya yang tidak kalah penting yakni masalah SDM. Masalah SDM menjadi penting karena merekalah yang menjadi garda terdepan dalam mengelola kearsipan di lingkungan masing-masing. Namun masih terdapat pemerintahan daerah yang belum memiliki arsiparis. Dengan ketiadaan arsiparis, pemerintah daerah mengandalkan kepada pengelola arsip yang tentu saja beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh Arsiparis tidak dapat mereka kerjakan. Bahkan masih terdapat suatu pemerintahan daerah yang mengandalkan "ingatan" dari pengelola arsip untuk menemukan arsip yang dicari. Tentu saja hal tersebut jauh dari teori maupun praktek kearsipan di belahan dunia manapun. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 sudah sangat jelas mengamanatkan bahwa pengelolaan arsip dilaksanakan oleh Arsiparis, namun untuk menambah kuantitas arsiparis juga bukan hal yang mudah karena ada masalah moratorium. Salah satu solusi adalah dengan impassing atau pindah jabatan baik dari jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu lainnya atau dari jabatan fungsional umum.

Aspek berikutnya yang menjadi kendala dalam tertib arsip administrasi pemerintahan daerah adalah prasarana dan sarana kearsipan. Kondisi prasarana dan sarana kearsipan juga belum semuanya dalam kondisi yang memenuhi standar. Masih terdapat gedung record center yang berlokasi di daerah yang rawan banjir, peralatan pencegahan bahaya kebakaran yang tidak memadai, serta ruangan dan peralatan perlengkapan record center yang belum memadai seperti rak arsip, boks arsip maupun alat pengatur suhu dan kelembaban.

Bagi organisasi arsip merupakan informasi yang dapat dijadikan pegangan dalam menjalankan

aktivitas operasional serta menjadi bentuk akuntabilitas kinerja serta dapat dijadikan alat transparansi birokrasi. Sedangkan dalam konteks berbangsa dan bernegara, arsip merupakan suatu rekaman perjalanan kehidupan suatu bangsa. Oleh karena itu, pentingnya akan pemahaman mengenai arsip perlu terus digaungkan ke public agar arsip dapat terjaga dan lestari dengan baik.

Arsip dapat bermanfaat secara optimal bagi organisasi apabila dikelola dengan tertib dan teratur, namun sebaliknya apabila arsip dikelola dengan tidak tertib akan menimbulkan masalah bagi suatu organisasi. Menumpuknya arsip yang tidak ada gunanya serta sistem tata arsip yang tidak menentu akan mengakibatkan ruangan terasa sempit dan tidak nyaman sehingga dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi. Apabila suatu arsip sulit untuk ditemukan akan menjadi hambatan dalam proses pengambilan keputusan dan akan mempersulit proses hukum dan pertanggungjawaban.

Masalah kearsipan belum sepenuhnya mendapatkan perhatian yang lebih di kalangan publik. Masih banyak yang belum memahami arti penting dan manfaat arsip dalam kehidupan sehari-hari bagi pribadi maupun bagi organisasi. Arsip relatif masih sangat rendah dan dianggap sebelah mata.

Setiap kegiatan organisasi, khususnya organisasi pemerintah daerah tidak terlepas dari lingkup administrasi karena hal tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Organisasi pemerintah daerah tanpa kegiatan administrasi maka tidak akan dapat tercapai visi dan misinya dengan efektif.

Pada penyelenggaraan kearsipan

tingkat pemerintah daerah kondisinya masih memprihatinkan. Berdasarkan Hasil pengawasan kearsipan oleh ANRI terhadap Pemerintahan Daerah Provinsi pada tahun 2016 diperoleh dua pemerintahan daerah yang memperoleh penilaian "Baik", enam pemerintahan daerah memperoleh penilaian "Cukup", enam pemerintahan daerah memperoleh penilaian "Kurang". Sedangkan sembilan belas pemerintahan daerah memperoleh penilaian "Buruk". Hasil audit kearsipan pada pemerintahan daerah dengan kategori BAIK: 1) Jawa Timur, 2) Jawa Tengah. Kategori CUKUP: 3) DI Yogyakarta 4) Jawa Barat, 5) DKI Jakarta, 6) Kalimantan Timur, 7) Sulawesi Selatan, 8) Bali, 9) Kalimantan Barat. Kategori KURANG: 10) Aceh, 11) Sumatera Barat, 12) Banten, 13) Nusa Tenggara Barat, 14) Jambi. Kategori BURUK: 15) Riau, 16) Sulawesi Tengah, 17) Sumatera Selatan, 18) Kalimantan Selatan, 19) Bangka Belitung, 20) Papua, 21) Kalimantan Tengah, 22) Lampung, 23) Sumatera Utara, 24) Sulawesi Utara, 25) Bengkulu, 26) Nusa Tenggara Timur, 27) Sulawesi Tenggara, 28) Maluku, 29) Kepulauan Riau, 30) Sulawesi Barat, 31) Gorontalo, 32) Maluku Utara, 33) Papua Barat.

Dengan adanya kebijakan pengawasan kearsipan, diharapkan dapat terwujud pengelolaan kearsipan yang lebih baik. Terciptanya budaya tertib arsip yang berkesinambungan dan mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga akan terwujud tertib arsip administrasi pemerintahan di tingkat daerah. (Is)

(Informasi mengenai hasil pengawasan kearsipan pemerintahan daerah tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2017 dapat diunduh di website www.anri.go.id - Publikasi - Majalah ARSIP Edisi 73)

**HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN
PERINGKAT NILAI DAN KATEGORI
BERDASARKAN NAMA KABUPATEN KOTA**

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
1	JAWA TIMUR	Kota Surabaya	89,71	BAIK
2	JAWA TIMUR	Kabupaten Probolinggo	80,38	BAIK
3	KALIMANTAN SELATAN	Kabupaten Hulu Sungai Utara	80,14	BAIK
4	BANTEN	Kabupaten Tangerang	79,19	BAIK
5	JAWA TIMUR	Kabupaten Malang	78,95	BAIK
6	JAWA TENGAH	Kabupaten Purworejo	78,71	BAIK
7	JAWA TIMUR	Kabupaten Tuban	77,75	BAIK
8	JAWA TIMUR	Kota Probolinggo	76,56	BAIK
9	JAWA BARAT	Kabupaten Bogor	74,64	CUKUP
10	DI YOGYAKARTA	Kabupaten Sleman	73,33	CUKUP
11	JAWA TENGAH	Kabupaten Magelang	71,05	CUKUP
12	DI YOGYAKARTA	Kota Yogyakarta	70,24	CUKUP
13	BALI	Kabupaten Badung	67,94	CUKUP
14	JAWA TIMUR	Kabupaten Lumajang	67,70	CUKUP
15	JAWA TIMUR	Kabupaten Tulungagung	67,70	CUKUP
16	JAWA TIMUR	Kota Madiun	67,22	CUKUP
17	SUMATERA SELATAN	Kota Palembang	66,99	CUKUP
18	SUMATERA UTARA	Kota Medan	66,51	CUKUP
19	NUSA TENGGARA BARAT	Kota Mataram	66,51	CUKUP
20	JAWA TIMUR	Kota Blitar	66,31	CUKUP
21	JAWA BARAT	Kota Bekasi	65,31	CUKUP
22	JAWA TIMUR	Kabupaten Nganjuk	65,07	CUKUP
23	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Luwu Timur	64,83	CUKUP
24	JAWA TIMUR	Kabupaten Magetan	64,59	CUKUP
25	JAWA TENGAH	Kabupaten Sragen	64,35	CUKUP
26	JAWA TENGAH	Kota Magelang	64,35	CUKUP
27	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Banyuasin	63,16	CUKUP
28	JAWA BARAT	Kabupaten Sukabumi	62,68	CUKUP
29	JAWA TENGAH	Kabupaten Jepara	61,96	CUKUP
30	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Ogan Komering Ulu	61,72	CUKUP
31	JAWA TIMUR	Kabupaten Banyuwangi	61,72	CUKUP
32	BANTEN	Kota Cilegon	61,48	CUKUP
33	JAWA BARAT	Kabupaten Bekasi	60,77	KURANG
34	JAWA TIMUR	Kota Batu	60,77	KURANG
35	JAWA TIMUR	Kota Pasuruan	60,77	KURANG

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
36	NUSA TENGGARA BARAT	Kabupaten Sumbawa	60,29	CUKUP
37	JAWA TIMUR	Kabupaten Blitar	60,29	KURANG
38	JAWA TIMUR	Kabupaten Gresik	60,05	KURANG
39	JAWA TENGAH	Kabupaten Cilacap	60,00	KURANG
40	JAWA BARAT	Kota Cirebon	59,81	KURANG
41	JAWA TIMUR	Kota Mojokerto	59,81	KURANG
42	KEP. BANGKA BELITUNG	Kota Pangkalpinang	59,57	KURANG
43	JAWA BARAT	Kabupaten Bandung	59,57	KURANG
44	JAWA TENGAH	Kabupaten Banjarnegara	59,33	KURANG
45	NUSA TENGGARA BARAT	Kabupaten Lombok Barat	59,09	KURANG
46	BALI	Kota Denpasar	58,13	KURANG
47	JAWA BARAT	Kabupaten Karawang	57,89	KURANG
48	JAWA TENGAH	Kabupaten Kendal	57,89	KURANG
49	SUMATERA SELATAN	Kota Lubuklinggau	57,42	KURANG
50	JAWA TENGAH	Kabupaten Pati	57,00	KURANG
51	KALIMANTAN BARAT	Kabupaten Mempawah	56,46	BURUK
52	KALIMANTAN BARAT	Kabupaten Kubu Raya	56,46	BURUK
53	KALIMANTAN BARAT	Kabupaten Sanggau	55,50	KURANG
54	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	55,50	KURANG
55	JAWA TIMUR	Kabupaten Sidoarjo	55,26	KURANG
56	DI YOGYAKARTA	Kabupaten Bantul	55,24	KURANG
57	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Timur Tengah Selatan	55,13	KURANG
58	KALIMANTAN SELATAN	Kota Banjarmasin	55,02	KURANG
59	SUMATERA BARAT	Kota Payakumbuh	54,55	KURANG
60	JAWA BARAT	Kabupaten Indramayu	53,83	KURANG
61	KALIMANTAN SELATAN	Kabupaten Banjar	53,83	KURANG
62	SUMATERA SELATAN	Kota Pagar Alam	53,35	KURANG
63	JAWA TIMUR	Kabupaten Pasuruan	53,35	KURANG
64	NUSA TENGGARA BARAT	Kabupaten Sumbawa Barat	53,11	BURUK
65	JAWA TENGAH	Kota Surakarta	53,00	KURANG
66	JAWA TENGAH	Kabupaten Temanggung	53,00	KURANG
67	JAWA BARAT	Kabupaten Purwakarta	52,87	KURANG
68	KEP. BANGKA BELITUNG	Kabupaten Bangka Tengah	52,63	KURANG
69	DI YOGYAKARTA	Kabupaten Gunungkidul	52,62	KURANG
70	SUMATERA BARAT	Kabupaten Sijunjung	52,53	BURUK
71	JAWA TENGAH	Kabupaten Wonosobo	52,39	KURANG
72	BENGKULU	Kabupaten Lebong	52,35	KURANG
73	BANTEN	Kota Tangerang	52,15	KURANG
74	JAWA TENGAH	Kabupaten Banyumas	52,15	KURANG

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
75	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Barru	52,15	KURANG
76	KEPULAUAN RIAU	Kabupaten Bintan	52,00	KURANG
77	SULAWESI TENGAH	Kabupaten Parigi Moutong	52,00	KURANG
78	JAWA BARAT	Kota Tasikmalaya	51,91	KURANG
79	JAWA TIMUR	Kabupaten Ponorogo	51,91	KURANG
80	JAWA BARAT	Kabupaten Garut	51,61	KURANG
81	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Musi Banyuasin	51,44	KURANG
82	JAWA TIMUR	Kabupaten Jember	51,44	KURANG
83	JAWA TIMUR	Kota Kediri	51,20	KURANG
84	DI YOGYAKARTA	Kabupaten Kulon Progo	51,19	KURANG
85	JAWA TENGAH	Kabupaten Grobogan	51,00	BURUK
86	JAWA TIMUR	Kabupaten Bojonegoro	50,96	BURUK
87	JAWA TIMUR	Kabupaten Pacitan	50,72	BURUK
88	KALIMANTAN BARAT	Kota Singkawang	50,48	BURUK
89	JAWA TIMUR	Kabupaten Lamongan	50,24	BURUK
90	BANTEN	Kabupaten Lebak	50,00	BURUK
91	JAWA TENGAH	Kabupaten Pekalongan	50,00	BURUK
92	JAWA TIMUR	Kabupaten Ngawi	50,00	BURUK
93	KALIMANTAN BARAT	Kabupaten Sintang	49,76	BURUK
94	KALIMANTAN SELATAN	Kabupaten Tabalong	49,52	BURUK
95	KEP. BANGKA BELITUNG	Kabupaten Bangka Barat	49,04	BURUK
96	KEP. BANGKA BELITUNG	Kabupaten Bangka Selatan	49,04	BURUK
97	JAWA TENGAH	Kabupaten Karanganyar	49,00	BURUK
98	JAWA TENGAH	Kabupaten Kebumen	49,00	BURUK
99	JAWA TENGAH	Kabupaten Demak	49,00	BURUK
100	JAWA TENGAH	Kabupaten Kudus	49,00	BURUK
101	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Saburajua	48,93	BURUK
102	JAWA BARAT	Kabupaten Majalengka	48,33	BURUK
103	JAWA BARAT	Kota Bogor	48,33	BURUK
104	KALIMANTAN TIMUR	Kabupaten Berau	48,09	BURUK
105	JAWA TENGAH	Kabupaten Rembang	48,00	BURUK
106	JAWA TENGAH	Kota Salatiga	48,00	BURUK
107	JAWA BARAT	Kota Bandung	47,85	BURUK
108	JAWA BARAT	Kabupaten Cirebon	47,37	BURUK
109	JAWA TIMUR	Kota Malang	47,37	BURUK
110	KALIMANTAN SELATAN	Kota Banjarbaru	47,13	BURUK
111	JAWA TENGAH	Kabupaten Wonogiri	47,00	BURUK
112	KALIMANTAN SELATAN	Kabupaten Batola	46,65	BURUK
113	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Barito Timur	46,65	BURUK

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
114	LAMPUNG	Kabupaten Lampung Timur	46,41	BURUK
115	RIAU	Kabupaten Siak	46,21	BURUK
116	JAWA TENGAH	Kabupaten Purbalingga	46,00	BURUK
117	LAMPUNG	Kota Metro	45,45	BURUK
118	SUMATERA BARAT	Kabupaten Tanah Datar	45,22	BURUK
119	SUMATERA BARAT	Kota Padang	45,22	BURUK
120	JAWA TENGAH	Kabupaten Sukoharjo	45,00	BURUK
121	KEP. BANGKA BELITUNG	Kabupaten Belitung Timur	44,98	BURUK
122	KALIMANTAN TIMUR	Kota Balikpapan	44,95	BURUK
123	SULAWESI TENGAH	Kabupaten Donggala	44,00	BURUK
124	JAWA BARAT	Kabupaten Cianjur	43,54	BURUK
125	JAWA BARAT	Kota Depok	43,54	BURUK
126	JAWA TIMUR	Kabupaten Sumenep	43,30	BURUK
127	KALIMANTAN SELATAN	Kabupaten Balangan	43,30	BURUK
128	KEP. BANGKA BELITUNG	Kabupaten Belitung	43,06	BURUK
129	SUMATERA UTARA	Kabupaten Deli Serdang	43,06	BURUK
130	SUMATERA BARAT	Kabupaten Pasaman	42,82	BURUK
131	JAWA TIMUR	Kabupaten Kediri	42,82	BURUK
132	JAWA TIMUR	Kabupaten Mojokerto	42,58	BURUK
133	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Timur Tengah Utara	42,00	BURUK
134	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Manggarai Barat	41,77	BURUK
135	JAWA TIMUR	Kabupaten Jombang	41,63	BURUK
136	NUSA TENGGARA BARAT	Kabupaten Lombok Timur	41,39	BURUK
137	BALI	Kabupaten Buleleng	41,39	BURUK
138	MALUKU UTARA	Kota Tidore Kepulauan	41,39	BURUK
139	KALIMANTAN BARAT	Kabupaten Kayong Utara	41,15	BURUK
140	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Pinrang	41,15	BURUK
141	JAWA BARAT	Kabupaten Sumedang	40,91	BURUK
142	NUSA TENGGARA BARAT	Kota Bima	40,67	BURUK
143	SUMATERA BARAT	Kabupaten Dharmasraya	40,67	BURUK
144	JAWA TIMUR	Kabupaten Sampang	40,67	BURUK
145	KALIMANTAN SELATAN	Kabupaten Tanah Laut	40,67	BURUK
146	JAWA BARAT	Kabupaten Ciamis	40,43	BURUK
147	JAWA TIMUR	Kabupaten Pamekasan	40,43	BURUK
148	JAWA TIMUR	Kabupaten Situbondo	40,43	BURUK
149	RIAU	Kabupaten Kampar	40,24	BURUK
150	JAWA TENGAH	Kabupaten Semarang	40,00	BURUK
151	JAWA TENGAH	Kabupaten Boyolali	40,00	BURUK
152	KALIMANTAN BARAT	Kota Pontianak	39,95	KURANG

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
153	SUMATERA BARAT	Kota Solok	39,95	BURUK
154	KEP. BANGKA BELITUNG	Kabupaten Bangka	39,95	BURUK
155	RIAU	Kabupaten Indragiri Hulu	39,57	BURUK
156	MALUKU UTARA	Kabupaten Halmahera Utara	39,47	BURUK
157	JAMBI	Kabupaten Muaro Jambi	39,29	BURUK
158	JAMBI	Kota Jambi	39,29	BURUK
159	KALIMANTAN SELATAN	Kabupaten Kota Baru	39,23	BURUK
160	SUMATERA BARAT	Kota Bukittinggi	39,23	BURUK
161	JAWA TENGAH	Kota Pekalongan	39,00	BURUK
162	KALIMANTAN BARAT	Kabupaten Landak	39,00	BURUK
163	KEPULAUAN RIAU	Kota Tanjung Pinang	39,00	BURUK
164	JAWA TENGAH	Kota Semarang	39,00	BURUK
165	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Bone	38,66	BURUK
166	BANTEN	Kota Tangerang Selatan	38,52	BURUK
167	JAWA TIMUR	Kabupaten Bondowoso	38,52	BURUK
168	KALIMANTAN TIMUR	Kota Bontang	38,52	BURUK
169	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Luwu Utara	38,28	BURUK
170	JAWA TENGAH	Kabupaten Blora	38,28	BURUK
171	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Kepulauan Selayar	38,19	BURUK
172	JAWA TENGAH	Kabupaten Pemasang	38,00	KURANG
173	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Kupang	37,92	BURUK
174	JAWA BARAT	Kabupaten Bandung Barat	37,80	BURUK
175	KALIMANTAN BARAT	Kabupaten Sambas	37,80	BURUK
176	SUMATERA BARAT	Kabupaten Solok	37,56	BURUK
177	KALIMANTAN TIMUR	Kota Samarinda	37,23	BURUK
178	SULAWESI TENGAH	Kota Palu	37,00	BURUK
179	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Sinjai	36,99	BURUK
180	SUMATERA BARAT	Kabupaten Lima Puluh Kota	36,93	BURUK
181	SUMATERA BARAT	Kabupaten Pasaman Barat	36,84	BURUK
182	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Kotawaringin Barat	36,48	BURUK
183	RIAU	Kota Dumai	36,19	BURUK
184	JAMBI	Kabupaten Merangin	36,19	BURUK
185	JAWA BARAT	Kabupaten Subang	36,12	BURUK
186	JAWA TIMUR	Kabupaten Madiun	35,89	BURUK
187	SUMATERA BARAT	Kota Padang Panjang	35,65	BURUK
188	MALUKU UTARA	Kabupaten Halmahera Selatan	35,65	BURUK
189	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Bulukumba	35,56	BURUK
190	JAWA TENGAH	Kabupaten Brebes	35,41	BURUK
191	SUMATERA BARAT	Kota Sawah Lunto	35,17	BURUK

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
192	JAWA BARAT	Kabupaten Kuningan	35,17	BURUK
193	MALUKU UTARA	Kota Ternate	35,17	BURUK
194	KALIMANTAN TIMUR	Kabupaten Kutai Kertanegara	34,86	BURUK
195	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Muara Enim	34,69	BURUK
196	KALIMANTAN SELATAN	Kabupaten Tanah Bumbu	34,69	BURUK
197	JAWA TENGAH	Kota Tegal	34,45	BURUK
198	KALIMANTAN BARAT	Kabupaten Bengkayang	34,45	BURUK
199	RIAU	Kabupaten Pelalawan	34,23	BURUK
200	JAWA TIMUR	Kabupaten Trenggalek	34,21	BURUK
201	SUMATERA BARAT	Kabupaten Agam	33,73	BURUK
202	JAWA BARAT	Kota Cimahi	33,73	BURUK
203	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Kolaka Utara	33,65	BURUK
204	SUMATERA BARAT	Kabupaten Padang Pariaman	33,49	BURUK
205	KALIMANTAN SELATAN	Kabupaten Tapin	33,49	BURUK
206	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Barito Selatan	33,37	BURUK
207	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Soppeng	33,33	BURUK
208	KALIMANTAN UTARA	Kabupaten Malinau	33,25	BURUK
209	JAWA TENGAH	Kabupaten Batang	33,01	BURUK
210	BALI	Kabupaten Bangli	33,00	BURUK
211	ACEH	Kabupaten Gayo Lues	32,54	BURUK
212	KALIMANTAN SELATAN	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	32,30	BURUK
213	NUSA TENGGARA BARAT	Kabupaten Dompu	32,30	BURUK
214	LAMPUNG	Kabupaten Lampung Tengah	32,06	BURUK
215	KALIMANTAN BARAT	Kabupaten Ketapang	32,06	BURUK
216	ACEH	Kota Subulussalam	32,00	BURUK
217	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Belu	31,98	BURUK
218	SUMATERA BARAT	Kabupaten Kepulauan Mentawai	31,82	BURUK
219	JAWA TIMUR	Kabupaten Bangkalan	31,82	BURUK
220	RIAU	Kabupaten Bengkalis	31,67	BURUK
221	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Enrekang	31,10	BURUK
222	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Alor	31,03	BURUK
223	JAWA TENGAH	Kabupaten Klaten	31,00	BURUK
224	SULAWESI TENGAH	Kabupaten Tojo Una-Una	31,00	BURUK
225	RIAU	Kabupaten Rokan Hulu	30,88	BURUK
226	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Lahat	30,86	BURUK
227	JAWA BARAT	Kabupaten Tasikmalaya	30,86	BURUK
228	KALIMANTAN SELATAN	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	30,86	BURUK
229	SUMATERA UTARA	Kabupaten Dairi	30,86	BURUK
230	KALIMANTAN TIMUR	Kabupaten Kutai Timur	30,70	BURUK

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
231	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Ende	30,55	BURUK
232	KALIMANTAN TIMUR	Kabupaten Paser	30,22	BURUK
233	BANTEN	Kota Serang	30,14	BURUK
234	SUMATERA UTARA	Kabupaten Karo	30,14	BURUK
235	JAWA BARAT	Kota Banjar	29,90	BURUK
236	SULAWESI SELATAN	Kota Palopo	29,90	BURUK
237	SULAWESI TENGAH	Kabupaten Banggai Kepulauan	29,26	BURUK
238	BENGKULU	Kabupaten Rejang Lebong	29,12	BURUK
239	JAMBI	Kabupaten Bungo	28,98	BURUK
240	JAMBI	Kabupaten Sarolangun	28,98	BURUK
241	JAWA BARAT	Kota Sukabumi	28,95	BURUK
242	KALIMANTAN UTARA	Kota Tarakan	28,95	BURUK
243	JAMBI	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	28,81	BURUK
244	SUMATERA SELATAN	Kota Prabumulih	28,75	BURUK
245	KALIMANTAN TENGAH	Kota Palangka Raya	28,59	BURUK
246	RIAU	Kota Pekanbaru	28,57	BURUK
247	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Sidenreng Rappang	28,23	BURUK
248	BENGKULU	Kabupaten Bengkulu Utara	28,10	BURUK
249	KEPULAUAN RIAU	Kabupaten Lingga	28,00	BURUK
250	LAMPUNG	Kota Bandar Lampung	27,99	BURUK
251	SULAWESI SELATAN	Kota Makassar	27,99	BURUK
252	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Ngada	27,92	BURUK
253	KALIMANTAN TIMUR	Kabupaten Penajam Paser Utara	27,45	BURUK
254	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Nagekeo	27,45	BURUK
255	KALIMANTAN BARAT	Kabupaten Sekadau	27,27	BURUK
256	JAWA TENGAH	Kabupaten Tegal	27,00	BURUK
257	BALI	Kabupaten Gianyar	27,00	BURUK
258	BALI	Kabupaten Karangasem	27,00	BURUK
259	BENGKULU	Kota Bengkulu	26,97	BURUK
260	JAMBI	Kabupaten Kerinci	26,90	BURUK
261	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Musi Rawas	26,79	BURUK
262	SUMATERA UTARA	Kabupaten Asahan	26,56	BURUK
263	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Wajo	26,25	BURUK
264	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Sukamara	26,20	BURUK
265	SUMATERA UTARA	Kota Tanjungbalai	26,07	BURUK
266	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Malaka	26,01	BURUK
267	KALIMANTAN BARAT	Kabupaten Melawi	25,84	BURUK
268	KALIMANTAN UTARA	Kabupaten Nunukan	25,84	BURUK
269	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Sumba Barat	25,78	BURUK

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
270	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Sumba Timur	25,78	BURUK
271	BANTEN	Kabupaten Serang	25,60	BURUK
272	SUMATERA UTARA	Kota Sibolga	25,60	BURUK
273	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Pulang Pisau	25,48	BURUK
274	KALIMANTAN TIMUR	Kabupaten Kutai Barat	25,42	BURUK
275	LAMPUNG	Kabupaten Tanggamus	25,36	BURUK
276	MALUKU	Kabupaten Seram Bagian Timur	25,36	BURUK
277	SUMATERA UTARA	Kabupaten Simalungun	25,36	BURUK
278	SUMATERA UTARA	Kabupaten Labuhanbatu	25,24	BURUK
279	SUMATERA UTARA	Kabupaten Padang Lawas	24,76	BURUK
280	JAMBI	Kabupaten Batang Hari	24,76	BURUK
281	LAMPUNG	Kabupaten Pesawaran	24,40	BURUK
282	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Maros	24,34	BURUK
283	ACEH	Kabupaten Aceh Besar	24,00	BURUK
284	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Flores Timur	23,75	BURUK
285	SUMATERA UTARA	Kabupaten Batubara	23,68	BURUK
286	LAMPUNG	Kabupaten Lampung Barat	23,68	BURUK
287	SULAWESI BARAT	Kabupaten Majene	23,63	BURUK
288	SULAWESI TENGGARA	Kota Kendari	23,63	BURUK
289	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Rote Ndao	23,39	BURUK
290	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Kolaka	23,39	BURUK
291	RIAU	Kabupaten Meranti	23,33	BURUK
292	SUMATERA UTARA	Kabupaten Mandailing Natal	23,33	BURUK
293	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Murung Raya	23,26	BURUK
294	SUMATERA UTARA	Kabupaten Labuhanbatu Utara	23,09	BURUK
295	ACEH	Kabupaten Nagan Raya	23,00	BURUK
296	ACEH	Kabupaten Aceh Tengah	23,00	BURUK
297	ACEH	Kabupaten Aceh Timur	23,00	BURUK
298	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Ogan Ilir	22,73	BURUK
299	MALUKU	Kabupaten Buru	22,73	BURUK
300	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Ogan Komering Ilir	22,49	BURUK
301	BENGKULU	Kabupaten Kaur	22,20	BURUK
302	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Barito Utara	22,13	BURUK
303	SUMATERA BARAT	Kabupaten Solok Selatan	22,01	BURUK
304	LAMPUNG	Kabupaten Lampung Utara	22,01	BURUK
305	SULAWESI UTARA	Kota Tomohon	22,01	BURUK
306	KEPULAUAN RIAU	Kota Batam	22,00	BURUK
307	KEPULAUAN RIAU	Kabupaten Natuna	22,00	BURUK
308	JAMBI	Kota Sungai Penuh	21,90	BURUK

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
309	LAMPUNG	Kabupaten Lampung Selatan	21,77	BURUK
310	LAMPUNG	Kabupaten Tulang Bawang Barat	21,77	BURUK
311	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Takalar	21,77	BURUK
312	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Kotawaringin Timur	21,65	BURUK
313	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)	21,29	BURUK
314	LAMPUNG	Kabupaten Way Kanan	21,29	BURUK
315	SUMATERA UTARA	Kabupaten Serdang Bedagai	21,29	BURUK
316	JAMBI	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	21,15	BURUK
317	BENGKULU	Kabupaten Bengkulu Selatan	21,05	BURUK
318	LAMPUNG	Kabupaten Pringsewu	20,81	BURUK
319	BALI	Kabupaten Jembrana	20,81	BURUK
320	SUMATERA BARAT	Kabupaten Pesisir Selatan	20,81	BURUK
321	BENGKULU	Kabupaten Kepahiang	20,48	BURUK
322	JAMBI	Kabupaten Tebo	20,48	BURUK
323	NUSA TENGGARA BARAT	Kabupaten Lombok Tengah	20,33	BURUK
324	LAMPUNG	Kabupaten Mesuji	20,33	BURUK
325	BENGKULU	Kabupaten Bengkulu Tengah	20,24	BURUK
326	SUMATERA UTARA	Kabupaten Langkat	20,21	BURUK
327	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Luwu	20,10	BURUK
328	NUSA TENGGARA BARAT	Kabupaten Lombok Utara	20,10	BURUK
329	LAMPUNG	Kabupaten Tulang Bawang	20,10	BURUK
330	SULAWESI UTARA	Kota Manado	20,10	BURUK
331	SULAWESI TENGAH	Kabupaten Buol	20,00	BURUK
332	KEPULAUAN RIAU	Kabupaten Karimun	20,00	BURUK
333	PAPUA	Kota Jayapura	20,00	BURUK
334	ACEH	Kota Langsa	20,00	BURUK
335	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Katingan	19,98	BURUK
336	SUMATERA UTARA	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	19,86	BURUK
337	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	19,86	BURUK
338	SUMATERA UTARA	Kabupaten Padang Lawas Utara	19,86	BURUK
339	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Manggarai	19,81	BURUK
340	SUMATERA UTARA	Kota Pematangsiantar	19,74	BURUK
341	MALUKU	Kabupaten Kepulauan Aru	19,62	BURUK
342	SUMATERA UTARA	Kabupaten Tapanuli Selatan	19,62	BURUK
343	SUMATERA UTARA	Kabupaten Humbang Hasundutan	19,40	BURUK
344	KALIMANTAN BARAT	Kabupaten Kapuas Hulu	19,38	BURUK
345	MALUKU	Kota Ambon	19,38	BURUK
346	PAPUA BARAT	Kab Teluk Bintuni	19,38	BURUK

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
347	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Bantaeng	19,33	BURUK
348	NUSA TENGGARA TIMUR	Kota Kupang	19,29	BURUK
349	SULAWESI UTARA	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	19,14	BURUK
350	SULAWESI TENGAH	Kabupaten Tolitoli	19,00	BURUK
351	SUMATERA UTARA	Kota Tebing Tinggi	18,90	BURUK
352	BANTEN	Kabupaten Pandeglang	18,90	BURUK
353	RIAU	Kabupaten Kuantan Singingi	18,76	BURUK
354	SULAWESI UTARA	Kota Bitung	18,66	BURUK
355	SUMATERA UTARA	Kabupaten Samosir	18,42	BURUK
356	MALUKU	Kabupaten Maluku Barat Daya	18,42	BURUK
357	MALUKU	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	18,42	BURUK
358	KALIMANTAN UTARA	Kabupaten Bulungan	18,18	BURUK
359	BENGKULU	Kabupaten Seluma	18,18	BURUK
360	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Seruyan	18,18	BURUK
361	BALI	Kabupaten Tabanan	18,18	BURUK
362	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Gowa	18,18	BURUK
363	ACEH	Kabupaten Aceh Barat	18,00	BURUK
364	PAPUA	Kabupaten Keerom	18,00	BURUK
365	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Tana Toraja	17,94	BURUK
366	SUMATERA UTARA	Kabupaten Nias Barat	17,94	BURUK
367	SULAWESI UTARA	Kabupaten Kepulauan Sangihe	17,94	BURUK
368	SUMATERA UTARA	Kabupaten Nias Selatan	17,94	BURUK
369	RIAU	Kabupaten Indragiri Hilir	17,62	BURUK
370	SUMATERA UTARA	Kota Padangsidempuan	17,46	BURUK
371	SUMATERA UTARA	Kabupaten Tapanuli Tengah	17,46	BURUK
372	SUMATERA UTARA	Kota Binjai	17,22	BURUK
373	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Kapuas	17,11	BURUK
374	PAPUA	Kabupaten Nabire	17,00	BURUK
375	PAPUA BARAT	Kab Teluk Wondama	16,99	BURUK
376	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Gunung Mas	16,87	BURUK
377	KALIMANTAN UTARA	Kabupaten Tanah Tidung	16,75	BURUK
378	SULAWESI BARAT	Kabupaten Polewali Mandar	16,71	BURUK
379	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Kolaka Timur	16,71	BURUK/Tidak Dinilai
380	SULAWESI BARAT	Kabupaten Mamuju	16,47	BURUK
381	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Empat Lawang	16,27	BURUK
382	SUMATERA UTARA	Kabupaten Tapanuli Utara	16,27	BURUK
383	SULAWESI TENGAH	Kabupaten Morowali Utara	16,07	BURUK

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
384	ACEH	Kabupaten Aceh Singkil	16,03	BURUK
385	SULAWESI UTARA	Kabupaten Minahasa	16,03	BURUK
386	SULAWESI TENGAH	Kabupaten Morowali	16,00	BURUK
387	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Muna	15,99	BURUK
388	SULAWESI UTARA	Kabupaten Kepulauan Talaud	15,79	BURUK
389	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Jeneponto	15,79	BURUK
390	MALUKU	Kabupaten Buru Selatan	15,79	BURUK
391	SUMATERA UTARA	Kabupaten Nias	15,31	BURUK
392	SULAWESI TENGGARA	Kota Bau-Bau	15,27	BURUK
393	SUMATERA UTARA	Kabupaten Toba Samosir	15,19	BURUK
394	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Konawe Selatan	15,04	BURUK
395	PAPUA	Kabupaten Dogiyai	15,00	BURUK
396	SULAWESI UTARA	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	14,59	BURUK
397	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Toraja Utara	14,59	BURUK
398	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	14,35	BURUK
399	PAPUA	Kabupaten Timika	14,11	BURUK
400	SULAWESI SELATAN	Kota Parepare	14,05	BURUK
401	GORONTALO	Kabupaten Pohuwato	14,05	BURUK
402	ACEH	Kabupaten Pidie	14,00	BURUK
403	SULAWESI TENGAH	Kabupaten Sigi	14,00	BURUK
404	PAPUA	Kabupaten Jayawijaya	14,00	BURUK
405	MALUKU UTARA	Kabupaten Kepulauan Sula	13,88	BURUK
406	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Lembata	13,60	BURUK
407	ACEH	Kabupaten Bener Meriah	13,10	BURUK
408	PAPUA	Kabupaten Merauke	13,00	BURUK
409	ACEH	Kabupaten Aceh Selatan	13,00	BURUK
410	SULAWESI TENGAH	Kabupaten Poso	13,00	BURUK
411	MALUKU UTARA	Kabupaten Halmahera Tengah	12,92	BURUK
412	RIAU	Kabupaten Rokan Hilir	12,38	BURUK
413	SUMATERA UTARA	Kabupaten Pakpak Bharat	12,20	BURUK
414	PAPUA	Kabupaten Jayapura	12,00	BURUK
415	PAPUA	Kabupaten Biak Numfor	12,00	BURUK
416	KALIMANTAN TIMUR	Kabupaten Mahakam Ulu	11,96	BURUK
417	SULAWESI UTARA	Kota Kotamobagu	11,96	BURUK
418	PAPUA BARAT	Kab Fakfak	11,72	BURUK
419	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Sumba Tengah	11,69	BURUK
420	SULAWESI UTARA	Kabupaten Minahasa Selatan	11,48	BURUK
421	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Buton Selatan	11,46	BURUK

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
422	ACEH	Kabupaten Aceh Utara	11,00	BURUK
423	SULAWESI TENGAH	Kabupaten Banggai	11,00	BURUK
424	ACEH	Kota Aceh Barat Daya	11,00	BURUK
425	PAPUA	Kabupaten Sarmi	11,00	BURUK
426	ACEH	Kabupaten Aceh Tamiang	11,00	BURUK
427	PAPUA	Kabupaten Yalimo	11,00	BURUK
428	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Sumba Barat Daya	10,98	BURUK
429	GORONTALO	Kabupaten Gorontalo	10,74	BURUK
430	GORONTALO	Kabupaten Gorontalo Utara	10,74	BURUK
431	GORONTALO	Kota Gorontalo	10,69	BURUK
432	MALUKU	Kabupaten Maluku Tengah	10,29	BURUK
433	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Konawe	10,02	BURUK
434	ACEH	Kota Lhokseumawe	10,00	BURUK
435	ACEH	Kabupaten Aceh Jaya	10,00	BURUK
436	ACEH	Kabupaten Bireun	10,00	BURUK
437	KEPULAUAN RIAU	Kabupaten Anambas	10,00	BURUK
438	ACEH	Kota Sabang	10,00	BURUK
439	SULAWESI BARAT	Kabupaten Mamasa	9,79	BURUK
440	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Muna Barat	9,79	BURUK
441	SULAWESI BARAT	Kabupaten Mamuju Tengah	9,55	BURUK
442	SUMATERA BARAT	Kota Pariaman	9,33	BURUK
443	BALI	Kabupaten Klungkung	9,09	BURUK
444	SULAWESI TENGAH	Kabupaten Banggai Laut	9,00	BURUK
445	SULAWESI UTARA	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	8,85	BURUK
446	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Buton	8,83	BURUK
447	MALUKU	Kota Tual	8,61	BURUK
448	NUSA TENGGARA BARAT	Kabupaten Bima	8,61	BURUK
449	SUMATERA UTARA	Kota Gunungsitoli	8,49	BURUK
450	SULAWESI UTARA	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	8,37	BURUK
451	PAPUA BARAT	Kab Manokwari	8,37	BURUK
452	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Sikka	8,35	BURUK
453	SULAWESI BARAT	Kabupaten Mamuju Utara	8,35	BURUK
454	BENGKULU	Kabupaten Mukomuko	8,23	BURUK
455	SULAWESI UTARA	Kabupaten Bolaang Mongondow	8,13	BURUK
456	JAWA BARAT	Kabupaten Pangandaran	7,89	BURUK
457	MALUKU	Kabupaten Maluku Tenggara	7,66	BURUK
458	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Lamandau	7,54	BURUK
459	MALUKU	Kabupaten Seram Bagian Barat	7,42	BURUK

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
460	GORONTALO	Kabupaten Bone Bolango	7,36	BURUK
461	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Wakatobi	7,16	BURUK
462	ACEH	Kabupaten Aceh Tenggara	7,00	BURUK
463	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Konawe Utara	6,92	BURUK
464	PAPUA	Kabupaten Mamberamo Tengah	6,00	BURUK
465	SULAWESI UTARA	Kabupaten Minahasa Utara	5,74	BURUK
466	PAPUA BARAT	Kab Raja Ampat	5,74	BURUK
467	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Bombana	5,73	BURUK
468	GORONTALO	Kabupaten Boalemo	5,48	BURUK
469	SUMATERA UTARA	Kabupaten Nias Utara	5,02	BURUK
470	ACEH	Kabupaten Simeulue	5,00	BURUK
471	PAPUA	Kabupaten Deiyai	5,00	BURUK
472	PAPUA	Kabupaten Paniai	5,00	BURUK
473	SULAWESI UTARA	Kabupaten Minahasa Tenggara	4,78	BURUK
474	MALUKU UTARA	Kabupaten Taliabu	4,55	BURUK
475	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Buton Utara	4,53	BURUK
476	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Konawe Kepulauan	4,30	BURUK
477	MALUKU UTARA	Kabupaten Halmahera Timur	4,07	BURUK
478	ACEH	Kabupaten Pidie Jaya	4,00	BURUK
479	PAPUA	Kabupaten Kep. Yapen	4,00	BURUK
480	SULAWESI TENGGARA	Kabupaten Buton Tengah	3,82	BURUK
481	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Manggarai Timur	3,58	BURUK
482	MALUKU UTARA	Kabupaten Halmahera Barat	3,35	BURUK
483	PAPUA BARAT	Kab Kaimana	2,39	BURUK
484	PAPUA	Kabupaten Waropen	2,00	BURUK
485	PAPUA	Kabupaten Supiori	2,00	BURUK
486	PAPUA	Kabupaten Tolikara	1,00	BURUK
487	PAPUA	Kabupaten Boven Diguel	1,00	BURUK
488	PAPUA	Kabupaten Mappi	1,00	BURUK
489	PAPUA	Kabupaten Yahukimo	1,00	BURUK
490	ACEH	Kota Banda Aceh	0,79	BURUK
491	MALUKU UTARA	Kabupaten Pulau Morotai	0,48	BURUK
492	SUMATERA SELATAN	Kabupaten Musi Rawas Utara	0,00	BURUK
493	LAMPUNG	Kabupaten Pesisir Barat	0,00	BURUK
494	PAPUA BARAT	Kab Manokwari Selatan	0,00	BURUK
495	PAPUA BARAT	Kab Maybrat	0,00	BURUK
496	PAPUA BARAT	Kab Pegunungan Arfak	0,00	BURUK
497	PAPUA BARAT	Kab Sorong	0,00	BURUK
498	PAPUA BARAT	Kab Sorong Selatan	0,00	BURUK

NO	PROVINSI	PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	NILAI	KATEGORI
499	PAPUA BARAT	Kab Tambrauw	0,00	BURUK
500	PAPUA BARAT	Kota Sorong	0,00	BURUK
501	PAPUA	Kabupaten Asmat	0,00	BURUK
502	PAPUA	Kabupaten Intan Jaya	0,00	BURUK
503	PAPUA	Kabupaten Lanny Jaya	0,00	BURUK
504	PAPUA	Kabupaten Mamberamo Raya	0,00	BURUK
505	PAPUA	Kabupaten Nduga	0,00	BURUK
506	PAPUA	Kabupaten Pegunungan Bintang	0,00	BURUK
507	PAPUA	Kabupaten Puncak	0,00	BURUK
508	PAPUA	Kabupaten Puncak Jaya	Tidak dilakukan audit	

Desi Pratiwi

WHO DO WE THINK WE ARE? QUI SOMMES-NOUS?

Library and Archives Canada Menampilkan Harta Karun Memori Kanada

Tepatnya 1 Juli 2017 merupakan hari spesial bagi warga negara Kanada, karena 150 tahun yang lalu Undang-Undang Dasar Tahun 1867 (yang kemudian disebut *British North American Act, 1867*) menyatukan provinsi-provinsi Inggris di New Brunswick, Nova Scotia, Quebec, dan Ontario ke dalam Dominion Kanada. Perayaan Hari Kanada (*Canada Day*) berlangsung di seluruh negeri termasuk di beberapa lokasi di dunia. Awalnya, hari ini dikenal dengan sebutan “*Dominion Day*” ketika tanggal tersebut dinyatakan sebagai hari libur nasional pada tahun 1879. Beberapa bulan setelah *Canada Act* Tahun 1982 disahkan, sebuah RUU mengubah nama Dominion Day menjadi Canada Day.

Apakah anda akan mengunjungi ibu kota Kanada tahun ini atau tahun depan? *Library and Archives Canada* menggelar salah satu pameran terpentingnya yang berjudul “*Who do We Think We are? Qui Sommes-*

Nous?” di 395 Wellington Street di Ottawa, dekat Gedung Parlemen, dari tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan 1 Maret 2018. Pameran ini membahas berbagai gagasan tentang Kanada dan tentang menjadi orang Kanada, memandang negara 150 tahun yang lalu sebagai konfederasi ke periode sebelumnya ketika tokoh seperti Samuel de Champlain mengeksplorasi negara tersebut. Gambar-gambar yang ditampilkan terdiri dari: *rare originals* (dokumen-dokumen langka, artefak dan karya seni); *mythologies* (gambar-gambar fiktif dan stereotip); branding (menjelajahi upaya historis untuk mengembangkan simbol Kanada, survey tanahnya, dan inventarisasi warganya); dan *values* (hal-hal yang membuat Kanada unik, misalnya: piagam hak dan kebebasan, multikulturalisme dan keragaman, pemeliharaan perdamaian, serta bilingualisme).

Saat anda berjalan melewati pintu 395 Wellington Street di Ottawa, anda

akan disambut dengan pemandangan menyolok dari berang-berang, daun maple, dan bahkan sebuah pondok kayu. Di antara simbol-simbol ini, anda



Mythologies

Atlas Imigasi “Kanada Barat”
Di balik tirai gabah emas, kita melihat visi Kanada yang ideal dan tidak akurat. Mitologi itu biasa terjadi dalam iklan imigrasi. Pada saat itu, barat tidak sehebat atau berkembang seperti yang ditunjukkan di sini.

Pemerintah Kanada, Departemen Imigrasi,
± 1923
Reproduksi. *Library and Archives Canada*,
e000007930

Sumber:

<http://www.bac-lac.gc.ca/eng/about-us/events/exhibit-Canada-150/Pages/exhibit-Canada-150.aspx>



Sumber: <https://www.bac-lac.gc.ca/eng/about-us/events/Pages/2017/launch-exhibition-canada-150.aspx>

akan bisa mengagumi barang khas ikonik dan sejarah Kanada lainnya.

Trek *snowshoe* kemudian akan membawa anda ke *Morley Callaghan Room* di mana anda akan menemukan tampilan menarik dari artistik artistik asli dan artistik. Item penting termasuk buku dan peta kulit asli yang diikat dari “*Les voyages du sieur de Champlain*”, oleh Samuel de Champlain (1613); satu-satunya jurnal yang masih ada dari pelopor Catharine Parr Traill (1837); potret diri oleh seniman Inuit Andrew Qappik (2003); Kelompok Tujuh Kartu Natal (1926 sampai 1945); dan lukisan cat air asli oleh Susanna Moodie (1870).

Arsip Nasional Kanada, yang didirikan pada tahun 1872, sebelumnya bernama *Public Archives of Canada* sampai tahun 1987, bergabung dengan Perpustakaan Nasional Kanada pada tahun 2004 menjadi *Library and Archives Canada* (CAD). Khazanah arsipnya sekarang terdiri dari 250 kilometer lari arsip tekstual pemerintah



Branding

Mengukur ketebalan es. Kanada mengklaim kedaulatan wilayah Arktiknya pada tahun 1904: undang-undang tersebut bergerak ke utara dan surveyor mengatalogkan tanah tersebut. Tindakan ini memperkuat gagasan lama tentang identitas. Ini mendefinisikan Kanada, lagi-lagi, sebagai negara utara.

Albert Peter Low untuk Survei Geologi Kanada, ± 1903-1904
Reproduksi. Library and Archives Canada, a053575

Sumber: <http://www.bac-lac.gc.ca/eng/about-us/events/exhibit-Canada-150/Pages/exhibit-Canada-150.aspx>

dan swasta, seperti salinan arsip era rezim Kolonial Perancis dan Inggris di Kanada, file dari semua kementerian dan lembaga pemerintah; lebih dari 3 juta arsip gambar arsitektural, gambar rancangan dan peta (beberapa berasal dari awal abad ke-16); 5 miliar

megabytes informasi dalam format elektronik; lebih dari 900.000 film (termasuk film pendek dan panjang, film dokumenter dan film bisu tahun 1897); lebih kurang 550.000 item koleksi terbesar lembaran musik Kanada di dunia (dokumentasi yang berkaitan dengan musik Kanada, serta rekaman pada disk dan rekaman semua format, termasuk piano *rolls*, *reels* dan *spools*, serta kaset delapan *track*), arsip pos Kanada; arsip tekstual tentang berbagai individu dan kelompok yang berkontribusi pada perkembangan budaya, sosial, ekonomi, dan politik Kanada; surat kabar nasional dari seluruh Kanada (dari harian hingga surat kabar mahasiswa, dan majalah Aborigin sampai buletin komunitas etnis). Sebagai bagian dari *Library and Archives Canada*, Arsip Nasional terus melestarikan khazanah arsip serta menyediakannya agar dapat diakses oleh peneliti dari Kanada dan luar negeri.

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
5. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
6. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
7. Arsip statis adalah arsip yang dibasiskan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna dan harus tetap disimpan dan tidak dapat dipergunakan untuk keperluan yang tidak mendesak.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, arsip sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara;
- b. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamikan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal;
- c. bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan lembaga negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta lembaga kearsipan

- Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:
- a. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;
 - b. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
 - c. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemenuhan arsip sosial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
 - e. mendinamikan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
 - f. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai kesatuan yang utuh, lengkap, dan tidak terpisahkan, serta keamanan sebagai jaminan kehidupan bukti pertanggungjawaban dalam bernegara; berbangsa, dan bernegara;
 - g. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai jaminan dan jati diri bangsa; dan
 - h. meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal.

SEWINDU UNDANG-UNDANG KEARSIPAN (CATATAN SINGKAT DELAPAN TAHUN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN NASIONAL)

Tepat 23 Oktober 2017 genap delapan tahun sudah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan telah diberlakukan. Sewindu sudah penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan melalui perangkat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, pada 2017 ini, terlihat dipotret secara umum penyelenggaraan kearsipan telah memberikan “rule of law” bagi negara Indonesia dalam melaksanakan kebijakan dan kepatuhan penyelenggaraan kearsipan di republik ini.

Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang (UU) kearsipan yang telah berjalan lebih dari 8 (delapan) tahun melibatkan banyak stakeholders baik di pusat maupun di daerah. UU ini menetapkan suatu sistem kearsipan nasional melalui penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan

pengelolaan arsip yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta lembaga kearsipan.

Dengan adanya UU ini diharapkan terjadi koordinasi antara pelaksana kearsipan dan tercipta integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik pemerintahan pusat maupun daerah dalam menyelenggarakan kearsipan yang komprehensif dan terpadu melalui Sistem Kearsipan Nasional. Untuk kedepannya, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan diharapkan dapat menjamin konsistensi dan optimalisasi dalam perwujudan

arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa, dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konstruksi hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan tidak terlepas pada peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan amanat pelaksanaan lain yang lebih teknis melalui Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Dalam hal ini terdapat 4 (empat) amanat pembentukan Peraturan Kepala ANRI yang didelegasikan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan 19 (sembilan belas) amanat yang didelegasikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dengan total 23 pembentukan Peraturan Kepala ANRI sebagai acuan teknis berjalannya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah bidang kearsipan. Ketentuan tersebut menjadi bertambah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dengan konsekuensi dalam UU Pemerintahan Daerah tersebut menyatakan bahwa pembentukan NSPK merupakan tanggung jawab dari Lembaga Negara yang melaksanakan pembagian urusan pemerintahan bidang kearsipan yang dibagi kepada Pemerintahan Daerah baik Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Eksistensi UU Kearsipan dalam sebuah kajian ilmiah telah memenuhi penerapan asas materi muatan yang tepat dalam pembentukan UU, hal ini berdasarkan buku yang ditulis oleh Dr. Bayu Dwi Anggono, SH, MH yang berjudul Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia yang menyimpulkan bahwa selama periode 1999 sampai dengan 2012 telah dibentuk 428 (empat ratus dua puluh delapan) UU dan sebanyak 14 (empat belas) UU diindikasikan tidak memenuhi butir-butir materi muatan UU atau dengan kata lain bukan materi yang seharusnya diatur dengan UU. Dari ke 14 (empat belas) daftar UU tersebut, tidak terdapat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

UU Kearsipan yang dalam konsiderannya memberikan peran kepada negara dalam mengelola dan menyelamatkan arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta

sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan lebih jauh mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan pemahaman kepada pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kontribusi nyata penyelenggaraan kearsipan nasional.

Sewindu implementasi UU kearsipan, tentu masih perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya untuk kemudian diketahui kendala dan hambatan. Menurut teori Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum sesungguhnya dibangun oleh tiga komponen, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Atrikel singkat ini akan membahas UU Kearsipan dalam ketiga komponen hukum tersebut.

Substansi Hukum (*legal substance*)

Dalam UU kearsipan, norma yang terkandung merupakan penjabaran dari kewajiban dan wewenang yang diberikan kepada para pemangku kepentingan. Substansi hukum kearsipan termasuk pula aturan teknis yang tertuang dalam Peraturan Kepala ANRI.

Peraturan Kepala ANRI tersebut merupakan acuan bagi lembaga pencipta arsip (baik di pusat dan di daerah) dan lembaga kearsipan dalam rangka melakukan penetapan kebijakan di lingkup internalnya masing-masing. Namun demikian masih terdapat 2 (dua) amanat Peraturan Kepala ANRI yang harus

segera ditetapkan yaitu pengaturan mengenai tata cara pengujian dalam rangka autentikasi arsip statis dan pemberkasan arsip aktif, pembuatan daftar arsip aktif, penataan arsip inaktif, pembuatan daftar arsip inaktif. Terkait dengan eksistensi lampiran X tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu segera ditetapkan NSPK mengenai penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan.

Dari sisi substansi hukum lainnya, artikel dengan judul Aspek Hukum Pidana tentang Pengaturan Kearsipan oleh Prof. Romli Artasasmitha patut dicermati bahwa UU Kearsipan memerlukan perubahan cara berpikir (*mindset*) tentang ketelitian dan kehati-hatian serta keahlian yang memadai dalam bidang sejarah, administrasi kearsipan dan filosofi mengenai arah dan tujuan yang hendak dicapai baik dari aspek efisiensi pemerintahan, aspek keamanan, ketertiban dan kerahasiaan dan ketahanan nasional serta aspek budaya bangsa.

Khusus terkait dengan ketentuan pidana dalam UU Kearsipan seharusnya tetap membedakan secara tegas perbuatan administratif yang merupakan kelalaian (*culpa*) dan yang merupakan kesengajaan (*dolus*). Rimmelink (2003) menegaskan tidak ada definisi untuk pengertian istilah 'sengaja' (*dolus*) dan juga untuk pengertian "*culpa*". Baik *dolus* maupun harus terkait dengan unsur-unsur lainnya dalam suatu delik tertentu barulah rumusan suatu ketentuan pidana memiliki arti terkait dapat dipidananya suatu perbuatan.

Sisi substansi lain dari keberadaan UU Kearsipan adalah pengaturan tentang perusahaan yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Hal ini memberikan efek terhadap dualisme pengaturan bidang kearsipan terhadap perusahaan yang tentunya perlu dilakukan kajian mendalam mengenai hal ini.

Dualisme pengaturan terjadi pula pada acuan terhadap tata naskah dinas, walaupun telah ada Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2017, tetapi kehadiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah masih menjadi masalah yang perlu didiskusikan dan dibahas bersama untuk dicari jalan keluarnya.

Struktur hukum (*legal structure*)

Komponen ini menunjuk adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga ini antara lain adalah Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Lembaga Pengadilan dan lembaga penegak hukum lainnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan masyarakat untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum itu seharusnya bekerja (*law in the books*).

Dalam kerangka penegakkan hukum kearsipan, UU Kearsipan tidak memiliki komponen penegak hukum yang diwadahi oleh PPNS (Penyidik

Pegawai Negeri Sipil yang merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Secara definisi PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup UU yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Beberapa contoh PPNS pada beberapa instansi/lembaga atau badan pemerintah adalah 1) PPNS pada Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan di tingkat Provinsi yang berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya. 2) PPNS pada Kementerian Kehutanan, yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. 3) PPNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merupakan nilai dan sikap daripada fungsionaris yang bekerja dalam lingkungan pelaksanaan dan penegakan hukum. Komponen nilai dan sikap ini akan memberi pemahaman tentang bekerjanya suatu sistem hukum di dalam kenyataan (*law in action*). Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat

kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Dalam hal UU kearsipan objek hukum kearsipan adalah lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan sebagai pencipta dan Lembaga Kearsipan yang terdiri atas ANRI, Arsip Daerah Provinsi, Arsip Daerah Kabupaten/Kota dan Arsip Perguruan Tinggi.

Dalam hal budaya hukum di bidang kearsipan sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum di dalam masyarakat. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat dalam hal ini para stakeholder yang sejalan dan mencerminkan kehendak UU kearsipan. Jika dewasa ini ada adagium yang berkembang bahwa dari 34 (tiga puluh empat) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi atau kabupaten/kota, maka urusan kearsipan menjadi urusan ke 35 (tiga puluh lima) atau ada ungkapan bahwa arsip dipandang sebelah mata, hal ini merupakan cermin budaya hukum kearsipan yang masih rendah. Padahal kearsipan merupakan urusan wajib yang bukan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Budaya hukum bisa terbangun jika ada keteladanan dari para pemangku kebijakan khususnya ANRI dalam penyelenggaraan kearsipan. ANRI harus mampu menjadi contoh bagi pencipta arsip atau lembaga kearsipan lain, untuk itu mari bersama membangun budaya kearsipan demi tegaknya hukum kearsipan. (RD)

Rini Rusyeni

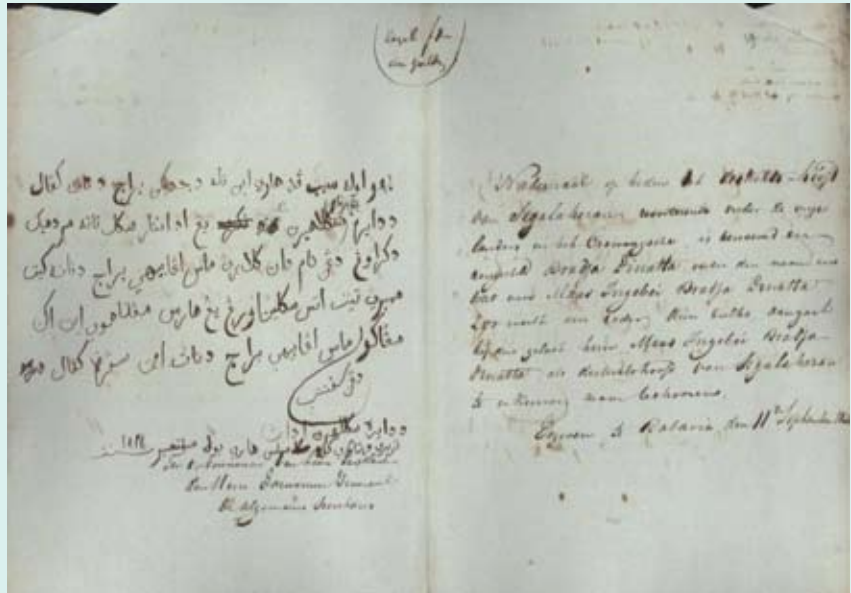
PERAN BAHASA PADA ERA KOLONIAL

“Jika kamu berbicara dengan seseorang menggunakan bahasa yang ia pahami, maka ia akan menyimpannya di kepalanya, tapi jika kamu berbicara menggunakan bahasa yang ia gunakan, maka ia akan menyimpannya di hatinya” (Nelson Mandela).

P Kutipan di atas memiliki makna yang dalam yaitu dengan bahasa maka seseorang akan dapat mempererat hubungan dengan orang lain atau bahkan dapat meyakinkan orang tersebut untuk mengikuti dan meyakini pendapat yang diberikan oleh seseorang tadi. Namun, apakah peranan bahasa hanya untuk itu? selain bahasa digunakan sebagai kawan untuk meyakinkan orang lain agar mengikuti kita, bahasa juga dapat menjadi lawan yang dapat menghancurkan kita apabila kita tidak berhati-hati menggunakannya. Tulisan ini akan menguraikan lebih jauh tentang peranan bahasa dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia pada masa kolonial Belanda dan penjajahan Jepang dalam rekaman arsip yang dibuat pada masa tersebut.

Bahasa Melayu dan Belanda

Sejarah telah membuktikan betapa peranan bahasa sangat besar dalam menaklukkan sebuah bangsa dan negara. Contoh nyata penggunaan bahasa untuk menaklukkan sebuah bangsa adalah yang pernah dilakukan oleh bangsa penjajah Belanda ketika menguasai Indonesia pada masa kolonial. Pemerintah Kolonial Belanda di bawah Gubernur Jenderal Godert van der Capellen (1816-26)



Surat Keputusan Gubernur Jenderal untuk Pengangkatan Kepala Daerah Karawang (ANRI, Jakarta, *Inlandsche Zaken archives*, no. 119. 19, tanggal 11 September, 1820.

menekankan pendekatan yang lebih erat kepada kaum pribumi dengan cara mengangkat kaum priyayi sebagai perwakilan pemerintah kolonial. Dalam melaksanakan kebijakan ini para pejabat pemerintah kolonial, yang mayoritas merupakan orang-orang Eropa, diharuskan untuk melakukan komunikasi langsung dengan menggunakan bahasa pribumi kepada para priyayi tersebut. Pada masa itu terdapat dua bahasa pribumi yang mayoritas digunakan oleh kaum priyayi, yaitu: bahasa Melayu dan bahasa Jawa. Para pejabat pemerintah kolonial diharuskan untuk menguasai kedua bahasa tersebut baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Untuk meningkatkan penguasaan bahasa

pribumi di antara para pejabat pemerintah kolonial, pemerintah membuka sekolah khusus di Semarang (1818) dan Surakarta (1832). Para staf dan pegawai pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu harus dapat menguasai bahasa pribumi (Melayu dan Jawa) baik secara lisan maupun tulisan.

Penggunaan bahasa pribumi oleh Belanda nampak seperti pada gambar 1 di atas. Dalam rangka melakukan pendekatan dengan masyarakat pribumi di Hindia Belanda (sekarang Indonesia), pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Belanda-Melayu, dan Belanda-Jawa. Surat Keputusan

VARIA

ini dikeluarkan sebagai alat Belanda untuk meyakinkan para priyayi bahwa dengan menjadi bawahan mereka sang priyayi tersebut akan diberikan jabatan, kekuasaan wilayah, dan penghormatan dari Belanda sebagai seorang kepala daerah. Bagi Belanda Surat Keputusan ini juga berperan sebagai alat bukti bahwa seluruh masyarakat dan wilayah Karawang menjadi daerah kekuasaan Belanda. Tanpa berperang, cukup dengan mengeluarkan surat keputusan berbahasa Melayu tersebut, Belanda berhasil menguasai wilayah Karawang dan sekitarnya. Dengan penguasaan bahasa tersebut, Belanda juga berhasil menguasai wilayah lain di seluruh wilayah Hindia Belanda pada masa itu. Dalam melaksanakan kebijakan bahasa ini, Belanda tidak memperkenalkan secara serius pelajaran bahasa Belanda kepada para pribumi. Pada masa ini bahasa Belanda merupakan bahasa elit yang hanya digunakan oleh para pejabat Eropa dan beberapa petinggi pribumi yang memiliki hubungan erat dengan pejabat pemerintah kolonial.

Bahasa Indonesia dan Jepang

Memasuki tahun 1942, Jepang masuk ke Hindia Belanda dan mengusir pemerintah kolonial Belanda. Pada masa ini Jepang juga mengeluarkan kebijakan mengenai penggunaan bahasa karena Jepang sangat menyadari bahwa pada masa Belanda berkuasa, kemampuan berbahasa adalah jalan utama untuk mencapai kekuasaan yang utuh di Hindia Belanda. Namun, terdapat sedikit perubahan kebijakan mengenai bahasa pada saat Jepang berkuasa di wilayah ini. Pada masa ini bahasa melayu tidak lagi digunakan oleh masyarakat Indonesia. Sumpah

Teks Belanda	Teks Melayu
Nademaal op heden tot district hoofd van Pamanukan in de Residensi Crawang is benoemd aangesteld Raden Wangsa Diridja, zo is het een ieder dien zulks aangaan bij deze gelasten hen Raden Wangsa Diridja als district hoofd van Pamanukan te erkennen van behoren	Bahwa pada sekarang ini diberi nama dan pangkat Kepala Daerah dari Pamanukan yang di dalam Residensi Karawang kepada Raden Wangsa Diridja dan sebab itu maka diperintah kepada segala orang yang harus mengetahui dia dan menghormati dia sebagai kepala lurah di Pamanukan.
Governor Generaal	Gubernur Jenderal

Tabel 1: Transliterasi Surat Keputusan Gubernur Jenderal untuk Pengangkatan Kepala Daerah Karawang (Gambar 1).

Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 menjadi titik tolak penggunaan bahasa Indonesia di antara para pemuda dan kaum terpelajar walaupun pada masa itu bahasa Indonesia masih belum menyebar luas ke seluruh wilayah. Penggunaan bahasa Indonesia ini baru dapat berkembang pesat pada saat Jepang menjajah Indonesia. Setelah Jepang menguasai Hindia Belanda, semua hal yang berbau Belanda dihilangkan, termasuk juga penggunaan nama negara menjadi Indonesia. Bahasa baku untuk masyarakat Indonesia pun hanya diizinkan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Militer Jepang, yang merupakan pimpinan tertinggi di Indonesia pada masa itu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang untuk menekan penggunaan bahasa Belanda, yang pada masa itu diajarkan sebagai bahasa utama di kota-kota besar, sekolah dan kantor-kantor pemerintah. Jepang melarang semua bentuk komunikasi dengan menggunakan bahasa Belanda dan menggantinya dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Sebagaimana tertulis dalam Almanak Asia Raya 2603:

1. "Semua bangsa pun pula bagi bangsa Belanda sendiri dilarang keras berbicara atau menulis dalam bahasa belanda

2. Perkataan-perkataan dinas yang dipakai di kantor harus pula ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Nippon

3. Merk toko-toko, nama-nama perkumpulan yang masih tertulis dalam bahasa Belanda harus dihilangkan

Selanjutnya jika setelah maklumat ini diumumkan, masih terdapat juga orang-orang yang memakai bahasa yang terlarang, maka mereka dianggap pembantu Belanda dan disitu pihak polisi harus bertindak keras terhadap mereka. (Sumber: Perpustakaan Leiden University)

Kebijakan ini berbeda dengan apa yang terjadi pada masa kolonial Belanda, dimana penggunaan bahasa pribumi (Melayu dan Jawa) hanya untuk komunikasi antara pejabat Pemerintah dengan para priyayi dan pemerintah Belanda tidak secara spesifik memberikan kebijakan mengenai penggunaan bahasa di antara para pribumi pada masa itu.

Kebijakan mengenai bahasa pada penjajahan Jepang memiliki dampak yang sangat positif bagi bangsa Indonesia. Penyebaran bahasa Indonesia ke seluruh wilayah nusantara, yang awalnya merupakan alat propaganda bagi Jepang untuk membuat masyarakat Indonesia tunduk dan percaya kepada Jepang,

tetapi malah menyatukan masyarakat Indonesia yang pada masa penjajahan Belanda masih terpecah belah.

Penggunaan bahasa Indonesia secara meluas di wilayah Indonesia, tidak hanya membangkitkan rasa persatuan tetapi juga menciptakan rasa kebersamaan di seluruh lapisan masyarakat. Seluruh masyarakat yang sebelumnya terpecah-pecah dalam beberapa kelompok yang menggunakan beberapa bahasa berbeda seperti bahasa Belanda, bahasa daerah (Melayu dan Jawa), pada masa ini semua menggunakan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia.

Bagi Jepang, walaupun sebenarnya kebijakan ini sangat berhasil karena mereka berhasil menghilangkan pengaruh bahasa Belanda dari masyarakat Indonesia, namun hal ini justru merupakan sebuah kebijakan yang berbuah pada kegagalan karena seiring dengan meluasnya penggunaan bahasa Indonesia di seluruh nusantara, keinginan bangsa Indonesia menjadi lebih kuat untuk dapat merdeka dan bebas dari penjajahan.

Hal ini tentu merugikan Jepang, yang pada saat itu sangat membutuhkan seluruh sumberdaya yang ada di Indonesia untuk mendukung Jepang dalam perang Pasifik. Pada akhirnya kebijakan bahasa yang dikeluarkan oleh Jepang tersebut berdampak pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia merdeka, Jepang harus angkat kaki dari Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia.

Kehadiran bahasa tak pelak menjadi alat yang sangat penting dalam sejarah perjalanan semua

bangsa di dunia. Bahasa akan menjadi kawan atau lawan tergantung dari cara bangsa tersebut menghayati dan menggunakannya. Belanda menggunakan bahasa pribumi hanya untuk menggunakannya kepada sekelompok priyayi yang mereka percayai sebagai alat kekuasaan mereka. Dengan bahasa Mereka berhasil memecah belah masyarakat Indonesia dengan menanam kepercayaan bahwa bangsa Belanda memiliki kedudukan lebih tinggi dari masyarakat di Hindia Belanda.

Sedangkan Jepang menggunakan bahasa untuk menunjukkan rasa kebersamaan dan persatuan sebagai

sesama bangsa di Asia. Namun, nampaknya motivasi yang diberikan oleh bangsa Jepang tersebut malah menginspirasi bangsa Indonesia untuk dapat bersatu, tumbuh bersama dan berkembang menjadi bangsa yang merdeka. Bahasa bisa menjadi kawan, lawan dan bahkan bisa menjadi sumber kekuatan yang tak terpatahkan oleh apapun. Seperti pepatah mengatakan “bahasa adalah darah yang mengalir dalam jiwa, masuk ke dalam pemikiran dan keluar sebagai sumber kekuatan untuk tumbuh berkembang” (Oliver Wendell Holmes).



Poster Propaganda Jepang (Sumber: Harian Sejarah)

RIRIN ASRIANI

WAJAH INDONESIA DI KAMPUNG KUBU GADANG KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT



Pasang Kuda-kuda saat memulai Silek Lanyah

Aspek Kehidupan sehari-hari yang kerap diabaikan dapat mempengaruhi sejarah sebuah daerah. Di Jerman Alf ducke (1995) pada tahun 1980 an mengemukakan konsep alltags geschichte (sejarah sehari-hari) menekankan pengalaman pekerjaan, kehidupan masyarakat di sebuah daerah. Berdasarkan pendapat Alf ducke maka kami ingin menyajikan arsip kehidupan sehari-hari yang bertujuan untuk mengetahui struktur, pola dan proses kehidupan warga.

Di Minangkabau terdapat banyak jenis pencak silat, seperti Silat Kumango, Silat Harimau, Silat Tuo Gunuang, dan lain-lain. Silat, yang dalam bahasa Minang disebut "silek", berkembang ke seluruh penjuru Sumatera Barat. Tiap daerah punya

aliran sendiri. Desa Kubu Gadang di Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, mempunyai silek yang di beri nama Silek Lanyah.

Kubu Gadang terletak di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Sebuah kampung yang berada di lembah di antara gunung Marapi, gunung Singgalang, gunung Tandikat, dan bukit Barisan. Menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam dengan mobil dari kota Padang Ibu Kota Sumatera Barat.

Walaupun belum begitu dikenal justru Kampung Kubu Gadang ibarat sebuah permata, harta karun yang tersimpan di Wilayah Nusantara Indonesia, Ketika kita berkunjung kesana, tidak ada perasaan lain selain kebahagiaan karena keindahan

alam dan suasana hangat dari kebersamaan masyarakat disana. Walaupun belum begitu dikenal justru Kampung Kubu Gadang ibarat sebuah permata, harta karun yang tersimpan di Wilayah Nusantara Indonesia, Ketika kita berkunjung kesana, tidak ada perasaan lain selain kebahagiaan karena keindahan alam dan suasana hangat dari kebersamaan masyarakat disana.

Silek Lanyah Yang secara harfiah berarti silat di atas tanah basah atau lumpur. Di Kubu Gadang, yang kini merintis diri sebagai Desa Wisata sejak penetapannya tahun 2014 silam, Silek Lanyah dilakukan di petak sawah yang basah. Lahannya berpindah-pindah, tergantung petakan mana yang tersedia. Saat saya dan kawan-kawan berkunjung, ia dipertunjukkan di sawah tepat di pinggir jalan.



atraksi para pesilat

Sebenarnya, Silek Lanyah merupakan atraksi silat yang dikembangkan dari Silek Tuo Gunuang yang diwariskan dari masa ke masa di Desa Kubu Gadang. Ia dilahirkan kembali bertepatan dengan gelar baru yang disandang Kubu Gadang. Maka, penggagas silat ini kebanyakan anak muda, dari usia tujuh hingga lima belas tahun. Jumlah mereka belum banyak—tak sampai sepuluh, jadwal latihan pun tak tentu, tapi kesungguhan mereka melestarikan tradisi tak bisa dianggap sepele.

Kalau kita datang ke Desa Kubu Gadang sesuai tradisi di sana pengunjung yang memakai rok atau celana pendek akan dipinjamkan kain secara gratis. Gendang ditabuh saat atraksi akan dimulai dan diiringi oleh tiupan serunai kemudian tiga pasang pesilat turun ke sawah dengan kudakudanya.

Pesilat-pesilat muda ini jelas terlihat masih awam. Tapi ekspresi mereka memancarkan gelora. Anda pasti akan terpesona saat menyaksikan jurus bantingan dan air yang berkecipak ke mana-mana. Sesekali mereka beradu jurus. Sesekali pula mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Silat ini bagaikan tarian jebakan terkadang menawan, terkadang menakutkan.



menu makanan Baradaik di Kubu Gadang

Selain pertunjukan Silek Lanyah, kunjungan ke Kubu Gadang juga dilengkapi wisata Kuliner. Yang dinamakan Makan baradaik. Prosesi makan adat yang biasanya disertai sambutan dari tuan rumah sebelum dan sesudah makan. Hidangan juga diletakkan sesuai aturan, dengan nampan besar berisi piring-piring lauk. Biasanya di isi dengan lauk atau samba dendeng batokok, gulai telur puyuh, sayur anyang (urap) dan karupuak ubi balado. Sederhana memang, namun menyantapnya bersama-sama di lesehan bambu sungguh nikmat.

Inilah Kampung Kubu gadang atau ikon wisata edukasi, seni, budaya dan wajah Indonesia di Sumatera Barat tepatnya di Kota Padang Panjang, mulai dari kebersahajaan masyarakat sehari-hari, penampilan kesenian, tempat bersejarah dan pemandangan alam yang masih asri, harus kita sejarahkan melalui dunia kearsipan dengan tema wajah Indonesia ada di kubu gadang Kota Padang Panjang Propinsi Sumatera Barat.

Hasna Fuadilla H

PENCARIAN

Hamparan biru itu begitu luas, seolah tanpa batas, dan aku hanya mampu menatap sendu terhadapnya. Hari ini telah kubulatkan tekadku untuk menelusuri jejak leluhurku, seperti pesan Bapak di tengah sakitnya. “Tolong sampaikan rindu Bapak pada tanah Jawa. Pada sanak saudara kita yang telah terpencar. Semoga Bapak masih memiliki umur untuk bisa bertemu mereka...”

Kata-kata Bapak terus terngiang di kepalaku. Hal itu pulalah yang menjadi alasan untuk memberanikan diri keluar dari tanah Kalimantan, tanah kelahiranku, dan satu-satunya tanah yang kukenal selama ini. Terlebih mengingat keinginan Bapak yang begitu kuat untuk menghampiri kembali tanah leluhurnya yang telah ia tinggalkan.

Laut di depanku tak henti melahirkan ombak yang saling mengejar, seolah siap mengantarku menuju tanah seberang. Sementara angin asin tak henti membelai rambutku. Dengan erat, kugengam secarik kertas pemberian Bapak yang berisikan jalur-jalur yang harus kutempuh untuk mencapai tanah leluhur kami. Akan kuberikan pada Bapak hadiah terbesar untuknya: pertemuan dengan masa lalunya.

Bapak lahir dan dibesarkan di sebuah kabupaten di pesisir utara Jawa, di sebuah desa nelayan yang katanya dulu terkenal sebagai salah

satu penghasil ikan terbesar di kabupaten. Namun sayang, nasib baik belum berpihak pada Bapak. Sebesar-besarnya hasil laut yang didapatkan, tetap saja belum cukup menjadikan keluarga Bapak makmur. Terlebih dengan banyaknya mulut yang harus diberi makan. Bahkan hingga Bapak mencari tambahan penghasilan dengan menjadi buruh tani, tetap saja taraf hidup keluarga tidak banyak meningkat.

Ketika pemerintah menawarkan program transmigrasi sekitar tahun 70-an, Bapak menjadi salah satu orang yang mendaftar. Asanya tak pernah patah, untuk memberikan penghidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Maka, berangkatlah Bapak bersama Ibu dan kakak-kakakku ke tanah seberang, tanah Kalimantan. Sebuah tempat yang cuma pernah Bapak dengar, tapi tak pernah terbayangkan rupa dan wajahnya. Di sanalah aku lahir dan menjejak satu-satunya tanah yang kukenal, hingga saat ini.

Senja itu, tibalah aku pada tanah Jawa utara, pada tanah yang begitu diimpikan banyak orang, termasuk Bapak. Pun, tak pernah terbayangkan pada benakku bahwa aku akan tiba pada tanah ini, untuk memenuhi janjiku pada Bapak, untuk menemukan kembali desa kelahirannya.

Setelah melewati malam di sebuah penginapan, maka pagi ini kuputuskan untuk langsung mencari desa kelahiran Bapak. Desa Kulak namanya. Kata Bapak, aku akan mudah menemukan

desa tersebut, terlebih dengan statusnya yang merupakan salah satu penghasil ikan besar yang telah dilengkapi dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan letaknya tidak terlalu jauh dari pusat kabupaten.

Tanpa membuang waktu, aku pun berangkat. Dengan bantuan penjaga penginapan, tak sulit bagiku untuk menemukan Kantor Kecamatan Awur, tempat Desa Kulak berada. Sayangnya, kantor kecamatan terlihat sepi saat aku tiba. Seseorang lalu memberitahuku bahwa orang-orang di kantor kecamatan sedang pergi ke kantor bupati karena ada suatu kegiatan disana.

“Bapak kerja di sini juga?” Tanyaku basa-basi pada bapak yang tadi memberitahuku mengenai kemana orang-orang kantor kecamatan pergi.

“Iya Mas, tapi saya baru saja pensiun. Ini saya kemari untuk mengembalikan beberapa berkas yang tertinggal di rumah saya.” Terangnya. Aku mengangguk singkat, dan bingung untuk bertanya apa lagi.

“Mas kemari ada perlu apa?” Tanya bapak tersebut memecah keheningan.

“Saya mau mencari desa kelahiran Bapak saya, Pak. Bapak saya dulu berasal dari sini, tapi kemudian ikut program transmigrasi pemerintah ke Kalimantan. Beliau meminta saya untuk mencari kampung halamannya, sekaligus mencari sanak saudara yang masih ada.” Jelasku.

“Kalau boleh tahu, memang nama desanya apa?” Tanyanya kembali.

“Desa Kulak, Pak.” Kataku cepat.

Mendengar jawabanku, tiba-tiba Bapak itu terdiam beberapa saat. “Kalau Mas benar-benar ingin tahu, saya bisa mengantarkan Mas ke Desa Kulak.” Ujar Bapak tersebut. Aku pun segera mengiyakan ajakannya.

“Oh iya, nama Bapak siapa?”

“Panggil saja Pak Mardi.”

Butiran pasir terasa halus membelai kakiku. Hanya bentangan laut biru keabuan yang kulihat di depanku. Di situ Desa Kulak berada, begitulah yang dikatakan Pak Mardi. Ternyata, sejak dahulu telah terjadi abrasi dari perairan Laut Jawa di daratan Desa Kulak. Namun, abrasi tersebut baru mencapai puncaknya pada tahun 1990an. Hingga akhirnya hampir seluruh desa tenggelam dalam air, dan secara tidak langsung menggeser garis pantai.

Kini, tak ada lagi desa nelayan yang bernama Desa Kulak. Penduduknya sudah terpencar. Selain ikut program transmigrasi seperti Bapak, ada pula yang mencoba mencari peruntungan ke kota provinsi, bahkan ibu kota. Tidak banyak yang tetap bertahan sebagai nelayan, sehingga cerita tentang kebesaran Desa Kulak semakin meredup, dan menjadi sejarah yang hanya dikenang oleh orang-orang yang mengingatnya.

“Mengapa Desa Kulak bisa sampai tenggelam, Pak?” Tanyaku lagi, seakan-akan belum mampu menerima kenyataan yang terbentang dihadapanku.

“Dulu Desa Kulak sungguh ramai. Baik dengan aktivitas nelayan, bakul, maupun tengkulak. Aktivitas tambak juga banyak. Akan tetapi, sayangnya semua itu musnah, karena adanya abrasi. Bahkan hingga kini, abrasi masih terus menggerus banyak pantai.” Ujar Pak Mardi.

Aku tertegun mendengar jawaban Pak Mardi. Tak pernah kubayangkan

kalau aku akan menemukan Desa Kulak dalam keadaan musnah ditelan air. Lalu, bagaimana aku membuktikan janjiku pada Bapak?

“Apa yang menjadi penyebab abrasi ini Pak?” Tanyaku sedih.

“Ada yang bilang, ini semua terjadi karena kita sebagai manusia tidak menghargai alam. Tanah dan air kita telah memberikan kekayaan alam yang luar biasa, tetapi kita terlalu rakus sehingga mengeksploitasinya besar-besaran, tanpa memikirkan pelestariannya.” Jelas Pak Mardi. Tiba-tiba ia terdiam. Lalu menunjuk ke arah tengah laut.

“Kamu lihat sisa tiang itu? Itu merupakan sisa dari gapura Desa Kulak. Tidak jauh dari tiang itu, terdapat sisa tembok masjid. Hanya itu yang tersisa dari Desa Kulak.”

Mataku mengikuti arah jari Pak Mardi, dan berhasil menemukan reruntuhan yang Pak Mardi maksud. Tak lupa pula kuabadikan pemandangan tersebut dalam bentuk foto.

“Memangnya, eksploitasi apa saja yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga bisa menyebabkan abrasi?” Tanyaku lagi.

“Misalnya dengan adanya penambangan pasir, lalu penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan merusak terumbu karang. Banyak juga terjadi perusakan tanaman mangrove yang bisa mencegah abrasi. Sehingga abrasi yang sebelumnya telah terjadi perlahan, kemudian malah semakin membesar.” Terang Pak Mardi.

“Saya bingung bagaimana menjelaskan ini semua pada Bapak nanti.” Ujarku kebingungan.

Tampaknya, Pak Mardi iba melihatku yang tampak kebingungan dan bersedih. Ia kemudian mengajakku untuk mengunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip setempat. Di sana, kami berkunjung ke ruang layanan arsip untuk mendapatkan bukti mengenai musnahnya Desa Kulak. Dengan bantuan seorang arsiparis, kami melihat foto-foto Desa

Kulak dulu saat masih ada hingga saat Desa Kulak mulai musnah, serta laporan mengenai proses terjadinya abrasi. Kami juga diperbolehkan untuk melihat beberapa arsip peta yang dibuat pada selang tahun tertentu. Pada arsip peta tersebut, jelas sekali terlihat begitu besarnya pengaruh abrasi dalam mengubah garis pantai di pesisir utara Jawa.

“Wah, untung ada arsipnya ya. Kalau tidak, saya tidak akan pernah tahu bagaimana proses abrasi ini terjadi.” Kataku bersemangat.

“Iya Mas. Setiap kejadian atau peristiwa penting yang terjadi memang harus direkam dalam bentuk arsip. Hal ini berguna untuk mengetahui peristiwa yang terjadi pada masa lalu, serta sebagai referensi untuk di masa depan. Termasuk peristiwa abrasi yang terjadi pada Desa Kulak ini.” Jelas Arsiparis tersebut.

Keberadaan arsip-arsip tersebut membuatku takjub. Dengan adanya arsip, rasa-rasanya tak sulit bagiku untuk menjelaskan proses abrasi ini pada Bapak. Segera aku meminta kopian dari arsip-arsip tersebut untuk kubawa pulang dan ditunjukkan pada Bapak.

Atas bantuan Pak Mardi dan arsiparis tersebut, aku juga berhasil mendapatkan catatan mengenai relokasi penduduk yang menjadi korban abrasi. Dengan ini, tak sulit bagiku untuk mencari informasi mengenai sanak saudara yang sebelumnya tak pernah kukenal. Hingga nanti, akan kusampaikan rindu Bapak pada mereka, sehingga tuntaslah sudah janjiku pada Bapak.

Melihat keberadaan arsip-arsip tersebut, aku pun menyadari suatu hal. Desa Kulak memang sudah musnah, tetapi bukan berarti memori mengenai desa ini ikut menghilang. Bagiku, Desa Kulak tetaplah ada, sebagai kampung halaman Bapak beserta leluhurku.

ANRI TINGKATKAN MUTU PENGOLAHAN ARSIP STATIS ORPOL, ORMAS DAN PERSEORANGAN



Workshop Pengolahan Arsip Statis Organisasi Politik (Orpol), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Perseorangan dengan Tema "Peningkatan Mutu Pengolahan dan Aksesibilitas Arsip Statis melalui Workshop Pengolahan Arsip Statis Orpol, Ormas, dan Perseorangan"

Jakarta, ARSIP - (6/9) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melaksanakan Workshop Pengolahan Arsip Statis Organisasi Politik (Orpol), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dan Perseorangan dengan Tema "Peningkatan Mutu Pengolahan dan Aksesibilitas Arsip Statis melalui Workshop Pengolahan Arsip Statis Orpol, Ormas dan Perseorangan".

ANRI melaksanakan pengelolaan arsip statis agar dapat disajikan kepada masyarakat pengguna arsip. Arsip statis yang dikelola oleh ANRI merupakan identitas, memori kolektif bangsa, bahan penelitian,

pengembangan ilmu pengetahuan serta sumber informasi public. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pengelolaan arsip statis, khazanah arsip statis yang tersimpan di ANRI harus diolah dengan benar berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan sehingga dapat dikases dengan cepat, tepat, akurat dan lengkap. Dan tentunya akan lebih baik lagi bilamana dilakukan peningkatan kapabilitas arsiparis melalui seminar atau workshop. Salah satu kegiatan dalam upaya peningkatan mutu adalah dengan adanya workshop Pengolahan arsip organisasi politik, organisasi masyarakat dan perseorangan.

Acara Workshop tersebut dibagi menjadi 2 sesi diskusi dan tanya jawab, sesi pertama diskusi dengan moderator Retno Wulandari menghadirkan nara sumber Prof. Noerhadi Magetsari, YennyAbdurrahman Wahid, Widiyastuti Wakil Ketua Bidang Arsip dan Museum Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB), dan Direktur Pengolahan Arsip, Azmi. Sesi kedua adalah praktek cara pengolahan arsip organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan yang diikuti oleh seluruh peserta workshop. (Inh)

ANRI PERBAIKI ARSIP KERATON YOGYAKARTA

Yogyakarta, ARSIP - (15/9) Tim Restorasi Arsip ANRI melakukan Bimtek Restorasi Arsip Tekstual arsip warisan budaya Keraton Yogyakarta. Bimtek Restorasi Arsip Tekstual dihadiri oleh Perwakilan dari Keraton Yogyakarta yaitu Gusti Kanjeng Ratu Bendara dan Kabid Arsip Statis BPAD Daerah Istimewa Yogyakarta Trisundari. Bimtek disampaikan oleh Kasubdit Restorasi ANRI Dhani Sugiharto dan Tim Restorasi ANRI kepada abdi dalem keraton Ngayogyakarta Hadiningrat



Restorasi Arsip Keraton Yogyakarta

Melalui kegiatan edukasi, koordinasi dan perbaikan arsip diharapkan arsip tekstual yang dimiliki/ada di kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang kondisinya rusak

dapat segera di perbaiki. Sedangkan arsip yang kondisinya masih baik untuk dilakukan tindakan pencegahan agar tidak rusak sesuai dengan teori

dan ketentuan yang berlaku yang telah diberikan oleh para nara sumber. (Inh/humas)

ANRI RESTORASI ARSIP WARISAN BUDAYA MALUKU



Restorasi Arsip Budaya Maluku

Maluku, ARSIP - (18/9) Direktorat Preservasi ANRI melaksanakan program restorasi arsip warisan budaya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku. Program berlangsung dari tanggal 11 s.d 15 September 2017 dengan

kegiatan edukasi mengenai konsep dan teknik restorasi arsip tekstual serta pelaksanaan restorasi arsip statis (tekstual) yang disimpan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku. Program tersebut bertujuan agar Lembaga Kearsipan

Daerah mampu menginisiasi dan mengeksekusi program preservasi arsip secara mandiri, baik dari segi sarana dan prasarana hingga Sumber Daya Manusia.

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN CANANGKAN GNSTA



Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tanda tangani nota pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 20 September 2017.

Jakarta, **ARSIP** - (20/9) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) men-canangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA). Acara yang dihadiri Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan beserta Pimpinan Tinggi Madya ANRI. Pada kesempatan ini, dilaksanakan pula penyerahan arsip statis Kemenperin kepada ANRI.

Arsip Statis yang diserahkan ke ANRI sebanyak 7 box dan 127 berkas diantaranya perjanjian Indonesia dengan Jepang yang menjadi cikal bakal industri Inalum dan sebagian proyek asahan yang akan menorehkan

sejarah tentang peran serta Kemenperin dalam pembangunan bangsa Indonesia.

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, GNSTA ini diperlukan untuk peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan di seluruh unit kerja dan mampu mendukung program reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian, Airlangga memaparkan, untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, terpercaya dan akuntabel terutama pada unit kerja pusat dan daerah, maka seluruh pimpinan Kemenperin wajib melaksanakan GNSTA. "Dengan adanya komitmen

pimpinan Kementerian Perindustrian tentang pelaksanaan GNSTA, kami menginstruksikan agar seluruh pimpinan dan aparatur unit kerja segera melaksanakan program GNSTA," tutur Airlangga.

Menurut Mustari Irawan GNSTA Mendorong agar setiap instansi dan lembaga pusat dan daerah memiliki komitmen didalam menertibkan penyelenggaraan kearsipan, ada beberapa komponen yg harus dipegang dalam melaksanakan GNSTA yaitu : Tertib kebijakan, tertib kelembagaan, tertib sdm kearsipan, tertib pengelolaan arsip, tertib sarana dan prasarana, dan tertib pendanaan. (Inh/humas)

AUDIENSI KEPALA ANRI DENGAN SEKJEN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jakarta, ARSIP (19/9), Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI), Guntur Hamzah. Audiensi tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 11 Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, guna memperoleh masukan dan tanggapan mengenai tantangan kearsipan yang dihadapi oleh MK RI. Penggunaan aplikasi yang dikembangkan oleh ANRI, SIKD, telah terbukti memecahkan beberapa permasalahan yang dulu pernah dihadapi oleh lembaga pengawal konstitusi ini. Tantangan yang kemudian muncul yaitu mengenai pemberkasan perkara (minutasi). Minutasi perkara memakan waktu yang cukup panjang akan diefisienkan dengan menggunakan sistem elektronik yang dikenal dengan e-minutasi.

“Minutasi perkara yang memakan waktu banyak tentunya mempengaruhi kinerja Mahkamah Konstitusi. Dengan sistem e-minutasi yang awalnya bisa sampai satu bulan kita melakukan pemberkasan perkara bisa jadi lima belas hari” ujar Guntur pada kesempatan paparan di depan Kepala ANRI.

Tantangan minutasi tidak hanya dirasa dari sisi durasi waktu namun juga memiliki tantangan dari jumlah berkas perkara yang jumlahnya sangat banyak dimana akan berimbas pada tempat penyimpanan (storage). Masih dalam kesempatan yang sama, Sekjen MK RI pun mengemukakan wacana agar dibangunnya sebuah sistem untuk menghubungkan antara



Audiensi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI), Guntur Hamzah di Ruang Rapat Lantai 11 Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 19 September 2017

ANRI dengan MK RI terkait dengan arsip elektronik.

Menanggapi tantangan tersebut Kepala ANRI sangat mengapresiasi implementasi SIKD yang telah dimodifikasi oleh MK RI agar sesuai dengan kebutuhannya. “Modifikasi SIKD merupakan sebuah upaya adaptasi kearsipan terhadap kebutuhan instansi yang memang berbeda-beda. Dan saya mengapresiasi upaya tersebut” ungkap Mustari.

Menjawab mengenai hubungan ANRI dan MK RI, Mustari menyampaikan konektivitas tersebut dapat diakomodir dengan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang telah berjalan. Dimana MK RI dapat bergabung menjadi simpul dalam jaringan tersebut. Lebih lanjut Mustari mengatakan bahwa pengembangan JIKN merupakan sebuah cikal bakal

open government dimana peran masyarakat untuk dapat mengakses pengelolaan pemerintahan semakin besar.

Audiensi yang juga dihadiri oleh para pejabat Eselon II, III dan pejabat fungsional lainnya berlangsung dengan diskusi yang menarik mengenai pengelolaan arsip elektronik dimana diakhir diskusi Mustari menekankan mengenai pentingnya menjaga keamanan arsip elektronik. “Perlu diperhatikan kerentanan arsip elektronik terhadap keamanannya. Sehingga perlu dipikirkan perlunya membangun keamanan arsip elektronik mulai dari ketika arsip itu berproses sampai turun putusan hukumnya” pesan Mustari kepada seluruh peserta audiensi. (abm)

ANRI GELAR EKSPOSE INVENTARIS ARSIP PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK



Para Narasumber Ekspose Inventaris Arsip PT. Perusahaan Gas Negara (1950) 1961-2008 yang mengambil tema “Peningkatan Akses Arsip Perusahaan Pertambangan di ANRI melalui Pengolahan dan Penyusunan Inventaris Arsip”.

(Kiri-kanan: Direktur Pengolahan Azmi (narasumber), Retno Wulandari (moderator), Sejarawan Agus Setiawan (narasumber))

Jakarta, ARSIP (26/9) - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melaksanakan Ekspose Inventaris Arsip PT. Perusahaan Gas Negara (1950) 1961-2008 yang mengambil tema “Peningkatan Akses Arsip Perusahaan Pertambangan di ANRI melalui Pengolahan dan Penyusunan Inventaris Arsip”.

ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional wajib melakukan pengolahan arsip statis berskala nasional agar dapat diakses dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik/masyarakat pengguna arsip.

Salah satu hasil pengolahan arsip statis yang telah diselesaikan pada 2017 adalah Inventaris Arsip PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (1950) 1961-2008. Substansi



Deputi Konservasi ANRI H. M. Taufik, saat memaparkan materi kebijakan kearsipan

arsip yang dimuat dalam inventaris arsip ini adalah arsip tekstual terkait pelaksanaan tugas dan fungsi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN yang tercipta pada tahun (1950) 1961- 2008.

Acara Ekspose diawali dengan pemberian materi tentang Kebijakan Kearsipan oleh Deputi Konservasi ANRI H. M. Taufik, kegiatan yang dihadiri pula oleh Kepala Divisi Penunjang dan Layanan Korporat PT. PGN (Persero) Tbk. Widhi Astuti dan beberapa perwakilan BUMN Pertambangan ini kemudian dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu moderator Retno Wulandari dengan dua orang nara sumber Agus Setiawan Sejarawan bidang Migas dari Universitas Indonesia dan Azmi Direktur Pengolahan.

Dengan tersusunnya inventaris arsip ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap arsip statis PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang tersimpan di ANRI. (Inh)

BANGUN KOMUNIKASI EFEKTIF ANTAR SIMPUL JARINGAN, ANRI GELAR RAKORNAS SIKN DAN JIKN



Kepala ANRI Mustari Irawan memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Kota Batam (27/09).

Batam, ARSIP (27/9) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) gelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) di Kota Batam (27/09). Penyelenggaraan Rakornas SIKN dan JIKN merupakan sarana koordinasi fungsional dan koordinasi temu jaringan, sebagaimana diamanatkan Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Penyelenggaraan Rakornas SIKN dan JIKN tahun 2017 di Kota Batam ini dimaksudkan sebagai sarana temu koordinasi simpul jaringan untuk dapat bertukar informasi dan pengalaman serta mempererat hubungan kerja dan sinergitas antara pusat jaringan nasional serta simpul jaringan SIKN dan JIKN yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Tujuannya adalah untuk membangun komunikasi yang efektif antara pusat jaringan nasional dan simpul jaringan dalam

rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan SIKN dan JIKN", tutur Kepala Pusat SIKN dan JIKN Desi Pratiwi.

Sementara itu, Kepala ANRI Mustari Irawan menyampaikan bahwa program SIKN dan JIKN dilaksanakan untuk mewujudkan open government. "Pemerintah menempatkan Program Pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional sebagai salah satu Program Prioritas Nasional dalam Nawacita Tahun 2015–2019, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019, untuk mewujudkan penerapan open government, yang merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan", ungkap Mustari.

Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin sangat mendukung penerapan

program SIKN dan JIKN. "Pemerintah Kota Batam terus berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah tentang Nawa Cita terutama pada point kedua yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dan kebijakan pemerintah tentang E-Government dan Open Government, serta pelaksanaan amanat UU nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam telah bergabung menjadi simpul jaringan SIKN dan JIKN pada tahun 2017", terang Jefridin.

Mustari berharap melalui Rakornas SIKN dan JIKN dapat terjalin komunikasi efektif antar simpul jaringan.

Rakornas SIKN dan JIKN tahun 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 27 s.d 29 September 2017, diikuti oleh peserta dari instansi pusat, lembaga kearsipan daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta perguruan tinggi negeri. (Is)

BANGKITKAN SEMANGAT NASIONALISME, ANRI SELENGGARAKAN PAMERAN ARSIP DI WILAYAH PERBATASAN RI-PNG



Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano mengunjungi pameran arsip di areal Pos Lintas Batas Negara, 6 Oktober 2017

Papua. ARSIP. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selenggarakan pameran arsip di areal Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua (6/10).

Bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jayapura, kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 72 Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membangkitkan nasionalisme dan menumbuhkan nilai-nilai patriotisme masyarakat khususnya yang berada di wilayah perbatasan,” tutur Fungsional Arsiparis ANRI, Neneng Ridayanti selaku penanggung jawab pameran arsip (6/10).

Ridayanti menjelaskan bahwa arsip-arsip yang dipamerkan di

wilayah etalase Republik Indonesia (RI)- Papua New Guinea (PNG) berjumlah sebanyak 30 buah meliputi kebudayaan, politik, pemerintahan, ekonomi dan infrastruktur.

Hal ini dilakukan semata-mata untuk menunjukkan jati diri Papua sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arsip yang ditampilkan diantaranya arsip rumah adat kampung Tobati tahun 1903 dan tarian adat dari kampung Tobati tahun 1955.

“Pameran arsip yang dilakukan di wilayah etalase intinya adalah untuk membangkitkan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme masyarakat khususnya di wilayah perbatasan serta untuk membangkitkan dan mengenalkan jati diri masyarakat Papua tempo dulu yang terangkum

dalam khazanah arsip yang tersimpan di ANRI,” terangnya.

Dalam pameran ini, masyarakat di wilayah perbatasan baik masyarakat Jayapura (Distrik Muararati) maupun PNG (Distrik Wutung) sangat antusias menyambut dan mendukung pelaksanaan arsip di perbatasan untuk dilaksanakan dalam tahun-tahun berikutnya.

Pada kesempatan tersebut, Ridayanti mengapresiasi Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano yang telah membuka dan mengunjungi pameran arsip yang memamerkan arsip dengan kurun waktu tertua 12 April 1898. “Harapan kami ke depan, Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bisa menelusuri arsip-arsip khusus mengenai identitas atau jati diri Kota Jayapura,” ungkapnya.

ANRI DAN NAN TANDATANGANI NOTA KERJA SAMA KEARSIPAN



Kepala ANRI, Mustari Irawan (kiri) dan Kepala Arsip Nasional Belanda (NAN) Mareens Engelhard (kanan) tandatangani Memorandum of Understanding antara ANRI dengan NAN di Den Haag, 27 Oktober 2017

Belanda, ARSIP. Den Haag, 27 Oktober 2017 telah dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding antara Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan Arsip Nasional Belanda (NAN). MoU tersebut ditandatangani Kepala ANRI, Mustari Irawan dan Kepala NAN Mareens Engelhard. Adapun lingkup area kerja sama meliputi :

- a. Pertukaran pengetahuan dan pengembangan kapasitas di bidang pengelolaan arsip statis dan arsip dinamis
 - b. pertukaran scan, digital inventaris, dan metadata VOC dan arsip kolonial Belanda lainnya di ANRI dan NAN khususnya arsip tentang Pergerakan Nasional Indonesia sampai dengan era kemerdekaan yang telah diseleksi untuk digitalisasi
 - c. Konservasi tahap pertama arsip kolonial Belanda dan VOC yang ada di ANRI untuk dilakukan digitalisasi.
 - d. Digitalisasi arsip VOC dan arsip kolonial Belanda di ANRI dan Arsip Pergerakan Nasional Indonesia di NAN
 - e. Membuat fasilitas untuk memastikan preservasi yang tahan lama dan presentasi scan online yang telah dihasilkan.
 - f. Mengumpulkan guide penelitian tentang arsip-arsip kolonial Belanda yang ada di luar ANRI.
 - g. Penyelenggaraan pameran bersama dan publikasi bersama.
- Setelah penandatanganan MoU, dilanjutkan dengan pertukaran scans yang merupakan khazanah kedua lembaga kearsipan nasional tersebut. Selain acara MoU, dilaksanakan pula

pameran arsip "The birth of Indonesian Youth Movement digelar di National Archives of the Netherlands (NAN) , Den Haag Belanda yang merupakan kerja sama Arsip Nasional RI dengan Arsip Nasional Belanda. Acara pameran dilaksanakan dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda ke 89. Pameran dibuka secara resmi oleh Duta Besar LB & BP RI untuk Kerajaan Belanda, I Gusti Agung Wesaka Puja.

Dalam sambutannya, I Gusti Agung Wesaka Puja menyampaikan bahwa pameran yang digelar merupakan gambaran peristiwa lahirnya gerakan pemuda Indonesia untuk menyatakan identitas, integritas dan nasionalisme : Indonesia. Pameran berlangsung sampai tanggal 2 November 2017. (Is)

ANRI SERAHKAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS KEPADA BUMN



Kepala ANRI Mustari Irawan menandatangani berita acara serah terima aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) kepada 19 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Hotel Aston Inn Mataram, 16 November 2017

Mataram, ARSIP (16/11) Kepala ANRI Mustari Irawan membuka secara resmi kegiatan serah terima aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) kepada 19 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Kearsipan Pusat ini berlangsung mulai tanggal 16 - 18 November 2017 di Hotel Aston Inn Mataram.

Dalam sambutannya, Mustari Irawan berharap agar pencipta arsip di BUMN dapat menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya. Sehingga dapat terwujud pengelolaan arsip yang handal

dalam sistem pemberkasan serta pengadministrasian di lingkungan BUMN.

“Aplikasi yang diserahkan itu adalah bagian dari upaya ANRI bagaimana kita harus mengelola arsip yang baik dan benar terhadap 19 BUMN, dalam hal ini juga bagi suatu BUMN dapat menerapkan aplikasi SIKD”, tuturnya. Lebih lanjut Mustari menambahkan bahwa aplikasi ini terbuka untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang nantinya dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan di dalam pengelolaan arsip yang

tercipta sesuai dengan kaidah kaidah kearsipan.

Adapun BUMN yang menerima aplikasi SIKD antara lain: Perum Bulog, Perum Perumnas, Perum Peruri, PT. AirNav Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium, PT. Inti, PT. Badak, PT. Perusahaan Gas Negara, PT. Sarana Multi Infrastruktur, PT. Bio Farma, PT. Bank Negara Indonesia, PT. Dirgantara Indonesia, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Pupuk Indonesia, PT. PAL Indonesia, PT. Rekayasa Industri, PT. Pelindo, PT. Perkebunan Nusantara, PT. Semen Indonesia, PT. Aneka Tambang. (MD)

JAGA ASET KEKAYAAN BANGSA MELALUI TATA KELOLA ARSIP YANG BAIK



Kepala ANRI Mustari Irawan membuka acara Seminar Nasional Kearsipan dengan mengambil tema: "Menyelamatkan Aset Kekayaan Intelektual Bangsa untuk Industri Strategis Nasional" di ANRI Ampera Raya, Cilandak, Jakarta, 22 November 2017

Jakarta-ARSIP. Aset bersejarah merupakan sesuatu yang tak ternilai dan dapat dimanfaatkan untuk memajukan bangsa. Hal ini juga termaktub dalam sembilan poin nawa cita program Kabinet Kerja di era pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Arsip/dokumen aset merupakan salah satu aset bersejarah yang berisi informasi aset-aset kekayaan yang dimiliki oleh suatu instansi/organisasi, daerah, dan bahkan negara. Sebagai suatu aset, maka arsip/dokumen tersebut bermakna mempunyai potensi untuk dimanfaatkan pada masa yang akan datang, mampu menunjang peran dan fungsi pemerintahan sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat sehingga mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik (good

governance). Banyaknya kasus yang berkaitan dengan 'kekalahan suatu negara/daerah dalam mempertahankan aset kekayaan miliknya terutama dalam mengelola aset kekayaan bangsa termasuk aset kekayaan intelektual bangsa, tentunya berimplikasi terhadap upaya negara dalam membangun industri strategis nasional guna bersaing dengan negara-negara lain.

Oleh karenanya, pengelolaan aset-aset kekayaan milik negara/daerah merupakan salah satu jenis arsip vital yang terdapat pada suatu instansi perlu menjadi perhatian khusus sebagai bukti terciptanya akuntabilitas, alat bukti hukum dan memori organisasi yang merupakan arsip vital bagi suatu organisasi, sebagaimana yang

telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Keseriusan dalam mengelola informasi mengenai aset-aset kekayaan intelektual bangsa, harus dimaknai sebagai upaya negara untuk memperkuat ketahanan informasi sebagai bagian dari ketahanan nasional.

Atas pertimbangan diatas, Asosiasi Arsiparis Indonesia disingkat (AAI) suatu organisasi profesi Arsiparis yang mewadahi komunitas profesional kearsipan di Indonesia yang beranggotakan para Arsiparis dan tenaga kearsipan yang bekerja pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, para pejabat struktural di bidang pembinaan kearsipan, masyarakat pencinta arsip,

LIPUTAN

pemerhati arsip, dan kaum profesional kearsipan. Sebagai organisasi profesi dengan anggota lebih dari 10.000 orang, AAI mempunyai tujuan sebagai berikut : (1) mempertinggi mutu SDM bidang kearsipan sehingga tercipta tenaga kearsipan yang handal dan mandiri; dan (2) mempertinggi mutu penyelenggaraan dan pemanfaatan kearsipan.

Selanjutnya, AAI bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Peminatan Sejarah (LKPS) dan didukung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Seminar Nasional Kearsipan dengan mengambil tema: "Menyelamatkan Aset Kekayaan Intelektual Bangsa untuk Membangun Industri Strategis Nasional". Kegiatan Seminar Nasional Kearsipan diadakan di Gedung Noerhadi Magetsari- Arsip Nasional Republik Indonesia, Jln. Ampera Raya Nomor 7-Cilandak, Jakarta Selatan. Acara seminar dimaksudkan untuk menyamakan persepsi publik/masyarakat dan penyelenggara negara mengenai pentingnya kegiatan penyelamatan aset kekayaan intelektual bangsa dan industri strategis nasional sebagai salah satu bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa, selain itu juga untuk memberdayakan pemanfaatan sumber arsip menuju kejayaan industri strategis nasional dalam upaya mendukung salah satu program nawacita Kabinet Kerja bahwa aset bersejarah merupakan sesuatu yang tak ternilai dan dapat dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa.

"Melalui Seminar ini diharapkan akan membangun rasa kepedulian dan tanggungjawab dari penyelenggara negara dan swasta, Arsiparis atau pengelola arsip/dokumen mengenai



Panitia seminar menghadirkan para pembicara yang berkompeten di bidangnya masing-masing, diantaranya narasumber dari Kementerian Perindustrian, Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN), PN AAI, PT. Kereta Api Indonesia, dan BPJS Ketenagakerjaan.

pentingnya kegiatan penyelamatan arsip aset kekayaan intelektual bangsa dan industri strategis nasional lainnya yang dihasilkan dari suatu bangsa sebagai bukti pertanggungjawaban nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan maupun bentuk kepedulian kami AAI dalam mensosialisasikan penganan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip", terang Ketua Panitia Seminar Bambang Parjono Widodo.

Acara seminar dibuka oleh Kepala ANRI Mustari Irawan. Dalam sambutannya, Mustari Irawan menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan memberikan ruang yang sangat luas kepada pekerja kearsipan dimana ingin dikatakan profesionalisme maka harus adanya organisasi profesi atau asosiasi. Dengan terlaksananya acara yang diadakan oleh Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) para arsiparis dapat

berbagi pengalaman tentang masalah yang aktual sesuai dengan keadaan bangsa saat ini seperti membahas tema tentang arsip aset.

"Banyak dari kita semua tidak mementingkan bagaimana kita harus mengelola arsip aset, jadi ini barangkali harus kita fokuskan bersama-sama. Tentu saja Arsip Nasional selalu mendukung kegiatan yang diselenggarakan AAI karna ini adalah keterkaitan dalam lembaga yang membinanya", tuturnya. Mustari berharap pada seminar ini dapat dirumuskan sebuah rekomendasi yang sangat penting, selanjutnya akan diusulkan kepada pemerintah atau paling tidak kepada lembaga yang ikut didalam pembinaan ini. Hal ini disebabkan masalah aset adalah masalah yang sangat rawan. Kehilangan arsip aset maka akan kehilangan banyak kekayaan.

Sementara itu, Ketua Pengurus Nasional AAI Andi Kasman menambahkan bahwa dalam



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menutup acara Seminar Nasional Kearsipan “Menyelamatkan Aset Kekayaan Intelektual Bangsa untuk Industri Strategis Nasional”

membangun lembaga pengelola aset kekayaan negara perlu aset yang bergerak aktif dan inovatif, baik di pemerintahan maupun swasta sehingga harus melakukan perubahan dengan meningkatkan kualitas sumber daya pada organisasi tersebut. Dalam memanfaatkan kekayaan Intelektual juga harus menghasilkan suatu proses produk atau jasa yang berguna bagi manusia.

“Perkembangan tata pemerintah negara dewasa ini banyak mengalami perubahan terutama dalam bidang ekonomi dan persaingan global sehingga harus mementingkan inovasi dan sistem informasi juga kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Pelaku kearsipan perlu mengelola arsip yang benar untuk dilestarikan oleh lembaga kearsipan tersebut. Dimana dalam mengelola arsip negara yang baik akan menjadikan bangsa yang makmur” ungkap Andi Kasman.

Acara seminar ditutup oleh Asman Abnur selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Asman Abnur menyampaikan bahwa peran profesi arsip sangatlah vital dan strategis untuk menjadi acuan pembelajaran bangsa. Dimana lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perusahaan dan juga perorangan harus melakukan penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan dan pelaporan arsip. Segala capaian kegiatan kedepannya harus dikelola oleh arsiparis yang ahli dalam bidangnya, hal itu dikarenakan arsip bertujuan sebagai pembuktian sejarah.

“Didalam mewujudkan penyelenggara negara yang baik dan bersih dalam menjaga dinamika gerak maju masyarakat bangsa negara kedepan harus sesuai dengan tujuan

nasional dan nawacita yakni arsip yang tercipta harus menjadi sumber informasi. Sistem arsip kedepannya harus mengikuti teknologi sesuai kemajuan globalisasi. Tenaga arsiparis kedepannya juga akan memiliki nilai strategis dan dijadikan posisi jabatan yang bergengsi”, terangnya.

Kegiatan seminar ini dilanjutkan dalam bentuk diskusi panel dengan dua sesi dan melibatkan nara sumber selaku pembicara yang berkompeten dengan bidangnya masing-masing, diantaranya narasumber dari Kementerian Perindustrian, Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN), PN AAI, PT. Kereta Api Indonesia, dan BPJS Ketenagakerjaan. ((Is/lc)

WUJUDKAN TATA KELOLA ARSIP BERBASIS TIK DI PERGURUAN TINGGI NEGERI, ANRI SERAHKAN APLIKASI SIKD



Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Andi Kasman (ketiga dari kanan) menyerahkan secara langsung aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis kepada Rektor dan Perwakilan Perguruan Tinggi Negeri di Hotel Amaroossa, Jakarta, 4 Desember 2017

Jakarta-ARSIP. Dalam rangka penerapan tata kelola kearsipan dinamis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), ANRI menyerahkan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) pada 22 Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Andi Kasman menyerahkan secara langsung aplikasi SIKD kepada Rektor dan Perwakilan PTN. Acara serah terima SIKD dilaksanakan di Hotel Amaroossa, Jakarta (04/12).

Kepala Subdirektorat Pusat III Sulistyowati menyampaikan maksud dan tujuan diselenggarakannya acara serah terima SIKD. “Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah melakukan serah terima aplikasi SIKD kepada PTN agar aplikasi tersebut dapat diaplikasikan dalam pengelolaan arsip dengan menggunakan sistem informasi kearsipan dinamis berbasis

teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan sesuai dengan kaidah kearsipan”, terangnya.

Lebih lanjut Sulistyowati menambahkan bahwa perguruan tinggi di Indonesia sebagai institusi ilmiah memegang peran strategis dalam membangun peradaban bangsa, karena melaksanakan 3 (tiga) fungsi utama yang dikenal sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, perguruan tinggi pasti menghasilkan arsip sebagai informasi yang terekam (*recorded information*), yang merupakan aset perguruan tinggi dan sekaligus aset publik yang perlu dikelola dengan baik sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja perguruan tinggi yang merefleksikan capaian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh

karena itu arsip yang di ciptakan oleh perguruan tinggi mempunyai manfaat yang penting dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Andi Kasman dalam sambutannya menyampaikan bahwa implementasi SIKD merupakan upaya ANRI dalam mendukung program E-Government. “Dari Sembilan E-Government ada yang namanya E-Arsip. Di dalam E-Arsip ini ada dua, yang pertama disebut dengan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis, yang kedua adalah Sistem Informasi Kearsipan Statis”, tuturnya. Lebih lanjut Andi Kasman menambahkan bahwa kedepan PTN tidak hanya menerapkan SIKD, tapi juga perlu mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS). (Is)

MENENGOK SEJENAK MODA TRANSPORTASI TRADISIONAL DI MASA LALU

Jakarta-ARSIP. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) selenggarakan launching Naskah Sumber Arsip Moda Transportasi Tradisional. Acara launching diselenggarakan di Museum Transportasi, Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Naskah Sumber Arsip Moda Transportasi Tradisional mengulas mengenai tenaga hewan mulai dari Kuda hingga Cikar. Tema ini dipilih karena transportasi merupakan bagian yang tidak pernah lepas dari sejarah peradaban manusia.

“Pergeseran dari satu tempat ke tempat lain sangatlah bergantung pada sarana transportasi yang dapat diandalkan sejak jaman dahulu. Sejarah pun mencatat bahwa perkembangan transportasi sangat bertumpu pada kemajuan teknologi”, tutur Ketua Panitia Launching Eli Ruliawati. Lebih lanjut Eli menambahkan bahwa transportasi yang bersifat tradisional sebagian besar tetap bertahan dalam kehidupan masyarakat di negeri ini. Ia menjadi bagian dari identitas dan jati diri peradaban Indonesia sekaligus terukir dalam memori kolektif bangsa yang tak lekang oleh waktu.

Direktur Utama TMII, Bambang Soetanto menyambut baik atas terselenggaranya peluncuran naskah sumber arsip tersebut di Museum Transportasi. “Pelaksanaan launching ini, sangatlah tepat dilaksanakan di Museum Transportasi, yang memiliki misi memasyarakatkan sejarah perkembangan transportasi dan perannya di Indonesia”, ungkapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Konservasi Arsip M. Taufik berharap naskah sumber arsip ini dapat dijadikan sumber referensi dalam menggali sejarah transportasi di Indonesia. “Melalui naskah sumber yang bersumber dari khazanah arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia ini, kami berharap masyarakat dapat memperoleh pengetahuan tentang sejarah transportasi Indonesia dan



Suasana Talkshow Launching Naskah Sumber Arsip Moda Transportasi Tradisional. Acara launching diselenggarakan di Museum Transportasi, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, 14 Desember 2017



Deputi Bidang Konservasi Arsip, M. Taufik saat memberikan sambutan

sekaligus menikmati nostalgia tentang kendaraan tradisional yang mungkin pernah kita tumpangi di masa lalu”, tuturnya.

Acara launching dilanjutkan dengan talk show yang diawali dengan presentasi Penulis, Dharwis dilanjutkan dengan diskusi dan pembahasan oleh para narasumber yakni Bondan Kanumoyoso yang merupakan Sejarawan dari Universitas Indonesia, dan Nara Sumber di bidang transportasi yakni Danang

Setyo Wibowo (Kepala Museum Transportasi), Tri Wahyono (Asisten Senior Manager TI Perum Damri) yang akan membedah dan mengupas Naskah Sumber Arsip Moda Transportasi Tradisional. Acara p e m b a h a s a n ini dipandu oleh Agus Santoso (Direktur Layanan

dan Pemanfaatan Arsip), selaku moderator.

Peserta yang diundang dalam peluncuran ini, terdiri dari para Kepala Museum dan Anjungan TMII, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perum DAMRI, beberapa komunitas antara lain Komunitas Historia, Jelajah, Kelompok Pemerhati Budaya dan Museum Indonesia, Komunitas Ayo Dongeng Indonesia, Perguruan Tinggi dan Undangan lainnya. (Is)

PERINGATI 100 TAHUN ADAM MALIK, ANRI GELAR PELUNCURAN NASKAH SUMBER ARSIP ADAM MALIK

Jakarta-ARSIP. Peringati 100 Tahun Adam Malik, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar Launching Naskah Sumber Arsip Adam Malik (Menembus Empat Zaman). Naskah sumber arsip tersebut mengulas tentang peran aktif Adam Malik dalam bidang politik dan kepartaian sejak masa kolonial, pendudukan Jepang, Pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.

“Naskah Sumber Arsip ini menceritakan rekam jejak kehidupan Adam Malik sejak masa kanak-kanak hingga karier tertingginya yakni sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia”, terang Ketua Panitia Penyelenggara Agus Santoso.

Lebih lanjut Agus Santoso menambahkan bahwa Adam Malik merupakan figur yang mengajarkan kepada kita bahwa profesionalisme dan dedikasi yang tinggi akan menjadi manusia yang mampu menembus dinding pembatas yang memisahkan kekuasaan di negeri ini. Ia memegang peran penting dalam setiap periode pemerintahan di negeri ini pada masa hidupnya.

“Selain itu, Naskah Sumber yang bersumber dari khazanah arsip yang tersimpan di ANRI dan koleksi keluarga Adam Malik, juga merupakan persembahan dalam rangka seratus tahun kelahiran si Bung demikian sapaan akrabnya”, tuturnya.

Acara launching diawali dengan penyerahan Naskah Sumber Arsip Adam Malik dari Kepala ANRI kepada Bapak Otto Malik (putra sulung Adam Malik). Kemudian dilanjutkan dengan diskusi Naskah sumber arsip Adam Malik dengan pembicara Sejarawan Asvi Warman Adam, Gunajaya Malik (Cucu Adam Malik), Suryagung & Nurarta Situmorang (Penulis), dan dimoderatori oleh Hermanus (LKBN Antara).

Adam Malik merupakan seorang tokoh nasionalis yang berperan aktif



Diskusi Naskah sumber arsip Adam Malik dengan menghadirkan pembicara Sejarawan Asvi Warman Adam, Gunajaya Malik (Cucu Adam Malik), Suryagung & Nurarta Situmorang (Penulis), dan dimoderatori oleh Hermanus (LKBN Antara). Acara diskusi dilaksanakan di Gedung ANRI, Ampera Raya, Cilandak, Jakarta, 15 Desember 2017

dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kepiawaiannya Adam Malik dalam berdiplomasi sudah teruji dengan baik. Hal ini terlihat pada saat beliau menjabat sebagai Menteri Luar Negeri baik pada masa pemerintahan Presiden Soekarno maupun pada masa Presiden Soeharto. Bahkan pada tahun 1971, Beliau pernah memimpin Ketua Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa saat memutuskan negara Republik Rakyat China masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Saya kira tidak semua orang bisa menjadi ketua sidang di sana (Sidang PBB). Itu sangat sulit sekali kalau menurut saya. Kemampuan, kapasitas di dalam lobi, kemampuan di dalam komunikasi secara internasional itu menjadi persyaratan yang utama. itu tidak semua bisa kita lakukan. Pak Adam Malik bisa”, ungkap Kepala ANRI Mustari Irawan. Lebih lanjut Mustari menambahkan bahwa Adam Malik juga memiliki peranan yang sangat penting dalam sejarah perjalanan Indonesia, yakni pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Adam Malik juga pernah menjadi ketua tim perundingan Indonesia-Belanda untuk masalah Irian Barat pada 7 Maret 1962. Peran lainnya, Beliau juga merupakan salah satu pendiri Association of Southeast Asian Nations.

Pada masa-masa perjuangan, Adam Malik pernah bekerja sebagai seorang jurnalis. Kemudian menjadi salah satu pendiri Partai Musyawarah Rakyat Banyak (MURBA). Adam Malik merupakan salah satu pendiri kantor Berita Antara dan pernah bertugas sebagai duta besar di Rusia. Semua kisah Adam Malik yang tertuang dalam naskah sumber arsip, diperoleh dari arsip-arsip yang berasal dari khazanah arsip keluarga maupun khazanah arsip yang tersimpan di ANRI.

Sementara itu, Otto Malik yang merupakan putra sulung Adam Malik sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada ANRI yang telah memprakarsai penerbitan naskah sumber arsip Adam Malik dan peluncuran naskah sumber tersebut. (Is)